

**EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA KERUSUHAN SOSIAL  
DI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA,  
KOTA AMBON**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota**

**Oleh :  
Wahjudi Sasongko Sutiksno  
L4D002135**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2004**

**EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA KERUSUHAN SOSIAL  
DI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON**

**Tesis diajukan Kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota**

**Oleh :**

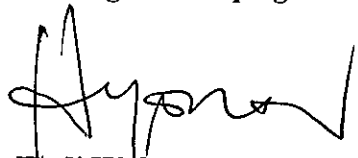
**Wahjudi Sasongko Sutiksno  
L4D002135**

**Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 17 Desember 2004**

**Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik**

**Semarang, 17 Desember 2004**

**Pembimbing Pendamping**



**Ir. Hadi Wahyono. MA.**

**Pembimbing Utama**

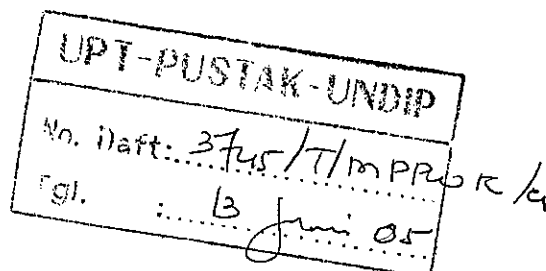


**Ir. Nany Yulastuti, MSP**

**Mengetahui Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**



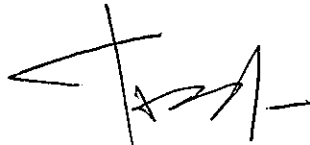
**Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang Pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang Pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui Dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka

Semarang, 17 Desember 2004



Wahjudi Sasongko Sutiksno  
L4D002135

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaanNya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, dengan Dosen Pembimbing **Ir. Nany Yuliastuti, MSP** dan **Ir. Hadi Wahyono, MA**. Tulisan ini mengkaji tentang kondisi daerah konflik dan implementasi dari kebijakan permukiman dan kebijakan yang terkait di Propinsi Maluku khususnya Kota Ambon dengan harapan memberikan masukan kepada pihak yang berwenang untuk dapat mengakomodirnya; kondisi prasarana dan sarana dasar pelayanan publik yang masih minim, kondisi permukiman yang masih minim fasilitas pendukung dan pengungsi yang belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan penanganan daerah konflik.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES. DEA., selaku ketua program pasca sarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro yang memberikan bimbingan dan izin untuk meneliti masalah ini.
2. Ir. Nany Yuliastuti, MSP. dan Ir. Hadi Wahyono, MA., selaku dosen pembimbing atas segala petunjuk dan bimbingan yang diberikan selama penyusunan penulisan ini.
3. Ir. Mardwi Rahdriawan, MT., selaku dosen pembahas utama Pra-Tesis yang memberikan petunjuk dan saran dalam penyempurnaannya.
4. Ir. Rina Kurniati, MT., selaku dosen pembahas pandamping dalam sidang ujian Tesis yang memberikan petunjuk dan saran dalam penyempurnaannya.
5. Kepala Balai Pendidikan Diploma dan Magister Pengembangan Wilayah Departemen Kimpraswil beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan dorongan untuk menyelesaikan studi.
6. Para Dosen pada program pasca sarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro yang memberikan bimbingan dan pengajaran didalam perkuliahan selama ini.
7. Rekan-rekan seangkatan MPPWK II yang memberikan bantuan materil dan dorongan moril selama penulisan ini.

8. Rekan-rekan kerja kami di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku yang memberikan bantuan data dan dorongan moril selama penulisan ini.
9. Tetangga kami di Asrama yang memberikan pengertiannya selama penulisan ini.
10. Keluarga H. Sayono yang memberikan perhatian, bantuan materil dan dorongan moril selama penulisan ini.
11. Keluarga besar kami di Ambon; Orang Tua Kami Keluarga P.S. Sutiksno dan *basudara* kami yang lain atas dukungan doa dan dorongan moril selama penulisan ini.
12. Istri dan Anak kami; Sulianah dan Yusli Kukuh atas dukungan doa, perhatian, dukungan materil dan dorongan moril selama penulisan ini.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah membantu hingga selesainya penulisan ini.

Kami menyadari tulisan ini memiliki banyak keterbatasan baik data, metode maupun literatur untuk bahan kajian untuk itu semua masukan perbaikan yang diberikan kami terima dengan lapang dada untuk penyempurnaannya. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Semarang, 17 Desember 2004

Hormat,

Penyusun

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Orangtua kami P.S. Sososutiksno dan T.M. Sososutiksno, Istri kami Sulianah Sutiksno dan Anak kami Yusli Kukuh Sutiksno dan Basudara kami yang lain, semoga tulisan ini bermanfaat untuk masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial di Propinsi Maluku, khususnya di Ambon Manise.*

---

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Sasaran Penelitian .....	5
1.4. Ruang Lingkup Studi .....	5
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial .....	6
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah / Spasial .....	6
1.5. Keaslian Penelitian .....	7
1.6. Kerangka Pemikiran .....	8
1.7. Pendekatan Penelitian .....	9
1.7.1. Desain Studi Evaluasi .....	10
1.7.2. Permodelan .....	12
1.7.3. Beberapa Penyimpangan Dalam Penelitian Evaluasi .....	13
1.8. Kebutuhan Data .....	14
1.9. Cara Pengumpulan Data .....	15
1.9.1. Data Primer .....	16
1.9.2. Data Sekunder .....	17
1.9.3. Teknik Sampling .....	17

1.10. Metode Analisis .....	19
1.11. Kerangka Analisis ( <i>Analisis Framework</i> ) .....	19
1.12. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II. TINJAUAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, WILAYAH PERDESAAN, PERMUKIMAN KEMBALI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>	<b>24</b>
2.1. Tinjauan Perumahan dan Permukiman .....	24
2.1.1. Pengertian Perumahan dan Permukiman .....	24
2.1.2. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Permukiman .....	25
2.1.3. Kriteria Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah .....	27
2.2. Tinjauan Wilayah Perdesaan .....	27
2.2.1. Wilayah Perdesaan .....	27
2.2.2. Penggunaan Tanah Perdesaan .....	28
2.2.3. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Ekonomi di Desa .....	28
2.2.4. Perencanaan Perdesaan .....	29
2.2.4.1. Pengertian Perencanaan Perdesaan .....	29
2.2.4.2. Model Perkampungan Terencana .....	29
2.3. Tinjauan Permukiman Kembali .....	30
2.3.1. Kasus-Kasus Penanganan Permukiman Kembali .....	30
2.3.2. Pengertian Relokasi .....	32
2.3.3. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Relokasi .....	32
2.3.4. Dampak Negatif yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pelaksanaan Program Relokasi .....	33
2.3.5. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pelaksanaan Relokasi .....	33
2.4. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik .....	34
2.3.6. Kebijakan Publik .....	34
2.3.7. Pengertian Evaluasi Kebijakan .....	35
2.3.8. Hasil / Produk Evaluasi Kebijakan .....	36
2.3.9. Berbagai Evaluasi Implementasi Kebijakan .....	38
2.3.10. Kriteria Evaluasi Kebijakan .....	40
Kesimpulan Kriteria Kebijakan Relokasi .....	42



<b>BAB. III. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KONDISI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON .....</b>	<b>44</b>
3.1. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2000-2004 .....	44
3.1.1. Hakekat Perumahan .....	44
3.1.2. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman .....	44
3.1.2.1. Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman .....	44
3.1.2.2. Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman .....	45
3.1.2.3. Kegiatan .....	45
3.2. Kebijakan dan Strategi Penanganan Pengungsi/ Masyarakat yang Mengalami Kerusakan Sosial Propinsi Maluku .....	45
3.2.1. Kebijakan .....	46
3.2.2. Strategi .....	46
3.2.3. Kegiatan .....	50
3.3. Kondisi Wilayah Kota Ambon .....	52
3.2.4. Iklim .....	54
3.2.5. Kelerengan .....	54
3.2.6. Jenis Batuan .....	55
3.2.7. Sumber-Sumber Air .....	56
3.4. Konsep Dasar Pengembangan Kota .....	57
3.5. Kebijakan Pengembangan Kota .....	57
3.5.1. Kebijakan Perwilayahan Kota Ambon .....	60
3.5.1.1. Rencana Tata Guna Tanah .....	63
3.5.1.2. Penggunaan Lahan .....	65
3.5.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	68
3.5.2.1. Jumlah Penduduk .....	68
3.5.2.2. Komposisi Penduduk .....	68
3.5.3. Sosial Budaya .....	72
3.5.4. Perekonomian .....	74
3.5.5. Transportasi Kota .....	77
3.5.6. Perumahan dan Permukiman.....	79

3.5.7. Fasilitas Umum .....	80
3.5.7.1. Sarana Pendidikan .....	80
3.5.7.2. Sarana Peribadatan .....	81
3.5.7.3. Sarana Kesehatan .....	81
3.5.8. Sarana Perekonomian .....	82
3.6. Kondisi Wilayah Kota Ambon Dalam Kerusuhan Sosial .....	82
3.6.1. Kondisi Guna Lahan .....	83
3.6.2. Kependudukan .....	83
3.6.3. Sosial Budaya .....	84
3.6.4. Perekonomian .....	86
3.6.4.1. Sektor Perdagangan dan Jasa .....	87
3.6.4.2. Sektor Pariwisata .....	87
3.6.4.3. Sektor Industri .....	88
3.6.4.4. Sektor Perikanan .....	88
3.6.4.5. Sektor Pertanian dan Peternakan .....	88
3.6.5. Transportasi .....	88
3.6.6. Perumahan dan Permukiman .....	89
3.6.7. Fasilitas Pendukung Permukiman .....	89
3.6.8. Sarana Perekonomian .....	90
3.6.9. Kendala-Kendala Dalam Kerusuhan Sosial Untuk Implementasi Kebijakan Perumahan dan Permukiman .....	90
3.7. Implementasi Kebijakan Perumahan dan Permukiman di Kota Ambon .....	92
3.7.1. Permasalahan Perumahan dan Permukiman .....	93
3.7.2. Pendekatan Penanganan .....	93
3.7.3. Kondisi Dusun Benteng Karang yang Mengalami Kerusuhan .....	95
3.7.3.1. Letak Dusun Benteng Karang.....	95
3.7.3.2. Jumlah Penduduk .....	95
3.7.3.3. Mata Pencarian .....	95
3.7.3.4. Transportasi .....	96
3.7.4. Relokasi Di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala .....	96

<b>BAB. IV. ANALISIS PROSES RELOKASI .....</b>	<b>112</b>
4.1. Analisis Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran), Desa Passo .....	112
4.1.1. Dampak Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) Terhadap Pemukim .....	115
4.1.2. Dampak Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) Terhadap Masyarakat Desa Passo .....	125
4.1.3. Dampak Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) Terhadap Perkembangan Wilayah Dusun Ama Ory .....	127
4.2. Relokasi Di Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol ), Desa Passo .....	128
4.3. Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) dan Relokasi di Lembah Agro (Kelompok Kontrol) .....	134
<b>BAB.V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>139</b>
5.1. Kesimpulan .....	140
5.2. Rekomendasi .....	142

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel.I.1. Jenis Studi Evaluasi .....	12
Tabel.I.2. Deskripsi Desain Eksperimental .....	13
Tabel.I.3. Kebutuhan Data .....	15
Tabel.I.4. Proses Tahapan Penelitian .....	21
Tabel.III.1. Penetapan Tingkat Kepadatan Wilayah Kota Ambon .....	58
Tabel.III.2. Lokasi Pengelompokan Wilayah Pengembangan Lahan Budidaya Non- Pertanian di Kota Ambon .....	66
Tabel.III.3. Perkembangan Penduduk Kota Ambon Tahun 1980-1998 .....	68
Tabel.III.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Serta Ratio Jenis Kelamin di Kota Ambon, Tahun 1990 .....	69
Tabel.III.5. Jumlah Penduduk menurut Agama Tiap Kecamatan di kota Ambon, Tahun 1991 .....	70
Tabel.III.6. Perkembangan Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kota Ambon, Tahun 1988-1991 .....	70
Tabel.III.7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kota Ambon Tahun 1990-1992 .....	71
Tabel.III.8. Sebaran Kepadatan Penduduk dan Rata-Rata Keluarga, Tahun 1992 .....	71
Tabel.III.9. Produk Domestik Bruto Kota Ambon Atas Dasar Harga yang Berlaku, Tahun 1983 – 1991 .....	76
Tabel.III.10. Produk Domestik Bruto Kota Ambon Atas Dasar Harga yang Berlaku dan Harga Konstan, Tahun 1996 – 1998 .....	76
Tabel.III.11. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Ambon, Tahun 1996 – 2000 .....	77
Tabel.III.12. Jumlah Bus Angkutan Pwenuhumpang Menurut Trayek yang Beroperasi Dalam Wilayah Kota Ambon .....	78
Tabel.III.13. Banyaknya Pelabuhan, Dermaga dan Luas Gudang di Kota Ambon, tahun 1996 – 2000 .....	79
Tabel.III.14. Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Ruang di Kota Ambon, tahun 1995 –2005 .....	80
Tabel.III.15. Banyaknya Sekolah dan Gedung dan Perguruan Tinggi, Tahun 1996/1997 – 1997/1998 .....	81

Tabel.III.16. Banyaknya Sarana Peribadatan di Kota Ambon, Tahun 1996 – 1998 .....	81
Tabel.III.17. Banyaknya Sarana Kesehatan di Kota Ambon, tahun 1996 – 1998 .....	82
Tabel.III.18. Jumlah Perusahaan Perdagangan di Kota Ambon, tahun 1987 dan 1991 .....	82
Tabel.III.19. Jumlah Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan Sosial (JMMKS) di Kota Ambon Sampai Dengan Periode Bulan Oktober Tahun 2003 .....	84
Tabel.III.20. Penurunan Sektor-Sektor Pendapatan Produk Domestik Bruto (PDRB) Tahun 199 Atas Harga Konstan .....	86
Tabel.III.21. Perumahan Yang Belum Tertangani Pasca Kerusakan Sosial .....	89
Tabel.III.22. Fasilitas Pendukung Permukiman yang Rusak Dalam Kerusakan Sosial .....	90
Tabel.III.23. Sarana Perekonomian Yang Rusak Dalam Kerusakan Sosial .....	90
Tabel.III.24. Lokasi Pengelompokan Wilayah Pengembangan Lahan Budidaya Non- Pertanian di Kecamatan Teluk Ambon Baguala .....	97
Tabel.III.25. Penduduk Berusia Kerja dan Belum Berusia Kerja di Kecamatan Teluk Ambon Baguala .....	98
Tabel.III.26. Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Relokasi dan Resettlement di Kecamatan Teluk Ambon Baguala .....	99
Tabel.III.27. Penurunan Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Teluk Ambon Baguala tahun 1999-2000 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku .....	100
Tabel.III.28. Sarana Pendidikan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Tahun 1996/1997 .....	101
Tabel.III.29. Sarana Peribadatan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Tahun 1998 .....	102
Tabel.III.30. Sarana Kesehatan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Tahun 1998 .....	102
Tabel.III.31. Jumlah Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan Sosial yang Masih Menetap di Desa Passo Sampai Dengan Bulan mei 2004 .....	103
Tabel.III.32. Hasil Kegiatan di Dusun Ama Ory dan di Dusun Lembah Agro, Desa Passo .....	111
Tabel.IV.1. Implementasi Kebijakan Relokasi .....	115
Tabel.IV.2. Sosial Ekonomi .....	117
Tabel.IV.3. Sosial Budaya .....	118
Tabel.IV.4. Fisik Rumah .....	118
Tabel.IV.5. Kondisi Rumah .....	119
Tabel.IV.6. Kondisi Sarana Pendidikan .....	120
Tabel.IV.7. Kondisi Sarana Peribadatan .....	121

Tabel.IV.8. Kondisi Sarana Kesehatan .....	121
Tabel.IV.9. Kondisi Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari .....	122
Tabel.IV.10. Pelibatan Masyarakat .....	123
Tabel.IV.11. Kinerja Pelaksana Program .....	123
Tabel.IV.12. Keinginan Untuk Pindah Ke Lokasi Lama .....	125
Tabel.IV.13. Tanggapan Masyarakat Desa Passo terhadap Keberadaan Relokasi .....	125
Tabel.IV.14. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Passo .....	126
Tabel.IV.15. Sosial Ekonomi .....	129
Tabel.IV.16. Sosial Budaya .....	130
Tabel.IV.17. Fisik Rumah .....	130
Tabel.IV.18. Kondisi Rumah .....	131
Tabel.IV.19. Kondisi Sarana Pendidikan .....	131
Tabel.IV.20. Kondisi Sarana Peribadatan .....	132
Tabel.IV.21. Kondisi Sarana Kesehatan .....	132
Tabel.IV.22. Kondisi Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari .....	133
Tabel.IV.23. Kinerja Pelaksana .....	134
Tabel.IV.24. Keinginan Untuk Pindah Ke Lokasi Lama .....	134
Tabel.IV.25. Perkiraan Kebutuhan Biaya Perumahan Akibat Kerusakan Sosial Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2003 .....	136

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.I.1. Kerangka Pemikiran Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasca Kerusuhan Sosial di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon .....	8
Gambar.I.2. Kerangka Pendekatan Penelitian .....	9
Gambar.I.3. Analisis Antar- Waktu Sebelum dan Sesudah Program .....	11
Gambar.I.4. Analisis Antar-Waktu Sebelum dan Sesudah Program .....	11
Gambar.I.5. Model Keterkaitan Kebijakan dan Hasil atau <i>Outcome</i> .....	12
Gambar.II.1. Pola Penanganan Permukiman Kembali di Nusa Tenggara Timur .....	31
Gambar.II.2. Proses Kebijakan .....	35
Gambar.II.3. Kebijakan dan Hasilnya .....	35
Gambar.II.4. Model Meter dan Horn .....	38
Gambar.II.5. Model Grindle .....	39
Gambar.II.6. Model Sabatier Mazmanian .....	40
Gambar.III.1. Pos Komando Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial .....	47
Gambar.III.2. Pola Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial .....	49
Gambar.III.3. Pola Penanganan Pengungsi Relokasi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial .....	49
Gambar.III.4. Peta Administrasi .....	53
Gambar.III.5. Peta Struktur Tata Ruang Kota Ambon .....	62
Gambar.III.6. Peta Potensi dan Permasalahan Penggunaan Lahan .....	67
Gambar.III.7. Peta Lokasi Site .....	106
Gambar.IV.1. Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi .....	137
Gambar.IV.2. Model Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Relokasi .....	138

## Abstrak

Kerusuhan sosial Tanggal 19 Januari 1999 memberikan pengaruh yang negatif terhadap Propinsi Maluku dengan kerusakan sistem prasarana dan sarana, sistem perekonomian, sistem sosial budaya, perumahan dan permukiman dan kondisi psikologis masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial, masyarakat di wilayah kerusuhan sosial dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengungsi di Propinsi Maluku berjumlah 332.548 jiwa dan di Kota Ambon berjumlah 145.328 jiwa atau 29.613 Kepala Keluarga (KK). Jumlah Perumahan dan permukiman yang rusak di Propinsi Maluku berjumlah 52.714 bangunan. Prasarana dan sarana pendukung permukiman yang rusak berjumlah 1.086 unit. Produk Domestik Bruto (PDRB) Propinsi Maluku menurut perhitungan atas dasar harga konstan selama kerusuhan sosial adalah sebesar - 29,11 % pada tahun 1999, dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDRB) tahun 1998.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak relokasi akibat kerusuhan sosial terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial serta pengaruhnya terhadap Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

Metoda penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis cross tabulation, penentuan sampel ditentukan secara simple random sampling. Evaluasi dilaksanakan terhadap kondisi setelah masyarakat Dusun Benteng Karang yang mengalami relokasi ke Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran), Desa Passo. Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan membandingkan kebijakan relokasi ini dengan relokasi di Dusun Lembah Agro, sebagai Kelompok Kontrol.

Hasil penelitian implementasi kebijakan relokasi dapat disimpulkan, bahwa :

- Kebijakan relokasi menyediakan perumahan dan permukiman yang layak huni bagi kelompok sasaran dari segi sosial ekonomi, segi sosial budaya, fisik perumahan, prasarana dan sarana serta memperhatikan kebijakan pengembangan kota yang mendukung bagi perkembangan wilayah Dusun Ama Ory dan Desa Passo.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory yang menyediakan 336 unit perumahan dan permukiman dan relokasi di Dusun Lembah Agro yang menyediakan 300 unit perumahan dan permukiman merupakan upaya pemenuhan sebahagian kebutuhan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial akan kebutuhan perumahan dan permukiman yang berjumlah 16.311 unit di Kota Ambon.
- Lokasi relokasi memerlukan aksesibilitas terhadap segi sosial, segi ekonomi, segi budaya, segi kebijakan dan segi keamanan.

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan rekomendasi, bahwa :

- Penanganan lanjutan kebijakan ini terhadap Dusun Ama Ory dijadikan sebagai permukiman yang bercirikan pertanian dengan peningkatan prasarana dan sarana dan memanfaatkan forum-forum masyarakat yang telah terbentuk, sesuai potensi dan perkembangan wilayahnya.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro memerlukan bantuan prasarana dan sarana transportasi dan pendidikan.
- Konsistensi koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan dalam implementasi kebijakan pada tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat "lapangan" menentukan keberhasilan kinerja kebijakan.
- Penelitian lanjutan diharapkan dilaksanakan pada periode tertentu diwaktu yang akan datang untuk mengkaji perkembangan kehidupan pemukim dan wilayah sekitar sehingga dapat ditentukan karakteristik permukiman dan wilayah secara lebih terperinci.



## *Abstract*

*Social crushed on January 19<sup>th</sup>, 1999, made negative influence to Maluku Province especially structure and infrastructure system, economic, social culture, building and housing damage. It also destruct society psychology on this places, society region, and Indonesian society common.*

*About 332.548 fugitived at Maluku Province and another 145.328 at Ambon or 29.613 families. Destruction amount of building and houses at Maluku Province was about 52.714. Broken building structure and infrastructure was 1.086 units. Decreasing Domestic Bruto Product at Maluku Province with constant price counting about -29,11 % on 1999, compare with Domestic Bruto Product on 1998.*

*This research purpose to study the influence of relocation cause social crushed to social condition, economic, and social culture till those influences to Passo Village, Ambon Baguala Bay District.*

*This research technique is description analysis and cross tabulation analysis, sample taken as simple random sampling. Evaluation done to condition after Benteng Karang Sub Village Society relocated to Ama Ory Sub Village (target group), Passo Village, with comparing this relocation policy with relocation at Agro Valley Sub Village, as control group.*

*Summary of implementation policy relocate is :*

- *Relocation policy provide good building and housing far target group, from social economic and social culture sight, housing structure and infrastucture, with concerning on a good developing city policy to growing of Ama Ory and Passo Village.*
- *Relocation policy at Ama Ory Sub Village provide 336 housing and building units, and relocation at Agro Valley Sub Village provide 300 housing and building units. It was to fulfill of refuge or victim social crush needed for 16.311 housing and building units, at Ambon City.*
- *Relocated area need social, economic, culture, policy and secure accessibility.*
- *From summary above, recommended that :*
- *Continuing Policy to Ama Ory Sub Village derived as farming housing with advance on structure and infrastucture, and use the formed society institutions as potential and district growing.*
- *Relocation on Agro Valley Sub Village needed transportation and education stucture and infrastucture.*
- *Coordination consistency, Synchronize and uniting policy implementation on central level, district and field level determining the success of policy progress.*
- *Further studying wish to done at certain periods on future to live developing study of housing neighborhoods and this regions, till could determining the detail of housing neighborhoods and this regions.*

## **BAB. I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kerusuhan sosial yang terjadi 19 Januari 1999 memberikan dampak negatif yang luas terhadap Propinsi Maluku dengan kerusakan Sistem Prasarana dan Sarana, Sistem Perekonomian, Sistem Keamanan, Sistem Sosial Budaya, Perumahan dan Permukiman dan Kondisi Psikologis masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial, masyarakat di wilayah kerusuhan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengungsi di Provinsi Maluku berjumlah 332.548 jiwa dan di Kota Ambon berjumlah 29.613 Kepala Keluarga atau 145.328 jiwa. Jumlah perumahan dan permukiman yang rusak di Provinsi Maluku berjumlah 52.714 bangunan. Prasarana dan sarana pendukung permukiman yang rusak di Provinsi Maluku berjumlah 1.086 unit. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut perhitungan atas dasar harga konstan selama kerusuhan sosial adalah sebesar – 29,11 % pada tahun 1999, pada tahun 1998.

Untuk menangani masalah kerusuhan sosial secara nasional telah dibentuk BAKORNAS, Wakil Presiden (Megawati Soekarnoputri) sebagai ketua, pada tingkat daerah di Maluku dibentuk SATKORLAK diketuai oleh Gubernur dan dalam rangka penanganan masalah kerusuhan sosial telah ditempuh pertemuan/perjanjian Malino II pada intinya mengusahakan suatu penyelesaian proporsional terhadap masalah kerusuhan sosial.

Permasalahan kerusuhan sosial perlu penanganan yang komprehensif karena berdampak pada sebahagian besar wilayah Propinsi Maluku dan secara Nasional serta mendapat perhatian Internasional. Penanganan masalah kerusuhan sosial merupakan pengejawantahan dari Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang Undang Dasar

tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ Tahun 1999, Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman, dan Konvensi Habitat II. Dan ini menyangkut kebutuhan dari suatu masyarakat yaitu dari hukum/hak kepemilikan, segi sosial ekonomi/pendapatan, sosial budaya/sistem nilai dan psikologis/rasa aman yang terganggu akibat konflik/kerusakan, dengan demikian perlu ditangani untuk mendukung keseluruhan masalah pembangunan di Maluku, sehingga masyarakatnya dapat ikut serta berperan secara aktif dalam proses pembangunan.

Perumahan dan permukiman merupakan salahsatu masalah kerusakan sosial yang diupayakan dengan kebijakan dan strategi sesuai kondisi wilayah yang mengalami kerusakan. Dalam penanganan masalah perumahan dan permukiman yang terkait dengan kerusakan sosial, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menempuh kebijakan, mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat dengan strategi, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah yang meliputi : penanganan tanggap darurat, rekonstruksi / rehabilitasi prasarana dan sarana fisik perumahan dan permukiman, dan permukiman kembali masyarakat yang mengalami kerusakan sosial di tempat asal.

Strategi lain yang ditempuh bila ketiga strategi tersebut tidak dapat diupayakan adalah relokasi sebagai pilihan terakhir yang dapat dilaksanakan secara sisipan maupun terkonsentrasi di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Penanganan masalah permukiman di Propinsi Maluku dilaksanakan meliputi pendekatan penanganan tanggap

darurat dengan penyediaan barak pengungsian di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara, rehabilitasi / rekonstruksi prasarana dan sarana fisik perumahan dan permukiman yang pelaksanaannya di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Buru, permukiman kembali masyarakat yang mengalami kerusakan sosial di tempat asal, pelaksanaannya di Kota Ambon dan Kabupaten Buru, relokasi pelaksanaannya di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Relokasi di Propinsi Maluku dilaksanakan sebagai alternatif dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman penduduk merupakan pilihan terakhir oleh karena situasi dan kondisi keamanan yang tidak memungkinkan sehingga menyebabkan terjadinya segregasi wilayah secara komunitas. Jumlah perumahan yang direlokasi dalam penanganan masalah permukiman di Propinsi Maluku yang terkonsentrasi di wilayah Kota Ambon dan wilayah Kabupaten Maluku Tengah adalah sebanyak 2667 unit rumah yang dilaksanakan pada tahun 1999 sampaidengan tahun 2002. Pembiayaan pelaksanaan program penanganan permukiman bersumber dari pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan relokasi dipilih dengan pertimbangan untuk melihat dampak kebijakan ini terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusakan sosial, dampak lokasi relokasi terhadap wilayah sekitar dan dampak relokasi terhadap Kota. Judul yang dipilih yang terkait dengan pertimbangan tersebut, yaitu Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasca Kerusakan Sosial Di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu masalah yang diakibatkan oleh kerusakan sosial yang terjadi di Kota Ambon. Relokasi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial merupakan alternatif terakhir yang dipilih sebagai

konsekwensi dari perkembangan situasi dan kondisi keamanan yang menyebabkan segregasi wilayah secara komunitas. Penanganan masalah ini dilaksanakan secara sisipan dan terkonsentrasi di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Desa Passo didalam kebijakan spasial Kota Ambon tahun 1993/1994 merupakan salahsatu sub wilayah pengembangan dengan prioritas pengembangan sebagai kawasan industri, permukiman, pendidikan dan perikanan dipilih sebagai lokasi relokasi. Penanganan relokasi telah dilakukan sejak tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2002 di Kota Ambon berjumlah 1881 rumah dengan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dusun Benteng Karang salah satu dusun / desa yang mengalami relokasi didalam kerusuhan sosial. Secara administrasi dusun ini termasuk didalam binaan Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebahagian besar pekerjaan penduduk sebagai petani. Dalam penanganan tanggap darurat penduduk desa ditempatkan pada kompleks militer / Rindam di Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang kemudian bermukim di Dusun Ama Ory, Desa Passo sebagai tempat bermukimnya yang baru.

Untuk melihat hasil dari pelaksanaan penanganan permukiman ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- Apakah relokasi memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial ?.
- Apakah relokasi memberikan dukungan terhadap perkembangan wilayah Desa Passo, Kecamatan Baguala ?

Pertanyaan penelitian dalam relokasi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial pasca kerusuhan sosial, yaitu :

Bagaimana pengaruh relokasi Desa Benteng Karang, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ke Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dalam program penanganan permukiman terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Desa Benteng Karang yang mengalami kerusuhan sosial dan Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala ?

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak pada relokasi akibat kerusuhan sosial terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial serta pengaruhnya terhadap Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

#### **1.3.1. Sasaran Penelitian.**

Sasaran dari Penelitian ini adalah :

- Mengkaji dampak pelaksanaan program relokasi pasca kerusuhan sosial terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan fisik.
- Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kebijakan relokasi pasca kerusuhan sosial pada pelaksanaan kebijakan.

### **1.4. Ruang Lingkup Studi**

Studi ini akan membahas proses implementasi kebijakan relokasi dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Ambon, sehingga kebijakan ini dilaksanakan, implementasi kebijakan perumahan dan permukiman secara umum, kondisi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial pada saat kerusuhan sosial, dampak kebijakan relokasi terhadap masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

#### 1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial studi ini, meliputi :

- Kajian dampak kebijakan relokasi terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.
- Kajian dampak kebijakan relokasi terhadap masyarakat Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kota Ambon.
- Kajian terhadap perkembangan wilayah Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- Kajian terhadap kebijakan sebagai faktor penyebab kinerja kebijakan dan produk kebijakan.
- Kajian terhadap pelaksanaan program relokasi penanganan permukiman selama kerusuhan sosial dan pasca kerusuhan sosial.
- Identifikasi masalah-masalah permukiman selama kerusuhan sosial dan pasca kerusuhan sosial.
- Kajian terhadap kecenderungan pemanfaatan guna lahan selama dan pasca kerusuhan sosial.

#### 1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah / Spasial

Ruang lingkup wilayah / spasial studi meliputi :

- Dusun Ama Ory.
- Desa Passo.
- Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- Kota Ambon.
- Propinsi Maluku.

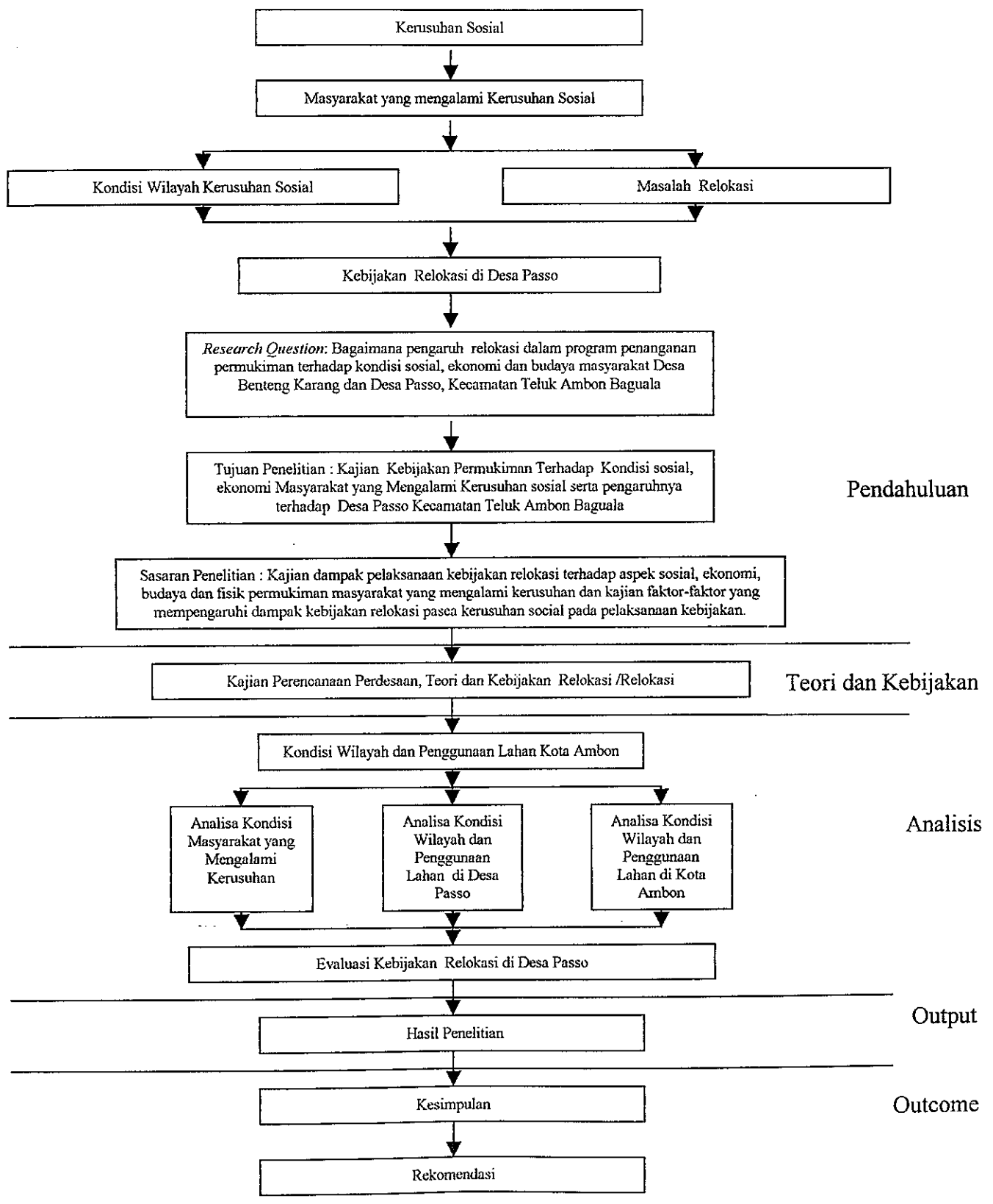
### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh Thobias A. Mesakh di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul “ Kebijakan Permukiman Kembali Pengungsi Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste (Studi Kasus : Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur)”, perbedaan mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada, penelitian terdahulu mengajukan dampak kebijakan sedangkan penelitian ini merupakan evaluasi implementasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dengan lokasi penelitian di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon sehingga penelitian ini dapat dikategorikan penelitian *original*.



## 1.6. Kerangka Pemikiran

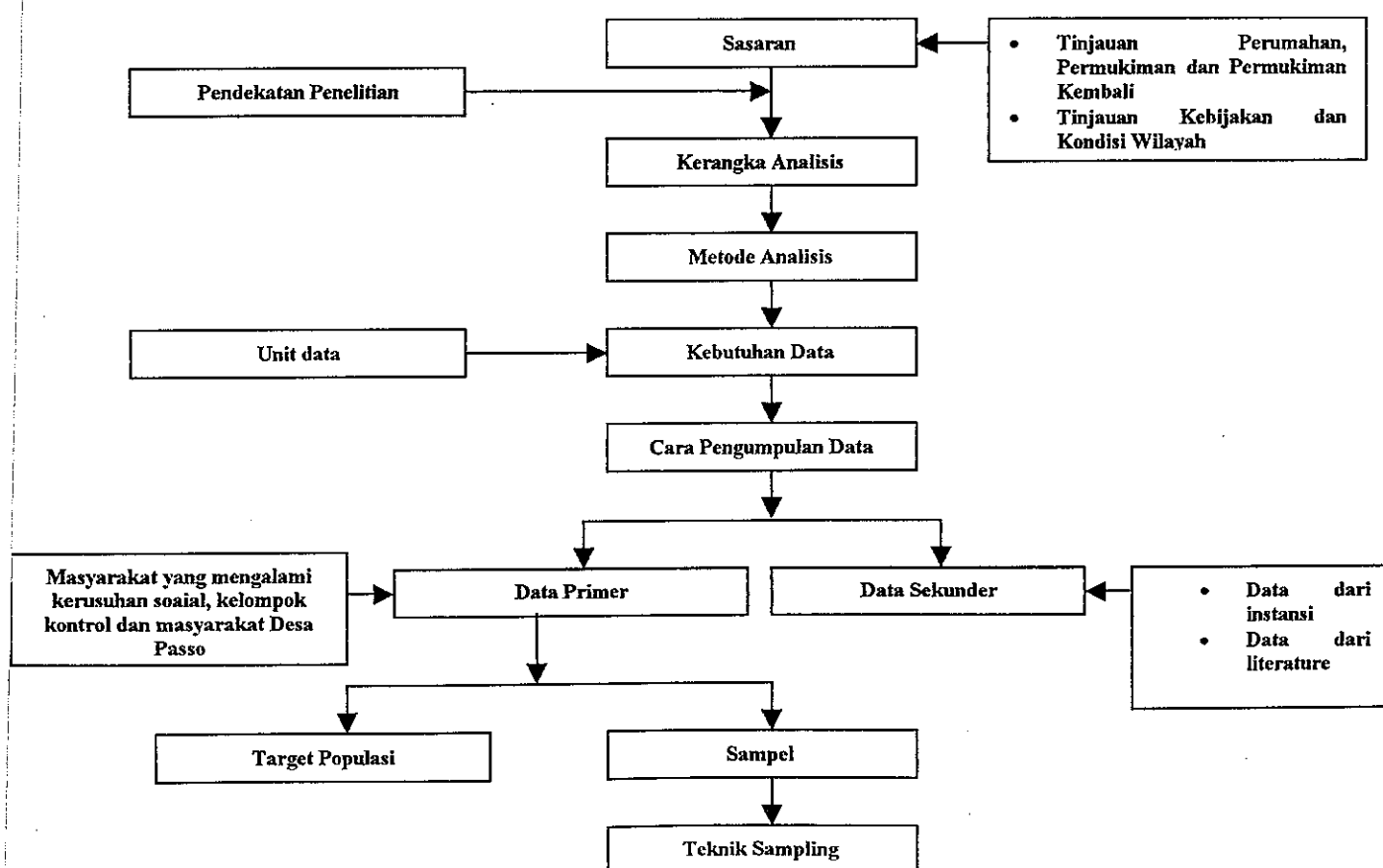
**GAMBAR.I.1. KERANGKA PEMIKIRAN EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA KERUSUHAN SOSIAL DI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON**



### 1.7. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan mengevaluasi permukiman kembali di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, evaluasi relokasi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial meliputi persepsi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial terhadap lokasi, perumahan yang berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusakan sosial, masyarakat lokal yang tinggal di Desa Passo terhadap keberadaan relokasi dan kinerja dari pelaksanaan kebijakan ini yang diharapkan dapat menjadi suatu acuan pendekatan dalam menangani masalah-masalah sejenis. Kerangka untuk melaksanakan penelitian ini seperti pada gambar.I.2., berikut :

**GAMBAR.I.2. KERANGKA PENDEKATAN PENELITIAN**



Penelitian ini bersifat penelitian survai dengan mengacu pada pendapat Singarimbun (1984 : 1), dimana penelitian survai merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel sebagai data yang mewakili populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. Penelitian survai disini dilakukan dengan maksud evaluasi terhadap kebijakan Relokasi Pasca Kerusuhan Sosial di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala sehingga dapat ditemukan hubungan antara faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan relokasi dan indikator kebijakan relokasi.

#### 1.7.1. Desain Studi Evaluasi

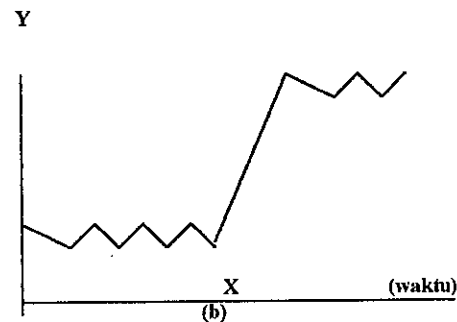
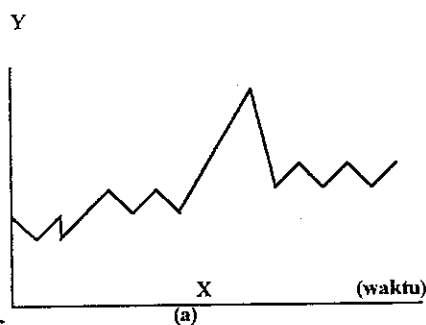
Wibawa et al 1994 : 73 , mengatakan evaluasi kebijakan bersifat deskriptif dan sekaligus analitis, yaitu pendeskripsian suatu kejadian dan penjelasan tentang penyebab kejadian atau secara sederhana merupakan pendeskripsian suatu kejadian dan penjelasan tentang penyebab kejadian atau merupakan pengamatan tentang keberlangsungan sebelum dan sesudah kebijakan diimplementasikan. Finsterbusch dan Motz (1980; 140-141) dalam Wibawa et al (1994; 75-76) mengklasifikasikan 4 (empat) jenis evaluasi berdasarkan keakuratan kesimpulan yang dihasilkan, yaitu :

- a. *Evaluasi single program after-only*, merupakan penilaian keadaan kelompok sasaran terhadap hasil program, yang merupakan penelitian tahapan paling awal tingkatannya. Evaluator tidak mengetahui baik buruknya respon kelompok sasaran terhadap program dan tidak mengetahui kondisi awal kelompok sasaran dan penyebab perbaikan kondisi kelompok sasaran tersebut.
- b. *Evaluasi single program before-after*, merupakan penilaian terhadap perubahan kondisi kelompok sasaran program.

- c. Evaluasi *comparative after-only*, merupakan penilaian terhadap perubahan kondisi dan perubahan kondisi kelompok sasaran dibandingkan dengan kelompok kontrol setelah pelaksanaan program. Seperti pada gambar.I.3., berikut :

**GAMBAR.I.3. ANALISIS ANTAR-WAKTU SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM**

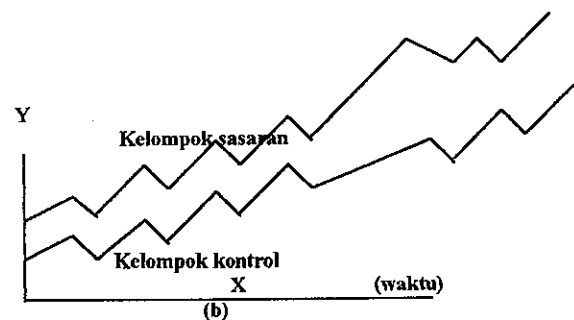
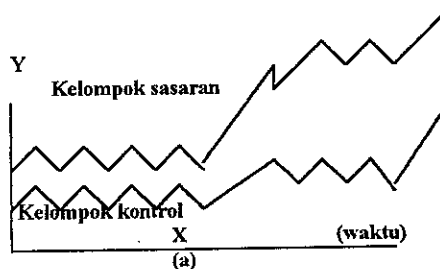
- (a) Program berubah ditengah jalan  
(b) Program permanen



- d. Evaluasi *comparative before-after*, merupakan penilaian efek program terhadap kelompok sasaran yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Antara lain seperti pada gambar.I.4., berikut :

**GAMBAR.I.4. ANALISIS ANTAR-WAKTU SEBELUM DAN SESUDAH PROGRAM**

- (a) dan (b) Program dengan kelompok pembanding



Perbandingan keempat studi evaluasi ini seperti pada tabel.I.1., berikut :

TABEL. I.1. JENIS STUDI EVALUASI

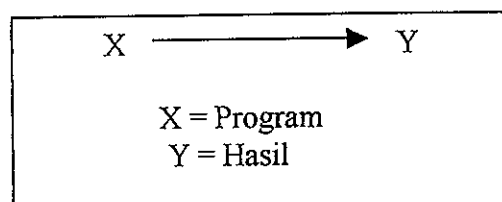
No.	Jenis Evaluasi	Pengukuran kondisi			Informasi yang Diperoleh
		Kelompok Sasaran Sebelum	Kelompok Sasaran Sesudah	Kelompok Kontrol	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Single program after-only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
2.	<i>Single program before-after</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
3.	<i>Comparative after-only</i>	Tidak ada	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol
4.	<i>Comparative before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek terhadap kelompok sasaran

Sumber : Evaluasi Kebijakan Publik, Samodra Wibawa et al (1994; 74)

Pada studi evaluasi yang dilaksanakan merupakan evaluasi *comparative after-only*.

#### 1.7.2. Permodelan

Kebijakan; program/proyek merupakan variable bebas (X) sedangkan hasil atau *Outcome* dari program tersebut merupakan variabel terikat (Y), seperti gambar.I.5., berikut :



GAMBAR. I.5. MODEL KETERKAITAN KEBIJAKAN DAN HASIL ATAU *OUTCOME*

Riset eksperimental merupakan desain ideal bagi riset evaluasi dimana yang dikaji kelompok sasaran program dan kelompok kontrol yang dideskripsikan oleh Samodra Wibawa et al (1994; 81), seperti pada tabel.I.2., berikut :

TABEL. 1.2. DESKRIPSI DESAIN EKSPERIMENTAL

No.	Kelompok Kajian dan Hasil Program	Pengukuran Sebelum Program	Pengukuran Sesudah Program	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelompok Eksperimen	a	b	b - a
2.	Kelompok Kontrol	c	d	d - c
3.	Hasil Program = (b - a) - (d - c) atau $\frac{b-a}{a} - \frac{d-c}{c}$			

Sumber : Evaluasi Kebijakan Publik, Samodra Wibawa et al, (1994:81)

Didalam penelitian non-eksperimental / non-laboratori evaluator sedapat mungkin membuat kelompok eksperimen / kelompok sasaran dan kelompok kontrol dengan karakteristik kesamaan (pasangan) demografi dan sosial ekonomi (pekerjaan) maupun aspek psikologis seperti motivasi. Dari kedua kelompok ini evaluator mengkaji pengaruh variabel bebas dan variabel terikat dengan cara komparasi yang memberikan penjelasan seimbang yang lebih bersifat persuasif dibandingkan konklusif.

### 1.7.3. Beberapa Penyimpangan Dalam Penelitian Evaluasi

Didalam penelitian evaluasi oleh Weiss dalam Shafrits yang dikutip oleh Wibawa et al dijelaskan bahwa perbedaan pendekatan yang dihasilkan dari perbandingan kedua kelompok bukan didasarkan pada tujuan atau hasil program, yang dapat diidentifikasi meliputi masalah-masalah antara lain :

- Komunikasi antara kelompok sasaran dan kontrol, yaitu efektifitas dan efisien program yang akurat dalam penelitian evaluasi terkadang sulit diperoleh bila
- penelitian tidak bersifat eksperimental yang disebabkan oleh adanya komunikasi dari kedua kelompok sehingga mempengaruhi hasil kajian dalam kondisi normal/eksperimental.
- Kondisi *double blind*, yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan fungsi dan tugas dari masing-masing *stake holder* yang berkepentingan; pelaksana program dan evaluator dalam hal penilaian tujuan/hasil yang dicapai dari

pelaksanaan program. Evaluator cenderung melihat hasil dari kontekstual permasalahan, pelaksana cenderung terbatas pada target program/kegiatan.

- d. Instrumen penelitian, yaitu penyimpangan yang terjadi persepsi sasaran program terhadap instrumen penelitian yang diajukan.

Solusi terhadap masalah ini diselesaikan kasus per kasus, hasil penelitian; hasil diskusi dengan pelaksana program akan sangat menentukan jenis solusinya.

### **1.8. Kebutuhan Data**

Untuk melaksanakan analisis yang sesuai tujuan dan sasaran studi ini membutuhkan data-data sebagai berikut :

- Data Primer, yang terdiri dari data yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial di Dusun Benteng Karang persepsi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan masyarakat Desa Passo terhadap lokasi relokasi dan faktor-faktor yang berkaitan dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya.
- Data Sekunder, terdiri dari data yang berkaitan dengan gambaran umum wilayah studi, data kependudukan, data potensi wilayah data fisik perumahan dan sarana pendukungnya, data lokasi relokasi, data interkoneksi dengan wilayah sekitarnya, data dokumen kebijakan, program-program dan data-data yang berhubungan dengan relokasi di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang mendukung penelitian ini.

Data-data yang dibutuhkan dirinci seperti pada tabel.I.3., berikut :

TABEL. I.3. KEBUTUHAN DATA

No.	Aspek yang Ditinjau	Kebutuhan Data	Unit Data	Time Series	Jenis Data	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Karakteristik Wilayah Studi	Kondisi Fisik : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Guna Lahan</li> <li>• Jumlah Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</li> </ul> Kondisi Sosial : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah masyarakat relokasi</li> <li>• Komposisi penduduk</li> </ul> Kondisi Ekonomi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas perekonomian</li> </ul> Kondisi Budaya : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga adat</li> </ul>	RST Propinsi Maluku  RTR Kota Ambon  Program Permukiman  Kota Ambon Dalam Angka  Kecamatan Teluk Ambon Baguala Dalam Angka  Data Desa  Data Dusun	2001-2005  1993/1994  1999-2003  2000  2001  2004  2004	Data Sekunder dan Data Primer	Pemerintah Kota Ambon, Dinas Sosial Kota Ambon, Kimpraswil Propinsi Maluku, Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Pemerintah Desa Passo, Pemerintah Dusun Ama Ory, Observasi
2.	Perkembangan wilayah di sekitar lokasi relokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan guna lahan</li> <li>• Jumlah penduduk</li> <li>• Jarak antar Desa</li> <li>• Kondisi fasilitas sosial dan fasilitas umum</li> <li>• Kondisi transportasi</li> </ul>	Konsep RTRW Kota Ambon  RTR Kota Ambon  Kecamatan Teluk Ambon Baguala Dalam Angka  Lokasi  Site Plan	2003 – 2013  1993/1994  2001  2004  2000-2003	Data Sekunder dan Data Primer	Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa Kimpraswil Propinsi dan Observasi
3.	Mengevaluasi permukiman kembali	Data Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman  Data Kebijakan dan Strategi Penanganan Perumahan dan Permukiman Pemerintah Propinsi Maluku  Persepsi Kelompok Sasaran  Persepsi Masyarakat Desa Passo  Persepsi Kelompok Kontrol	Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman  Pelaksanaan Program relokasi  Tanggapan Kelompok Sasaran, kelompok kontrol dan Masyarakat Desa Passo	2000-2004  2000 – 2002  2004	Data Sekunder dan Data Primer	Departemen Kimpraswil, Pemerintah Propinsi Maluku dan Kota Ambon Kimpraswil Propinsi, Masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial, kelompok kontrol dan masyarakat Desa Passo Observasi

### 1.9. Cara Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan dan sasaran studi ini, maka data-data yang dibutuhkan, sebagai berikut :



### 1.9.1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan menggunakan kuisisioner, wawancara dan observasi, kemudian hasilnya diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi silang berdasarkan pengelompokan data. Teknik kuisisioner dan wawancara meliputi antara lain :

- Penggunaan kuisisioner yang diajukan kepada responden, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Sebagai sampel adalah masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial / kelompok sasaran di lokasi relokasi.
- Wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini digunakan secara simultan sebagai cara untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dengan data sekunder / studi literatur atau menanyakan hal yang belum jelas tentang konteks permasalahan.

Wawancara diarahkan pada kelompok responden aktif,

- Kelompok responden aktif, yang merupakan responden sekaligus aktor yang merasakan langsung dampak dari lokasi relokasi, kelompok ini terdiri dari Pemerintah Propinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Pemerintah Desa Passo, masyarakat yang mengalami kerusuhan dan masyarakat Desa Passo.

Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan wawancara kepada kelompok responden aktif, yaitu :

- Pemerintah Propinsi Maluku dan Kota Ambon
  - Sebagai pengambil keputusan kebijakan dan pembuat program pada instansi terkait kebijakan relokasi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.

- Memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.
- Terlibat langsung dalam proses relokasi.
- Masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial
  - menjadi koordinator bagi pengungsi
  - Dapat mewakili masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.
  - Menguasai pelaksanaan kebijakan perumahan dan permukiman dari tahun 2000-2002
- Masyarakat Desa Passo
  - Menjadi tokoh didalam masyarakat Desa Passo
  - Dapat mewakili masyarakat Desa Passo
  - Menguasai pelaksanaan kebijakan perumahan dan permukiman dari tahun 1999-2003

#### 1.9.2. Data Sekunder

Data sekunder dipilih hanya pada data tertentu sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar berdasarkan pengelompokan data yang diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi, studi literatur, dan lainnya yang terkait dalam program relokasi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.

#### 1.9.3. Teknik *Sampling*

*Sampling* adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh artinya tidak mencakup seluruh obyek yang dijadikan sebagai obyek penelitian akan tetapi hanya sebagian saja dari jumlah populasi yang dianggap mewakili keseluruhan jumlah populasi.

Penelitian melalui sampel, yaitu penelitian yang mengambil sampel dimana datanya dikumpulkan dengan kuisioner, atas populasi sebagai bagian penelitian survai (Singarimbun 1989 : 1).

Penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus :

$$n = N Z^2 S^2 / N d^2 + Z^2 S^2 \quad (1)$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

Z : Tingkat Kepercayaan

S : Ragam Populasi

d : Besarnya toleransi penyimpangan

Pengambilan sampel responden relokasi dilakukan dengan *simple random sampling* dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama sebagai sampel, dalam hal ini *sampling* dilakukan menurut pembagian jumlah populasi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial, kelompok kontrol dan jumlah masyarakat Desa Passo dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Populasi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial = 336 KK .
- Jumlah sampel masyarakat yang mengalami kerusakan sosial adalah = 56 sampel.
- Jumlah kelompok kontrol berjumlah 25 % dari sampel masyarakat yang mengalami kerusakan sosial = 14 KK
- Jumlah populasi masyarakat Desa Passo 2.245 KK
- Jumlah Sampel masyarakat Desa Passo adalah = 66 sampel.

### 1.10. Metode Analisis

Analisis merupakan penjelasan data untuk lebih dimengerti dan dipahami (Singarimbun 1989 : 263 – 264), dalam penelitian ini menggunakan alat bantu angka, seperti tabel, grafik, prosentase, termasuk mendeskripsikan gejala-gejala yang diperoleh dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian meliputi teknik analisis deskriptif dan teknik analisis tabulasi silang (*cross tabulation*)

Beberapa Variabel penelitian yang diuraikan dalam Bab. II. Digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Variabel penelitian tersebut menjadi *input* pada tahap analisis selanjutnya. Variabel tersebut sebagai berikut :

- Variabel kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman; relokasi.
- Variabel sosial, ekonomi dan budaya berhubungan dengan keterkaitan antara lokasi relokasi dengan latar belakang sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusakan dan hubungan timbal-balik terhadap masyarakat Desa Passo.
- Variabel perumahan dan permukiman menyangkut aspek fisik yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas; perumahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

### 1.11. Kerangka Analisis (*Analysis Framework*)

Proses analisis yang dilakukan dalam studi ini terdiri dari input, proses dan output. Beberapa analisis yang akan dilakukan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari :

- Analisis penanganan masyarakat yang mengalami kerusakan sosial di Kota Ambon, analisis ini bertujuan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang mengalami kerusakan sosial yang telah tertangani dan belum tertangani oleh kebijakan penanganan pengungsi.

- Analisis wilayah studi berupa analisis karakteristik fisik dan non-fisik kawasan relokasi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial di Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala, analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lokasi relokasi ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek pelayanan fasilitas, serta fisik kawasan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.
- Analisis dampak perkembangan wilayah disekitar lokasi relokasi, Desa Passo Kecamatan Teluk Ambon Baguala, analisis ini untuk mengetahui aspek-aspek yang mendukung perkembangan wilayah relokasi di Desa Passo dan hubungan timbal-balik dengan wilayah sekitarnya, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kota Ambon meliputi, antara lain :
  - Aspek fisik; kelengkapan fasilitas, guna lahan (pola dan struktur ruang kawasan) dengan analisis deskriptif.
  - Aspek sosial, ekonomi dan budaya; latar belakang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan masyarakat disekitar lokasi, Desa Passo dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dengan analisis deskriptif .
  - Mengevaluasi relokasi masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial di Desa Passo yang bertujuan untuk mengetahui dampak program perumahan dan permukiman terhadap masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan masyarakat di Desa Passo dan mengevaluasi pelaksanaannya dengan membandingkan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial sebelum dan sesudah pelaksanaan program ini.

Adapun proses/ tahapan penelitian sebagaimana tabel.I.4., berikut :

TABEL.I.4. PROSES/TAHAPAN PENELITIAN

Input (1)	Analisis (2)	OutPut (3)
<p>Data jumlah dan jenis penanganan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial</p> <p>Struktur Penduduk</p>	Analisis Deskriptif	Mengetahui jumlah masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial yang telah tertangani dan belum tertangani oleh kebijakan penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial
<p>Kedudukan Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Desa Passo dalam RTRK Kota Ambon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Jumlah dan Persebaran Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</li> <li>Data Jarak antar Desa di sekitar Desa Passo</li> <li>Data Fisik, Sosial, Ekonomi dan Budaya</li> </ul>	Analisis Deskriptif	Mengetahui Karakteristik Lokasi Relokasi; Land Use dan Aksesibilitas.
<p>Kelompok Sasaran, Kelompok Kontrol dan Masyarakat Desa Passo</p>	Cross Tabulation	Mengetahui Tanggapan Kelompok Sasaran, Kelompok Kontrol terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi, sosial budaya dan kinerja pelaksana program dan Masyarakat Desa Passo Tentang Keberadaan relokasi
<p>Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman</li> <li>Kebijakan Penanganan Pengungsi oleh Pemerintah Daerah</li> </ul>	Analisis Deskriptif	<p>Mengetahui apakah program relokasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan masyarakat Desa Passo</p> <p>Mengetahui implementasi program apakah sesuai dengan Kriteria kebijakan relokasi</p>
Input	Analisis Evaluasi Kebijakan Relokasi di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon	Kesimpulan dan Rekomendasi Relokasi

### 1.12. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (Lima) bab, yang berisi sebagai berikut :

Bab. I, Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang tentang masalah-masalah akibat kerusakan sosial dan masalah relokasi yang dijadikan topik dalam studi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup substansial studi dan ruang lingkup wilayah studi, keaslian penelitian, kerangka pemikiran pendekatan penelitian, kebutuhan data, cara pengumpulan data, metoda analisis, kerangka analisis dan sistematika penulisan yang merupakan alur pemikiran untuk membahas masalah yang dijadikan topik.

Bab. II, Tinjauan Perumahan, Permukiman, Wilayah Perdesaan, Permukiman Kembali dan Evaluasi Kebijakan Publik, bab ini berisikan tinjauan dari studi literatur tentang perumahan, permukiman, wilayah perdesaan, permukiman kembali dan evaluasi kebijakan publik. Rangkuman dari studi tersebut yang dirangkum dalam kriteria evaluasi kebijakan.

Bab. III, Tinjauan Kebijakan dan Kondisi Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, bab ini berisikan tinjauan tentang kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman yang menguraikan hakekat perumahan, kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman dan kegiatan kebijakan, kebijakan dan strategi pemerintah Propinsi Maluku dalam menangani pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial, kondisi wilayah Kota Ambon sebelum kerusakan sosial yang menguraikan kondisi fisik wilayah, penggunaan lahan kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial budaya, perekonomian, transportasi kota, perumahan dan permukiman, fasilitas umum dan sarana perekonomian, kondisi wilayah Kota Ambon dalam kerusakan sosial yang menguraikan kondisi guna lahan, kependudukan, sosial

budaya, perekonomian, transportasi, perumahan dan permukiman, fasilitas pendukung permukiman, sarana perekonomian dan kendala-kendala dalam kerusuhan sosial untuk implementasi kebijakan perumahan dan permukiman, implementasi kebijakan perumahan dan permukiman di Kota Ambon yang menguraikan permasalahan perumahan dan permukiman, pola penanganan, kondisi Dusun Benteng Karang yang direlokasi, pelaksanaan kebijakan relokasi di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala .

Bab. IV, Analisis Proses Relokasi, bab ini tentang pembahasan hasil penelitian yang meliputi, analisis kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran), Desa Passo, relokasi di Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol), Desa Passo dan kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran), Desa Passo dan relokasi di Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol), Desa Passo.

Bab. V, Penutup, bab ini tentang kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian.



## **BAB. II.**

### **TINJAUAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, WILAYAH PERDESAAN, PERMUKIMAN KEMBALI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.**

Rumah merupakan salahsatu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi antara lain secara fisik sebagai pelindung terhadap pengaruh alam yang merugikan, secara non fisik yang menyangkut segi sosial ekonomi sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi yang mendukung kehidupan dan penghidupan, menyangkut segi sosial budaya sebagai tempat untuk membina keluarga; membina pendidikan, pembentukan nilai-nilai, pembelajaran lingkungan, perwujudan jati diri dan hal yang berhubungan dengan fungsi rumah lainnya.

#### **2.1. Tinjauan Perumahan dan Permukiman**

##### **2.1.1. Pengertian Perumahan dan Permukiman.**

Beberapa pengertian tentang perumahan dan permukiman, sebagai berikut :

Menurut Messakh (2003 : 77) , yang mengutip Turner dalam Panudju (1999) fungsi utama yang terkandung dalam sebuah tempat bermukim dapat diidentifikasi, meliputi antara lain :

- a. Rumah sebagai pendukung rasa aman; terjaminnya keluarga di masa depan setelah memiliki rumah, jaminan atas lingkungan perumahan yang didiami dan jaminan kepemilikan rumah dan lahan (*the form of tenure*).
- b. Rumah sebagai pendukung keluarga untuk berkembang (*opportunity*) dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga.
- c. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga (*identity*); kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.

Menurut Messakh (2003 : 71-72) , yang mengutip Sumaatmaja (1998), ciri-ciri hakiki yang mengidentifikasi perumahan, meliputi antara lain :

- a. Rumah memberikan rasa aman.
- b. Rumah memberikan ketenangan hidup.
- c. Rumah memberikan kemesraan dan kehangatan hidup.
- d. Rumah memberikan kebebasan.

Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2000), hakekat perumahan dan permukiman, meliputi antara lain :

- a. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang.
- b. Rumah merupakan barang modal bagi kebanyakan masyarakat.
- c. Rumah merupakan pendorong kegiatan sosial ekonomi.

Ketiga pengertian ini memberikan kesimpulan bahwa rumah dan perumahan merupakan kebutuhan dasar yang struktural sifatnya. Dalam perwujudannya, prioritas kebutuhan rumah terkait dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

#### 2.1.2. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Permukiman.

Menurut Mesakh (2003 : 76) , yang mengutip Chapin (1979), fungsi-fungsi yang dibutuhkan sebagai lingkungan tempat tinggal, meliputi antara lain :

- Memenuhi fungsi tempat bernaung / berlingdung; aspek perencanaan kawasan dan pelayanan.
- Memenuhi fungsi keamanan; aspek lokasi terhadap akses keamanan (fisik dan psikis).
- Memenuhi fungsi membina keluarga; aspek prasarana dan sarana.
- Memenuhi fungsi aksesibilitas; aspek aksesibilitas.
- Memenuhi fungsi efisiensi; aspek ekonomis.
- Memenuhi fungsi simbolik; aspek nilai lingkungan.

Menurut Mesakh, (2003 : 71) , yang mengutip Sumaatmadja (1998 : 23), pemilihan lokasi untuk pengembangan permukiman, meliputi antara lain :

- Fisik alamiah; untuk perluasan dan bentuk permukiman.
- Sosial; Lingkungan sekitar yang dapat mendukung kondisi sosial permukiman.
- Budaya; Kebudayaan masyarakat sekitar yang akan berakulturasi dengan permukiman.
- Ekonomi; harga lahan, strata sosial dan transportasi.
- Politis; Stabilitas pemerintahan dan konsistensi implementasi kebijakan.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, (1987 : 18-71), pedoman perencanaan lingkungan permukiman kota, prasarana dan sarana yang dimiliki pada lingkungan perumahan meliputi :

- Prasarana; air bersih, listrik, pembuangan air hujan dan air kotor, jalan lingkungan dan pembuangan sampah.
- Sarana; pendidikan (mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum), kesehatan (antara lain, Balai Pengobatan, Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin, praktek dokter dan apotek), peribadatan, perniagaan dan industri, pemerintahan dan pelayanan umum, kebudayaan dan rekreasi, dan olahraga dan taman.

Kesimpulan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi permukiman :

- Aksesibilitas; segi sosial, segi ekonomi, segi budaya, segi kebijakan dan segi keamanan.
- Tersedia ruang dan lahan untuk pengembangan.
- Tersedia prasarana dan sarana.
- Fisik alam yang mendukung bentuk permukiman.
- Kondisi lingkungan yang mendukung.

### 2.1.3. Kriteria Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menurut Umbara (2003) yang mengutip Turner, kriteria perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi antara lain :

- Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat-tempat yang dapat memberikan pekerjaan.
- Memiliki status kepemilikan lahan dan rumah.
- Bentuk dan kualitas bangunan yang memenuhi standar.
- Harga rumah yang dapat terjangkau oleh pendapatan.

Secara konseptual dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, sebagai berikut :

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

## 2.2. Tinjauan Wilayah Perdesaan

### 2.2.1. Wilayah Perdesaan

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat dalam Jayadinata, (1999 : 59), wilayah perdesaan memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :

- Perbandingan tanah dan manusia ( *man land ratio* ) yang besar.
- Lapangan kerja agraris.
- Hubungan penduduk akrab.
- Sifat yang menurut tradisi ( *traditional* ).
- Mempunyai pemerintahan sendiri, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

### 2.2.2. Penggunaan Tanah Perdesaan

Penggunaan tanah di wilayah perdesaan menurut Jayadinata (1999 : 59) adalah sebagai berikut :

- Untuk kegiatan sosial

Kegiatan sosial, meliputi antara lain; berkeluarga, bersekolah, beribadah, berekreasi, berolahraga dan sejenisnya.

- Untuk kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi, meliputi antara lain; bertani, berkebun, beternak, perikanan darat/empang, menebang kayu di hutan dan sejenisnya.

### 2.2.3. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Ekonomi di Desa

Penggunaan tanah untuk kegiatan ekonomi di Desa menurut Jayadinata (1999 : 67-72), adalah sebagai berikut :

- Pertanian primitif

Pertanian primitif, terbagi 2 ( Dua ) :

- Pertanian berpindah

Pertanian berpindah adalah cara bertani dengan berpindah-pindah (*Shifting Cultivation*) / perladangan bakar. Untuk menjaga kelestarian tanah dengan cara bertani seperti ini, dapat dilakukan dengan persyaratan; tanah masih luas, penduduk masih jarang ( 1-10 orang/km<sup>2</sup> ) dan pemilikan tanah secara bersama / milik desa.

- Pertanian primitif

Pertanian primitif adalah pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana dalam pengerjaannya.

- Pertanian maju

Pertanian maju adalah pertanian yang dilakukan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*subistence*) tetapi juga sebagai kegiatan ekonomi dan cara melaksanakan pertanian telah modern (pengairan, penyiangan, penumpasan hama, pencegahan kikisan dan kegiatan sejenisnya) serta menggunakan peralatan yang modern (cangkul, bajak, traktor kecil dan sejenisnya).

#### 2.2.4. Perencanaan Perdesaan

##### 2.2.4.1. Pengertian Perencanaan Perdesaan

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, pembangunan masyarakat desa adalah metode dalam menyelenggarakan usaha-usaha yang hasilnya dinikmati oleh penduduk secara langsung umum, relatif merata dan meningkat yang didalam prosesnya masyarakat setempat berkedudukan sebagai subjek pembangunan dan pemerintah memberikan pengarah, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan penggairahan. Jadi dapat disimpulkan perencanaan perdesaan adalah usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengarah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

##### 2.2.4.2. Model Perkampungan Terencana

Model-model perkampungan terencana adalah sebagai berikut :

- Orientasi perencanaan kampung

Orientasi perencanaan kampung menurut Jayadinata (1999 : 107), meliputi :

- Aspek kehidupan sosial

Ditinjau dari aspek kehidupan sosial, umumnya manusia ingin bertetangga dan hidup bergotong-royong / orientasi sosial.

- Aspek kehidupan ekonomi

Ditinjau dari aspek kehidupan ekonomi, umumnya manusia ingin tinggal dekat

dengan tempat kerja, seperti dekat dengan tanah untuk bertani; berkebun; beternak; melaksanakan kegiatan industri kecil; berdagang; kegiatan transportasi dan sejenisnya / orientasi ekonomi.

- Aspek pencapaian prasarana sosial ekonomi

Ditinjau dari aspek pencapaian prasarana sosial ekonomi, umumnya manusia ingin tinggal dekat dengan jalan, Mesjid, Gereja, Pura, Vihara, balai desa, sekolah warung, pasar dan sejenisnya / orientasi sosial ekonomi.

### **2.3. Tinjauan Permukiman Kembali**

#### **2.3.1. Kasus-Kasus Penanganan Permukiman Kembali**

##### **a. Permukiman Kembali di Malaysia, Mesakh (2003 : 62-64).**

- Tujuan : Permukiman kota baru untuk pengembangan stabilisasi pertanian.
- Pendekatan : Pola ekonomi dan kestabilan politik.
- Perencana dan Manajemen : FELDA.
- Organisasi terkait : Lembaga Swadaya Masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah.
- Pola Penanganan : Pemberian lahan 4 Ha (Kelapa Sawit), rumah dan kebun dan manajemen hasil produksi.
- Kendala : Kesenjangan pendapatan yang menyebabkan kekurangkompakan peserta program.

##### **b. Permukiman Kembali di China, Mesakh (2003 : 64-67).**

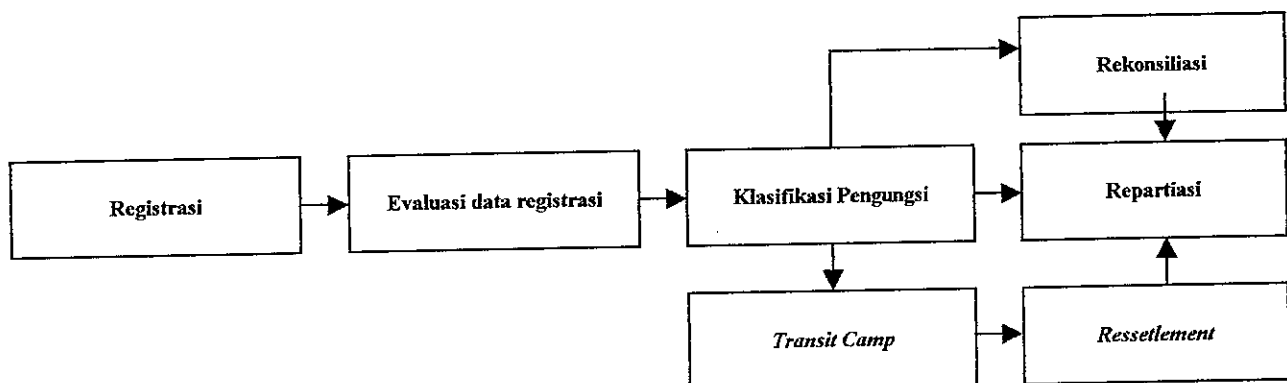
- Tujuan : Permukiman kembali penduduk yang terkena proyek pembuatan Dam/irigasi.
- Pola Penanganan : Pemindahan permukiman, kompensasi yang wajar dan insentif.
- Keberhasilan program : Perubahan kehidupan yang lebih baik peserta program.

c. Permukiman Kembali di Bangladesh, Mesakh (2003 : 67-69).

- Tujuan : Upaya Pemerintah untuk menyediakan tanah bagi masyarakat yang mengalami bencana alam (penyediaan tanah oleh pemerintah tidak optimal).
- Pola Penanganan : Membentuk organisasi dan Manajemen "National Task Force on Resettlement"
- Organisasi terkait : Proyek dan Lembaga swadaya masyarakat.
- Keberhasilan program : memperbaiki kebijaksanaan pertanahan.

d. Permukiman Kembali di NTT, Mesakh (2003).

- Tujuan : Permukiman kembali masyarakat di wilayah perbatasan sesuai hasil jajak pendapat.
- Pendekatan : Bantuan kemanusiaan yang kemudian diubah menjadi pemberdayaan masyarakat, rencana kerja terpadu dan pemenuhan paket bantuan pangan (jangka pendek ; tahap tanggap darurat, jangka panjang ; tahap pemulihan dan jangka panjang ; tahap rehabilitasi dan pemantapan)
- Penanggung jawab : Pemerintah Republik Indonesia dan Untaet
- Pola Penanganan :



**GAMBAR.II.1. POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KEMBALI DI NUSA TENGGARA TIMUR**



- Keberhasilan Program : Permukiman baru dan kehidupan yang lebih baik masyarakat di perbatasan negara.

### 2.3.2. Pengertian Relokasi

Menurut Messakh (2003 : 68-69), yang mengutip Serageldin dalam Cernea, Permukiman kembali merupakan suatu pendekatan yang lebih berpusat kepada manusia daripada kompensasi penyediaan perumahan. Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, relokasi merupakan pilihan terakhir dari upaya penanganan permukiman yang mungkin dapat dilaksanakan pada daerah bencana alam dan kerusuhan sosial. Kedua pengertian ini memberikan kesimpulan bahwa relokasi mengutamakan pendekatan yang bersifat manusiawi, jadi dapat disimpulkan, relokasi merupakan pemindahan suatu lokasi permukiman ke lokasi lain yang baru, oleh karena lokasi permukiman yang lama dianggap tidak layak / tidak dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermukim dengan alasan-alasan seperti pengembangan permukiman baru/ pengembangan kota, lahan dimanfaatkan sebagai lokasi proyek, akibat bencana alam maupun kerusuhan sosial / musibah bencana yang lain.

### 2.3.3. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Relokasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, sebagai berikut :

Menurut Bank Dunia dalam Umbara (2003 : 55), faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi relokasi untuk mencegah penurunan kesejahteraan, meliputi antara lain :

- Akses terhadap pelayanan umum.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat mengancam terhadap kelestarian lingkungan permukiman yang baru.
- Akses terhadap sumber daya yang dapat diterima di tempat yang baru untuk memperoleh penghasilan yang setara.

- Akses hubungan ekonomi yang setara dengan lokasi permukiman lama.

#### 2.3.4. Dampak Negatif yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pelaksanaan Program Relokasi.

Menurut Bank Dunia dalam Umbara (2003 : 55), dampak yang perlu dihindari dalam pelaksanaan program relokasi, sebagai berikut :

- Kualitas kehidupan masyarakat yang mengalami relokasi mengalami penurunan dari segi ekonomi, sosial dan kesehatan.
- Menurunnya kehidupan masyarakat dari segi sosial budaya, seperti kegotong-royongan.
- Menurunnya peran forum-forum masyarakat didalam masyarakat yang mengalami relokasi.
- Menurunnya sistem sosial dan ekonomi di lokasi yang baru akibat efek kumulatif dari program relokasi.

#### 2.3.5. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pelaksanaan Relokasi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan relokasi adalah sebagai berikut :

##### a. Lokasi

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi, meliputi :

- Aksesibilitas; segi sosial, segi ekonomi, segi budaya, segi kebijakan dan segi keamanan.
- Tersedia ruang dan lahan untuk pengembangan.
- Tersedia prasarana dan sarana.
- Fisik alam yang mendukung bentuk permukiman.
- Kondisi lingkungan yang mendukung.

## b. Perumahan

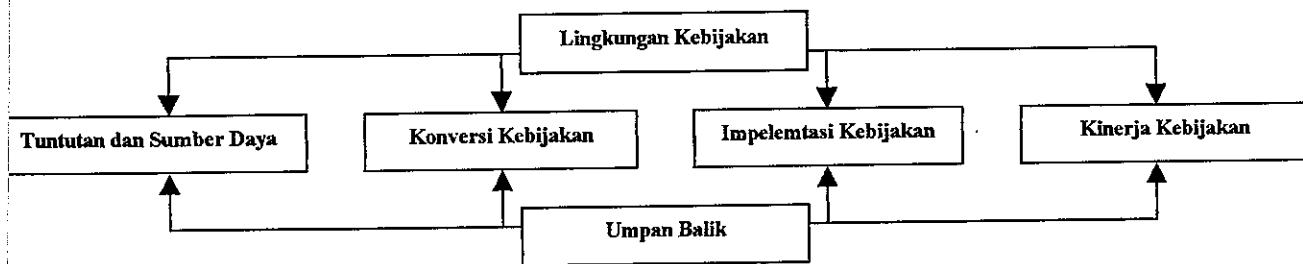
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan perumahan

- Memiliki status kepemilikan lahan dan rumah.
- Bentuk dan kualitas bangunan memenuhi standar.
- Harga rumah terjangkau oleh pendapatan.

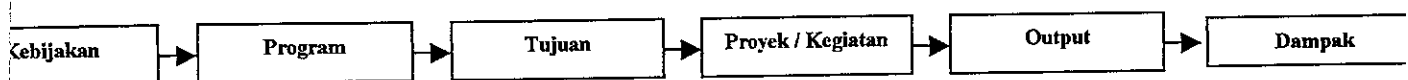
## 2.4. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik

### 2.4.1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu pedoman (*guide*) bagi pelaksana kegiatan (*implementation*) maupun untuk pengawas pelaksanaan (*observation*), Leslei Pal, Handout Mata Kuliah MPPWK, (2003). Keberhasilan implementasi kebijakan terkait dengan lingkungan strategis kebijakan, kinerja dan produk / manfaat kebijakan kepada sasaran kebijakan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan memerlukan perangkat-perangkat yang merupakan instrumen dari penyelenggaraan pemerintahan berupa kebijakan publik. Kebijakan Publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap *demands / claim* yang mengalir dari lingkungannya, Anderson dalam Solichin Abdul Wahab (2002 : 5). Untuk meraih tujuan kebijakan diperlukan aksi atau tindakan yang berupa pengerahan sumber daya; penghimpunan sumber daya (input kebijakan) dan pengelolaan sumber daya (proses kebijakan) yang meliputi perilaku administrasi dan organisasional, perilaku politis dan interpretasi kebijakan (program), selanjutnya dioperasionalisasikan dalam proyek yang menghasilkan tindakan fisik / konsekuensi (hasil, efek atau akibat), oleh Dunn (1998) dibagi dalam 2 (Dua) jenis, yaitu *output* dan dampak. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima kelompok sasaran, sedangkan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai *output* kebijakan yang dijelaskan dalam gambar.II.2. dan gambar.II.3., berikut :



**GAMBAR.II.2. PROSES KEBIJAKAN**



**GAMBAR.II.3. KEBIJAKAN DAN HASILNYA**

#### 2.4.2. Pengertian Evaluasi Kebijakan.

Beberapa pengertian tentang evaluasi kebijakan, sebagai berikut :

Menurut Bryant dan White (1987 : 198) dalam Wibawa et al (1994 :63) , evaluasi kebijakan merupakan penjelasan tentang hasil yang dicapai kebijakan dan implementasinya terhadap tujuan kebijakan.

Menurut Firman dan Martin dalam Umbara (2003), evaluasi merupakan penilaian seobyektif mungkin terhadap pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi umpan balik untuk penyempurnaan perencanaan selanjutnya.

Menurut Tjokroamidjoyo dalam Umbara (2003), sebagai salahsatu fungsi manajemen evaluasi merupakan penilaian seobyektif mungkin terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu rencana dan dampaknya terhadap sasaran kebijakan.

Menurut Dunn (1994 : 608), evaluasi merupakan penilaian hasil kebijakan atau program atau secara umum evaluasi identik dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*).

Menurut Dunn (1994 : 609-610), fungsi utama evaluasi kebijakan, meliputi antara lain :

- Evaluasi memberikan informasi tentang kinerja.
- Evaluasi memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan.

Keempat pengertian ini memberikan kesimpulan, bahwa evaluasi merupakan penilaian yang berhubungan dengan hasil / manfaat kebijakan yang dapat mendeskripsikan lingkungan kebijakan, kinerja pelaksana kebijakan, dampak kebijakan dan penyempurnaan kebijakan.

#### 2.4.3. Hasil / Produk Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan dimasa yang akan datang, yang mungkin diakibatkan oleh belum optimalnya daya antisipasi pembuat kebijakan, pendesain program dan proyek dan kondisi lingkungan kebijakan. Beberapa persoalan yang perlu dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi, Menurut Ripley dalam Wibawa et al (1994 : 8-9), meliputi antara lain :

- Akses yang diperoleh oleh pembuatan kebijakan.
- Prosedur pembuatan kebijakan.
- Kelogisan program.
- Memadainya sumber daya sebagai input program untuk mencapai tujuan kebijakan
- Proses implementasi kebijakan.
- Efisiensi dan ekonomi pelaksanaan program.
- Kelompok sasaran yang memperoleh pelayanan dari desain program.
- Dampak dan jenis dampak yang diberikan oleh program.
- Dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari program terhadap masyarakat.
- Waktu pelaksanaan program dan dampak yang diterima masyarakat.
- Kesesuaian dampak dan program / proyek.

Menurut Kasley dan Kumar (1987), dalam Wibawa et al (1994 : 9), meliputi antara lain

- Akses yang diperoleh dari input dan output proyek.

- Tanggapan terhadap proyek
- Perilaku yang dihasilkan oleh proyek.

Menurut Wibawa et al (1994 ; 9), meliputi antara lain :

- Proses pembuatan kebijakan.
- Proses implementasi kebijakan.
- Konsekuensi kebijakan.
- Efektifitas dampak kebijakan.

Jadi dapat disimpulkan hasil / produk dari evaluasi kebijakan meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses kebijakan dan hasil yang dicapai dari kebijakan.

Evaluasi terhadap proses implementasi disebut sebagai evaluasi implementasi, evaluasi terhadap konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak disebut evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan ini dilaksanakan setelah implementasi kebijakan (*restropektif*), Dunn (1998 : 119) . Selanjutnya hasil dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk pembuatan keputusan-keputusan yang dirinci oleh Weiss dalam Wibawa et al (1994 :11-12), meliputi antara lain :

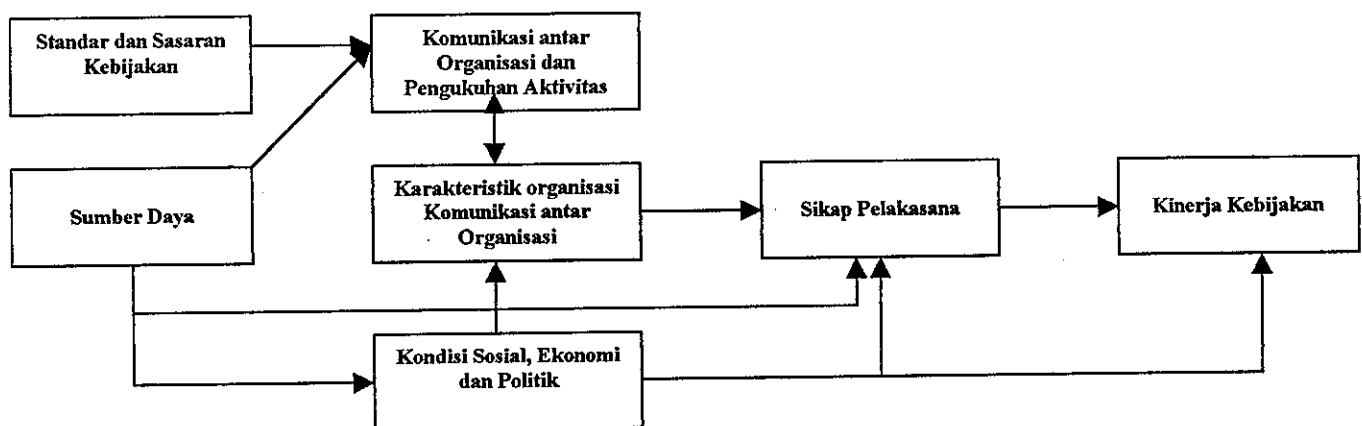
- Meneruskan atau mengakhiri program.
- Memperbaiki praktek dan prosedur administrasi.
- Menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi.
- Melembagakan program ke tempat lain.
- Mengalokasikan sumber daya ke program lain.
- Menerima atau menolak pendekatan / teori yang dipakai sebagai asumsi dari program.

#### 2.4.4. Berbagai Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan umpan balik kepada pelaksana dan pembuat kebijakan. Beberapa evaluasi implementasi kebijakan, sebagai berikut :

- Model Meter dan Horn (1975) dalam Wibawa et al (1994 :19).

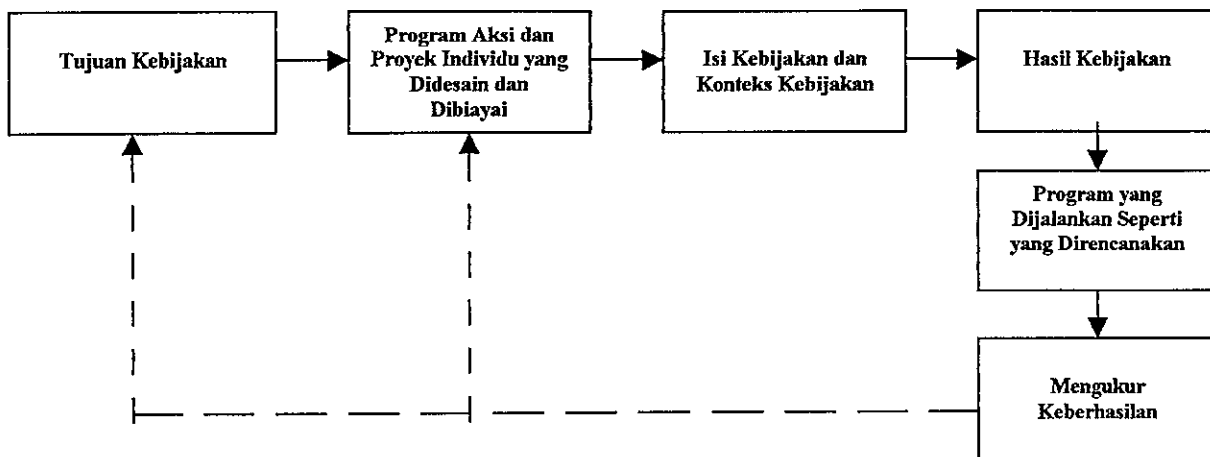
Model Meter dan Horn merupakan rumusan abstraksi hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung antar hubungan berbagai faktor, seperti pada gambar.II.4., berikut :



**GAMBAR.II.4. MODEL METER DAN HORN ( 1975 )**

- Model Grindle (1980) dalam Wibawa et al (1994 : 23).

Model Grindle (1980) merupakan penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap implementasi. Ide dasarnya, transformasi kebijakan menjadi program aksi di lapangan tergantung pada tingkat implementatifnya yang terlihat dari isi dan konteks kebijakan, seperti pada gambar.II.5., berikut :

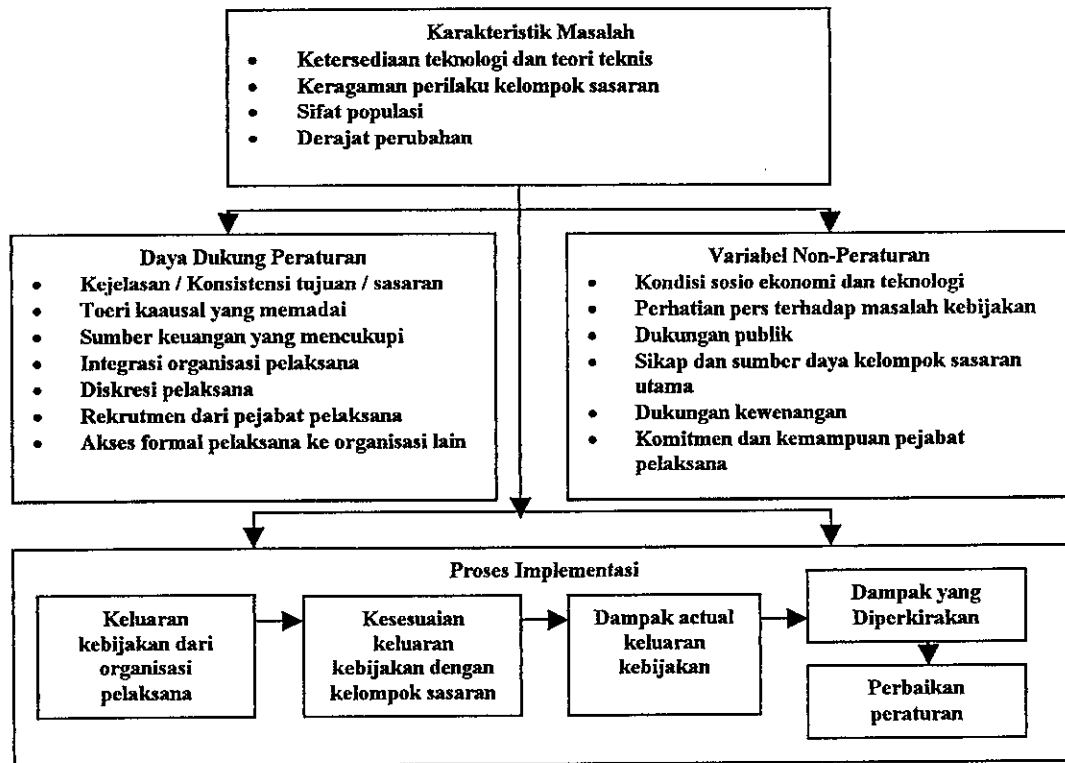


**GAMBAR.II.5. MODEL GRINDLE (1980)**

- Model Sabatier Mazmanian (1986) dalam Wibawa et al, (1994 :26).

Model Sabatier Mazmanian merupakan penjelasan tentang pengaruh lingkungan kebijakan terhadap implementasi kebijakan. Ide dasarnya implementasi kebijakan merupakan fungsi dari 3 (Tiga) variabel; karakteristik masalah, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dan faktor-faktor diluar peraturan, dimana akan efektif apabila birokrasi pelaksana mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan, seperti pada gambar.II.6., berikut :





**GAMBAR.II.6. MODEL SABATIER MAZMANIAN**

- Metode Pengumpulan Data, Wibawa et al (1994 : 27).

Metode pengumpulan data, sebagai berikut :

- Mengetahui kerangka pemikiran dari suatu studi implementasi
- Cara mengumpulkan data / informasi yang tepat
- Metode pengumpulan data, seperti menggunakan kuisioner dan observasi

Data / informasi yang valid dapat diperoleh juga melalui anekdot / catatan harian dari observasi, Bryant dan White dalam Samodra Wibawa et al (1994) .

#### 2.4.5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Beberapa kriteria evaluasi kebijakan, adalah sebagai berikut :

Menurut Henry (1988 : 223) dalam Wibawa et al (1994 : 64), meliputi :

- Efektifitas Program / Tingkat Pencapaian Tujuan Program

Efektifitas program merupakan tingkat pencapaian tujuan program

- Efisiensi Program / Target Program

Efisiensi program merupakan manfaat yang diterima sasaran program.

Selain tujuan dan target Henry dan, Bryant dan White (1987 : 198) dalam Wibawa et al (1994 : 65), mengemukakan kriteria evaluasi kebijakan, sebagai berikut :

- Waktu Pencapaian / Pentahapan Dalam Mencapai Tujuan.
- Tingkat Pengaruh yang Diinginkan.
- Perubahan Perilaku Masyarakat.
- Pelajaran yang diperoleh pelaksana proyek.
- Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

Menurut Dunn (1988 : 170) , kriteria evaluasi kebijakan, meliputi :

- Relevansi

Relevansi merupakan informasi yang diberikan untuk kebutuhan pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan dan pelaku kebijakan.

- Signifikansi

Signifikansi merupakan informasi baru dan penting untuk penyempurnaan kebijakan.

- Validitas

Validitas merupakan pertimbangan persusatif dan seimbang yang diberikan terhadap hasil kebijakan atau program.

- Reliabilitas.

Reliabilitas merupakan pembuktian kesimpulan kebijakan melalui prosedur penyusunan kebijakan yang teliti dan konsisten.

- Obyektifitas.

Obyektifitas merupakan laporan kesimpulan dan informasi pendukung yang sempurna.

- Ketepatan Waktu.

Ketepatan waktu merupakan penyediaan informasi pada waktu pembuatan keputusan.

- Daya Guna

Daya Guna merupakan penyediaan informasi yang dapat digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku kebijakan.

Dari ketiga pengelompokan kriteria diatas dapat dirangkum kriteria evaluasi kebijakan meliputi :

- Tingkat Pencapaian Tujuan Program / Kebijakan
- Dampak / Manfaat Terhadap Sasaran Program / Kebijakan
- Informasi Tentang Kinerja Program / Kebijakan untuk Penyempurnaan Kebijakan.

## 2.5. Kesimpulan Kriteria Kebijakan Relokasi

Dari tinjauan perumahan, permukiman dan permukiman kembali, relokasi dan tinjauan evaluasi kebijakan publik, sebagai berikut :

### a. Faktor - Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pelaksanaan Relokasi

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan relokasi, meliputi :

- Lokasi

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi, meliputi :

- Memiliki aksesibilitas terhadap segi sosial, segi ekonomi, segi budaya, segi kebijakan dan segi keamanan.
- Adanya segregasi wilayah.
- Tersedia ruang dan lahan untuk pengembangan.
- Fisik alam yang mendukung bentuk permukiman.
- Kondisi lingkungan yang mendukung.

- Perumahan

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembangunan perumahan, meliputi :

- Memiliki status kepemilikan lahan dan rumah.
- Bentuk dan kualitas bangunan memenuhi standar.
- Harga rumah terjangkau oleh pendapatan.

b. Indikator Kebijakan Relokasi

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan relokasi, meliputi :

- Relokasi mempertimbangkan penyesuaian kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengalami kerusakan sosial.
- Memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang mengalami kerusakan sosial dan masyarakat lokal.
- Memanfaatkan dan mengintegrasikan forum masyarakat untuk kepentingan yang luas (segi sosial, segi ekonomi, dan segi budaya).
- Mendukung dan mengembangkan sistem produksi dan pasar.
- Mendukung dan mengembangkan pola pengembangan wilayah.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman.

**BAB III.**  
**TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KONDISI DESA PASSO,**  
**KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON**

**3.1. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman  
Tahun 2000 -2004**

**3.1.1. Hakekat Perumahan dan Permukiman**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi antara lain secara fisik sebagai pelindung terhadap pengaruh alam yang merugikan, secara sosial ekonomi sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi yang mendukung kehidupan dan penghidupan, secara sosial budaya sebagai tempat untuk membina keluarga; membina pendidikan, pembentukan nilai-nilai, perwujudan jati diri dan hal yang berhubungan dengan fungsi rumah lainnya.

Sesuai arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 dan Program Pembangunan Nasional yang menyangkut perumahan dan permukiman mengamanatkan, antara lain :

- Pemenuhan Kebutuhan perumahan merupakan bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.
- Kesejahteraan rakyat ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan papan sebagai salahsatu kebutuhan dasar manusia.

**3.1.2. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman**

Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman, sebagai berikut :

**3.1.2.1. Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman**

Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, meliputi :

- Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.

- Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) sebagai salahsatu kebutuhan dasar manusia.
- Mewujudkan permukiman responsif, mendukung pengembangan jati diri, produktifitas dan kemandirian masyarakat.

#### 3.1.2.2. Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman

Strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman, meliputi :

- Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif.
- Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada rakyat miskin dan berpendapatan rendah.
- Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

#### 3.1.2.3. Kegiatan

Kegiatan yang terkait dengan penanganan masalah kerusuhan sosial, penanganan bencana alam dan pengungsi, meliputi :

- Penanganan tanggap darurat.
- Rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik perumahan dan permukiman.
- Permukiman kembali pengungsi di tempat asal.
- Relokasi.

### 3.2. Kebijakan dan Strategi Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial Propinsi Maluku

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial pada tahun 2002 dibentuk SATKORLAK yang diketuai oleh Gubernur

Propinsi Maluku dengan keputusan Gubernur Propinsi Maluku melalui keputusan Nomor 117 Tahun 2002 Tanggal 16 Nopember Tahun 2002 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja SATKORLAK PBP Maluku dan Kabupaten/Kota sebagai kelanjutan dari pembentukan BAKORNAS di tingkat Pemerintah Pusat, dalam perkembangannya untuk lebih mensinkronkan pelaksanaan penanganan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial di Propinsi Maluku secara lebih terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien sehingga tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna telah dirumuskan Petunjuk Teknis Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial Propinsi Maluku melalui keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 413 Tanggal 15 Nopember Tahun 2003 yang merupakan pedoman dan arahan bagi setiap instansi pemerintah daerah dan masyarakat yang terkait dalam menyusun kebijakan, pengarah kegiatan dan langkah pelaksanaan penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial secara terpadu terkoordinasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan instansi.

Kebijakan dan Strategi Penanganan Pengungsi / Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial Propinsi Maluku, yaitu :

### 3.2.1. Kebijakan

Dalam setiap upaya penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat Pemerintah Daerah maupun segenap unsur masyarakat sesuai Petunjuk Teknis yang diselaraskan dengan bidang tugas masing-masing unit.

### 3.2.2. Strategi

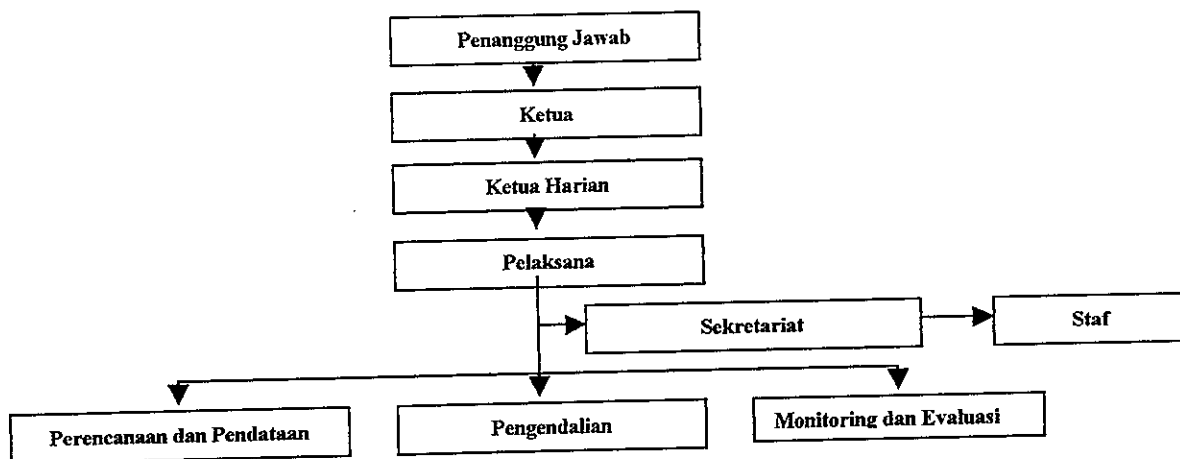
Penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dilaksanakan terpadu, terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah daerah dan masyarakat yang diwujudkan dalam upaya pengembalian/pemulangan,

transmigrasi, relokasi/sisipan dan pemberdayaan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.

Untuk Pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dibentuk struktur organisasi pos komando, mekanisme penanganan, pola penanganan dan pembiayaan penanganan, seperti berikut :

#### A. Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial

Struktur organisasi pos komando penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial yang dibentuk sesuai dengan masing-masing tingkatan kewenangan, seperti gambar.III.1., berikut :



**GAMBAR.III.1. POS KOMANDO PENANGANAN  
PENGUNGSI/MASYARAKAT YANG MENGALAMI KERUSUHAN  
SOSIAL**

#### 1. Uraian Tugas :

a. Pos Komando Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami kerusuhan Sosial Tingkat Propinsi mempunyai tugas antara lain :

- Sinkronisasi data dengan Pos Komando Tingkat Kabupaten/Kota.



- Setelah sinkronisasi data bersama-sama instansi terkait di propinsi dan Kabupaten/Kota menentukan jenis penanganan rumah dan fasilitas umum.
- Pos komando bersama Tim Pengaduan Masyarakat (TPM) menangani pengaduan dari pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.
- Memberikan laporan berkala (2 mingguan) kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.

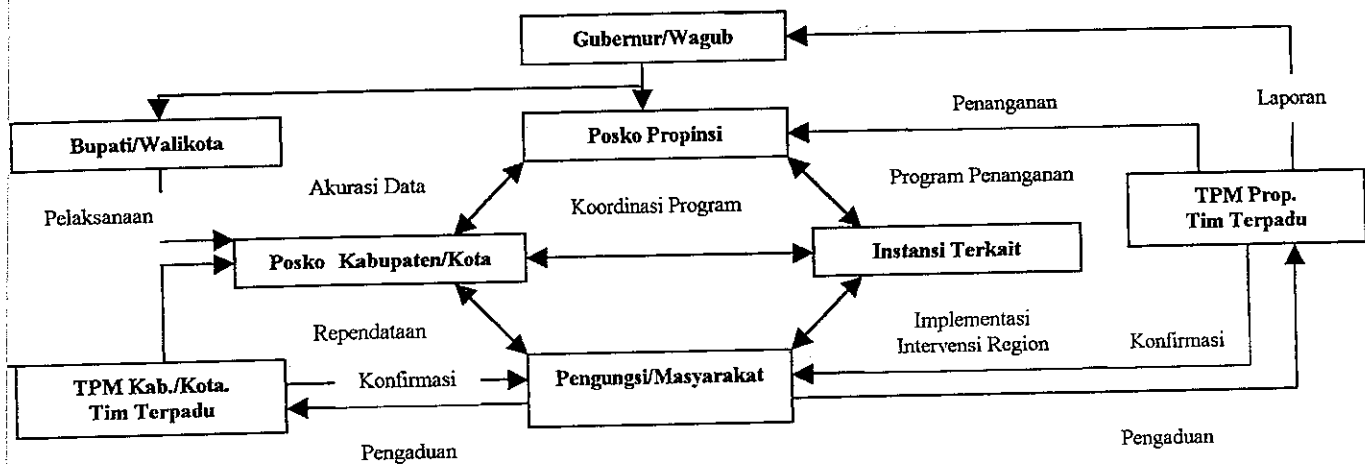
b. Pos Komando Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial Tingkat Kabupaten/Kota, mempunyai tugas antara lain :

- Mendata kembali informasi tentang pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.
- Sinkronisasi data dengan Pos Komando Tingkat Propinsi
- Mengkoordinasikan program penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dengan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten.
- Pos Komando Bersama Tim Pengaduan Masyarakat (TPM) menangani pengaduan dari pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.
- Memberikan laporan berkala (2 mingguan) kepada Bupati/Walikota.

B. Mekanisme Penanganan Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial Di Propinsi Maluku

Mekanisme Penanganan Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial

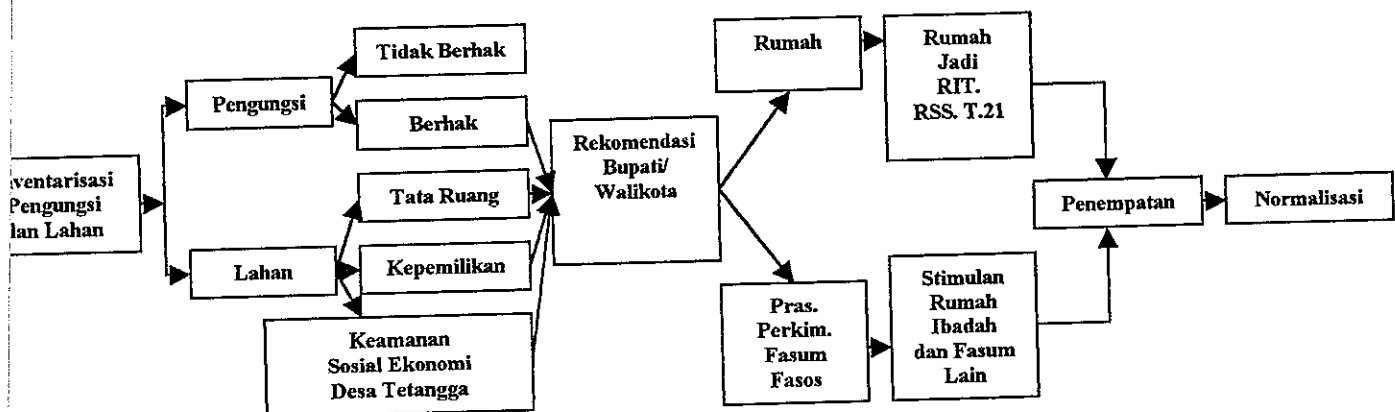
Di Propinsi Maluku seperti gambar.III.2., berikut :



**GAMBAR.III.2. POLA PENANGANAN PENGUNGSI/MASYARAKAT YANG MENGALAMI KERUSUHAN SOSIAL**

### C. Pola Penanganan Pengungsi Relokasi/Masyarakat Yang Mengalami Relokasi

Pola penanganan pengungsi relokasi/masyarakat yang mengalami relokasi, seperti gambar.III.3., berikut :



**GAMBAR.III.3. POLA PENANGANAN PENGUNGSI RELOKASI/MASYARAKAT YANG MENGALAMI RELOKASI**

### D. Pembiayaan Penanganan Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan Sosial

Penetapan pembiayaan penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial terdiri dari :

## 1. Harga Dasar

- Harga dasar untuk penanganan rumah disepakati untuk disamakan baik yang diperkotaan maupun di luar kota.
- Harga dasar mengacu pada harga dasar yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota atau instansi lain yang berkompeten seperti Dinas Pekerjaan umum.

## 2. Sumber Pembiayaan

- Sumber pembiayaan untuk penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

## 3. Perencanaan

- Semua biaya perencanaan untuk pembangunan rumah maupun fasum dibebankan pada instansi terkait yang menangani pembangunan fisik.

## 4. Pertanggungjawaban

Semua biaya yang dikeluarkan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

### 3.2.3. Kegiatan

#### A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 1999/2000-2003 oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku

#### 1. Arahan Kegiatan

Arahan kebijakan pada program Tahun III Rencana Pembangunan Lima Tahun VII yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk usulan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan diarahkan sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana bidang pengembangan perkotaan.
- Peningkatan efisiensi sektor strategis.

- Pengembangan dan pengelolaan sumber daya secara menyeluruh dan terpadu.

## 2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu :

- Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, aman dan terjangkau termasuk penyediaan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memadai dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah serta menunjang upaya pemulihan kehidupan normal bagi pengungsi akibat kerusuhan sosial.

## 3. Sasaran Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran pelaksanaan kegiatan, yaitu :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan Daftar Isian Proyek serta melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap paket-paket pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penanganan masalah kerusuhan sosial, di Propinsi Maluku mengacu pada strategi operasional secara nasional, meliputi :

- Penanganan tanggap darurat.
- Rekonstruksi dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik perumahan dan permukiman.
- Permukiman kembali pengungsi di tempat asal.
- Relokasi

## B. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Relokasi

Koordinasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan relokasi meliputi :

- Koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah kota terhadap masalah lokasi untuk lahan relokasi dengan mempertimbangkan kebijakan pengembangan kota, keamanan, luas lahan dan sosial ekonomi dan jumlah masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial / relokasi, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa

tentang pemilik lahan dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan koordinator pengungsi terhadap jumlah masyarakat yang mengalami kerusakan sosial / relokasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan.

- Koordinasi pada saat pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah desa dan pemilik lahan terhadap batas lahan.
- Koordinasi sesudah pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa terhadap masalah penempatan masyarakat yang mengalami kerusakan sosial.

### 3.3. Kondisi Wilayah Kota Ambon.






Kondisi fisik wilayah Kota Ambon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13/1979 memiliki luas 377 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 3 (Tiga) Kecamatan, 16 (Enam Belas) Kelurahan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Negeri. Adapun ketiga Kecamatan tersebut, yaitu :

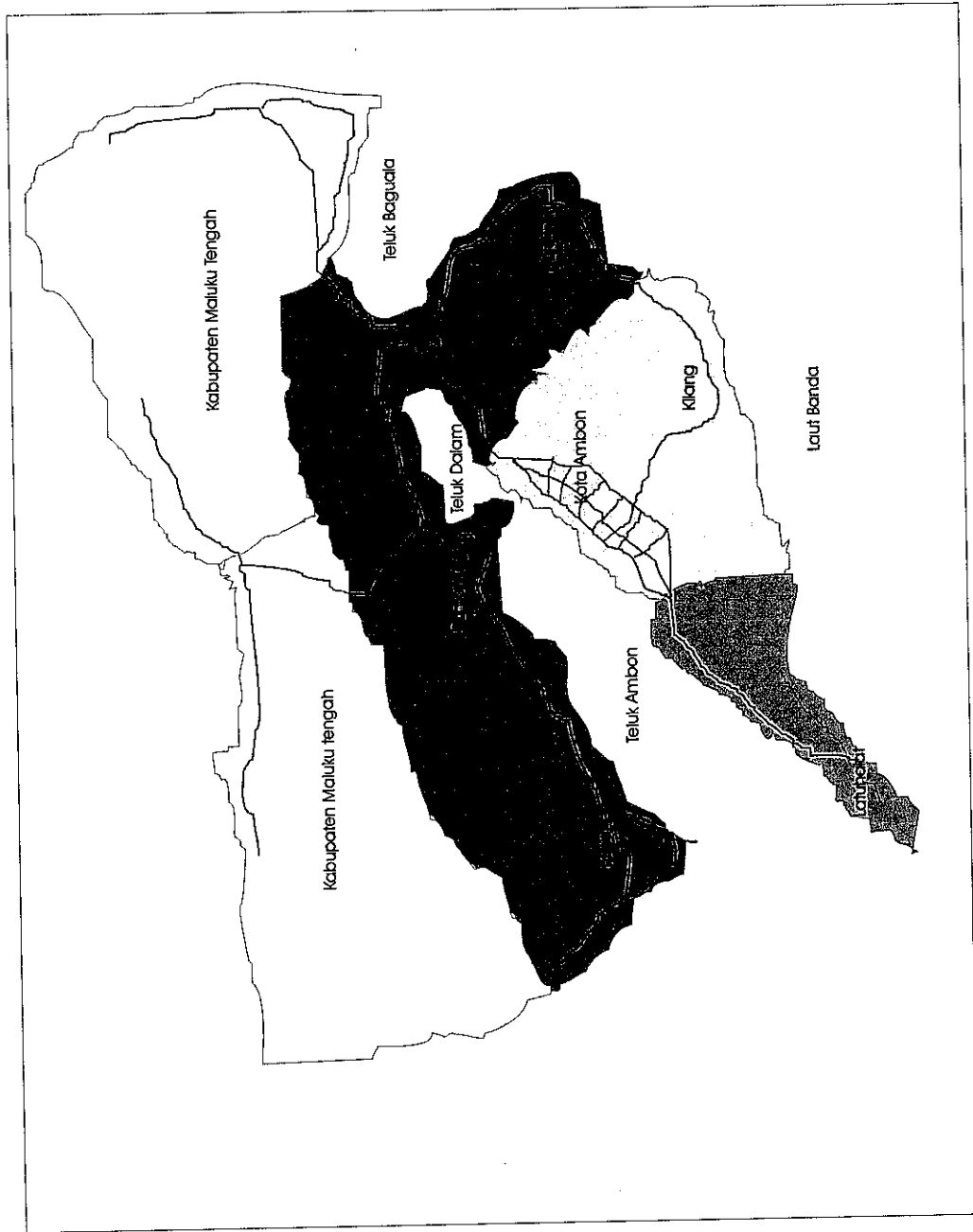
- Kecamatan Sirimau
- Kecamatan Nusaniwe
- Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Kota Ambon secara geografis terletak pada  $4^{\circ}$  L U- $8^{\circ}$  LS dan  $126^{\circ}$  BT-  $130^{\circ}$  BT dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : Laut Banda Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : petuanan Desa Hattu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Timur : petuanan Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku

Tengah, seperti gambar.III.4., berikut :

 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>		
<p><b>TESIS</b></p>		
<p>EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA KERUSUHAN SOSIAL DI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON</p>		
<p>GAMBAR.III.4. PETA ADMINISTRASI</p>		
<p>LEGENDA :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Jalan Raya</li> <li> Kecamatan Teluk Ambon Baguala</li> <li> Kecamatan Siliamu</li> <li> Kecamatan Nusantawe</li> </ul>		
U	SKALA	NO GAMBAR
	1 : 200.000	01
<p>SUMBER : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II KOTA AMBON</p>		



### 3.3.1. Iklim

Kondisi iklim di Kota Ambon menurut data diperoleh dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon pada tahun 1986-1992 dan dari Amdal Bandar Udara Pattimura Ambon dapat diklasifikasikan sebagai iklim sangat basah atau termasuk Klasifikasi A dengan harga quotient ( $Q$ ) = 0,082.

### 3.3.2. Kelerengan

Kondisi kelerengan Pulau Ambon merupakan daerah perbukitan dengan daerah yang relatif datar pada daerah disepanjang pantai dengan lebar rata-rata sekitar 2-3 Km dan pada bagian bagian tengah pulau merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 700-1000 m dengan kemiringan yang cukup terjal. Lebar rata-rata Pulau Ambon 12-15 Km. Secara umum kondisi kelerengan Pulau Ambon dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Daerah Pantai

Daerah ini merupakan hasil dari proses sedimentasi erosi pada bagian hulu dengan lebar rata-rata 2-3 Km dari garis pantai, kemiringan antara 0-8 % dan ketinggian kurang lebih 0-20 m diatas permukaan laut. Daerah ini umumnya dimanfaatkan sebagai permukiman penduduk.

- Daerah Lereng Pegunungan

Di daerah lereng pegunungan jenis batuan penyusunnya terdiri dari jenis batuan relatif muda dan kelerengan cukup terjal antara 8-25 % dengan kondisi penutupan lahan yang kurang memadai menyebabkan kelongsoran relatif cukup besar, terletak antara 2-5 Km dari garis pantai dengan ketinggian antara 20-700 m.

- Daerah Pegunungan

Terletak umumnya pada bagian tengah pulau dengan jarak antara 5-75 Km dari garis

pantai dengan kemiringan yang terjal, lebih terjal dari 25 % dan ketinggian antara 700-1.000 m diatas permukaan laut.

### 3.3.3. Jenis Batuan

Pulau Ambon merupakan bagian dari busur Banda, yang merupakan bagian busur *volcano-plutonik* dari sistem pengangkatan daratan dimulai dari pegunungan Himalaya melalui Laut Andaman, lepas pantai Barat Pulau Sumatera, Selatan Pulau Jawa dan Pulau-pulau di Nusa Tenggara yang berakhir pada Utara Pulau Seram.

Stratigrafi Pulau Ambon termasuk dalam busur Ambon dan termasuk dalam orogen Maluku. Struktur sesar balik, sesar geser maupun sesar normal pada umumnya ke arah Timur laut Barat daya, yang terbentuk karena kegiatan tektonik akibat adanya pergerakan lempeng Benua Australia dengan lempeng Laut Banda. Pulau Ambon merupakan ujung pusat gempa dengan kedalaman rata-rata 100 Km.

Jenis Batuan yang tersingkap di Pulau Ambon terdiri dari :

- Batuan Alluvial yang terdiri dari material berukuran kerikil, pasir,lanau dan lempung.
- Jenis batuan gamping terumbu yang terdiri dari batuan gamping koral, batuan gamping rombakan dan napal dengan ukuran keutuhan 15-20 m.
- Jenis batuan gunung api Pulau Ambon terdiri dari batuan efusit dengan komposisi batuan aesit dan batuan andesit dan jenis batuan yang berukuran lebih besar.
- Jenis batuan Diabas tersingkap pada tempat-tempat tertentu.
- Jenis batuan Granit berukuran butir sedang sampai dengan halus.
- Jenis batuan Pasir terdiri dari batuan Pasir yang berselingan dengan batuan lanau dan batuan yang memperlihatkan ciri sedimen turbidit.
- Jenis batuan endapan Delta terdiri dari perulangan konglomerat, batuan pasir, batuan lempung dengan sisipan Batubara.



### 3.3.4. Sumber-Sumber Air

Secara umum, Kota Ambon mempunyai potensi sumber air yang cukup besar, baik air permukaan maupun air tanah dalam, disebabkan oleh karena daerah tangkapan air hujan terbentuk oleh batuan lanau, batuan lempung, batuan pasir dan konglomerat yang memiliki porositas dan permeabilitas yang besar dan didukung oleh curah hujan yang cukup besar. Sumber air yang besar terdapat di Desa Halong dengan batuan dasar berupa batuan granit yang kedap air dan batuan di atasnya berupa endapan batuan lanau, batuan lempung, batuan pasir, konglomerat dan batuan gamping yang lolos air dengan debit relatif besar dan relatif tidak terpengaruh oleh musim kemarau. Sumber air lain yang relatif besar terdapat di Desa Wainitu yang dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan air minum wilayah dalam Kota Ambon, Desa Passo dan Desa Waiheru yang dimanfaatkan melayani wilayah sekitarnya. Di wilayah tertentu sepanjang pantai dijumpai sumber air, seperti Desa Amahusu, Desa Air Salobar, Desa Halong dan Desa Hunut melalui lubang sekunder pada batuan gamping atau celah batuan lava.

Kualitas sumber air dipengaruhi oleh susunan batuan pembentuknya yang dapat dikelompokkan secara umum, seperti di pusat Kota Ambon ke arah Desa Halong, Desa Passo, Desa Hatiwe Besar dan Desa Laha yang jenis batumannya berupa kerikil, lanau, pasir dan lempung yang relatif sangat porous air tanahnya bervariasi dari payau sampai tawar. Desa Eri jenis batuan penyusunnya batuan granit air tanahnya cenderung bersifat asam dan Desa Amahusu jenis batuan penyusunnya batuan ultra basa kualitasnya cukup baik.

Untuk memelihara potensi sumber air yang ada perlu upaya konservasi pada *cathmen area*, hulu sungai dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah dalam yang telah mencapai 119.746,6 m<sup>3</sup>/hari.

### 3.4. Konsep Dasar Pengembangan Kota

Kota Ambon sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Induk Kota 1984 – 2004 Kota Ambon akan dipertahankan untuk dikembangkan sebagai Kota yang berfungsi untuk pelayanan lokal dan regional yang terbagi atas 7 (Tujuh) sub wilayah pelayanan. Penentuan dan pendistribusian pusat pelayanan kota, pusat wilayah sesuai dengan kriteria berikut :

- Faktor penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut. Pola ini menyangkut jumlah penduduk, kepadatan, perkembangan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat.
- Faktor lingkungan terutama menyangkut pertimbangan mengenai skala lingkungan dalam pengertian fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, serta letak geografi lingkungan.
- Faktor fungsi dan peranan kawasan yang akan menentukan jangkauan pelayanan.

### 3.5. Kebijakan Pengembangan Kota

Kebijakan pengembangan Kota Ambon terbagi dalam 6 (Enam) kebijakan, meliputi :

- Kebijakan Kependudukan

Kebijakan distribusi kepadatan penduduk Kota Ambon, dibagi pada beberapa sub wilayah, sebagai berikut :

- Pusat Sub Wilayah
- Daerah Transisi
- Daerah Pinggiran
- Kawasan Linier
- Daerah Pertanian/Perdesaan

Besaran kepadatan yang ditetapkan berdasarkan pembagian fungsi wilayah seperti

tersebut diatas seperti pada tabel.III.1., sebagai berikut :

**TABEL.III.1. PENETAPAN TINGKAT KEPADATAN  
WILAYAH KOTA AMBON**

No.	Kepadatan Zone	Sub Wilayah Ambon Lama	Sub Wilayah Passo	Sub Wilayah Poka	Sub Wilayah Laha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pusat Sub Wilayah	150 - 200	100 - 150	0 - 50	0 - 50
2.	Transisi	200 - 300	150 - 200	100 - 150	100 - 150
3.	Pinggiran	50 - 100	50 - 100	100 - 150	50 - 100
4.	Daerah Linier sepanjang jalan arteri dan kolektor	50 - 100	50 - 100	50 - 100	50 - 100
5.	Daerah pedesaan dengan kemiringan 20 - 30 %	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25
6.	Catchmen area dengan kemiringan 20 %	5 - 10	5 - 25	5 - 25	0 - 10
7.	Catchmen area dengan kemiringan 20 % - 30 %	0 - 5	5 - 10	5 - 10	0 - 5
8.	Catchmen area dengan kemiringan 30 %	0 - 5	5 - 10	5 - 10	0 - 5
9.	Non-catchmen area dengan kemiringan 30 %	5 - 25	0 - 5	0	0

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon

Sebaran rencana kepadatan pada beberapa sub wilayah telah terlampaui, seperti pada daerah dengan kemiringan 30 % atau lebih dari 30 %.

- Kebijakan Perhubungan

Untuk mendukung pengembangan kota kebijakan perhubungan, meliputi :

- Tansportasi darat

Untuk jangka pendek, pemindahan terminal kota dan regional ke Galala, rencana ini tidak terlaksana sampai dengan tahun 1998.

Untuk jangka panjang, pemindahan terminal regional ke Passo sampai dengan tahun 1998 belum terlaksana. Terminal regional untuk bongkar muat barang yang dialokasikan dekat dengan pelabuhan laut dan udara, juga belum terlaksana, sedangkan pembangunan jalan lokal yang menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan tempat bekerja, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan pusat sub wilayah sebahagian besar telah terlaksana sesuai dengan rencana.

- **Transportasi Laut**

Pengembangan pelabuhan pelayaran rakyat dan regional jarak dekat di Tulehu yang termasuk sub wilayah Passo, telah terealisasi. Pengembangan pelabuhan pelayaran nasional dan Samudera di sub pusat Kota Ambon lama atau pusat Kota, sebahagian telah terealisasi dengan perluasan dan penataan pelabuhan Yos Sudarso. Pengembangan pelabuhan penyeberangan (ferry) dari Laha / Tawiri ke Pusat Kota Belum terlaksana.

- **Transportasi udara**

Pengembangan transportasi udara sebahagian besar telah terlaksana dengan pengembangan bandara Pattimura – Laha sebagai bandara internasional yang diharapkan mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai jasa transportasi udara.

- **Kebijakan Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata sampai dengan tahun 1998 sebahagian besar telah terealisasi dengan pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan prasarana dan sarana akomodasi dengan memanfaatkan potensi rekreasi bahari, obyek sejarah dan kesenian daerah.

- **Kebijakan Jasa Pelayanan Kesehatan.**

Pengembangan jasa pelayanan kesehatan sebahagian besar telah terealisasi sampai dengan tahun 1998, dengan pengembangan Rumah Sakit Umum yang berskala regional di Kota Ambon dan sub wilayah dan pelayanan yang berskala sub wilayah pada pusat-pusat wilayah utama yang setara puskesmas.

- Kebijakan Jasa Pelayanan Perbankan

Pengembangan jasa pelayanan perbankan dititik beratkan pada dukungan terhadap kegiatan perdagangan, sampai dengan tahun 1998 telah menunjukkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

- Kebijakan Jasa Pelayanan Perhotelan dan Restoran

Pengembangan jasa pelayanan perhotelan dan restoran dititik beratkan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan perdagangan, sampai dengan tahun 1998 telah menunjukkan peningkatan dengan pengembangan dan pembangunan hotel dan restoran dan jumlah kunjungan wisatawan.






### 3.5.1. Kebijakan Perwilayahan Kota Ambon.

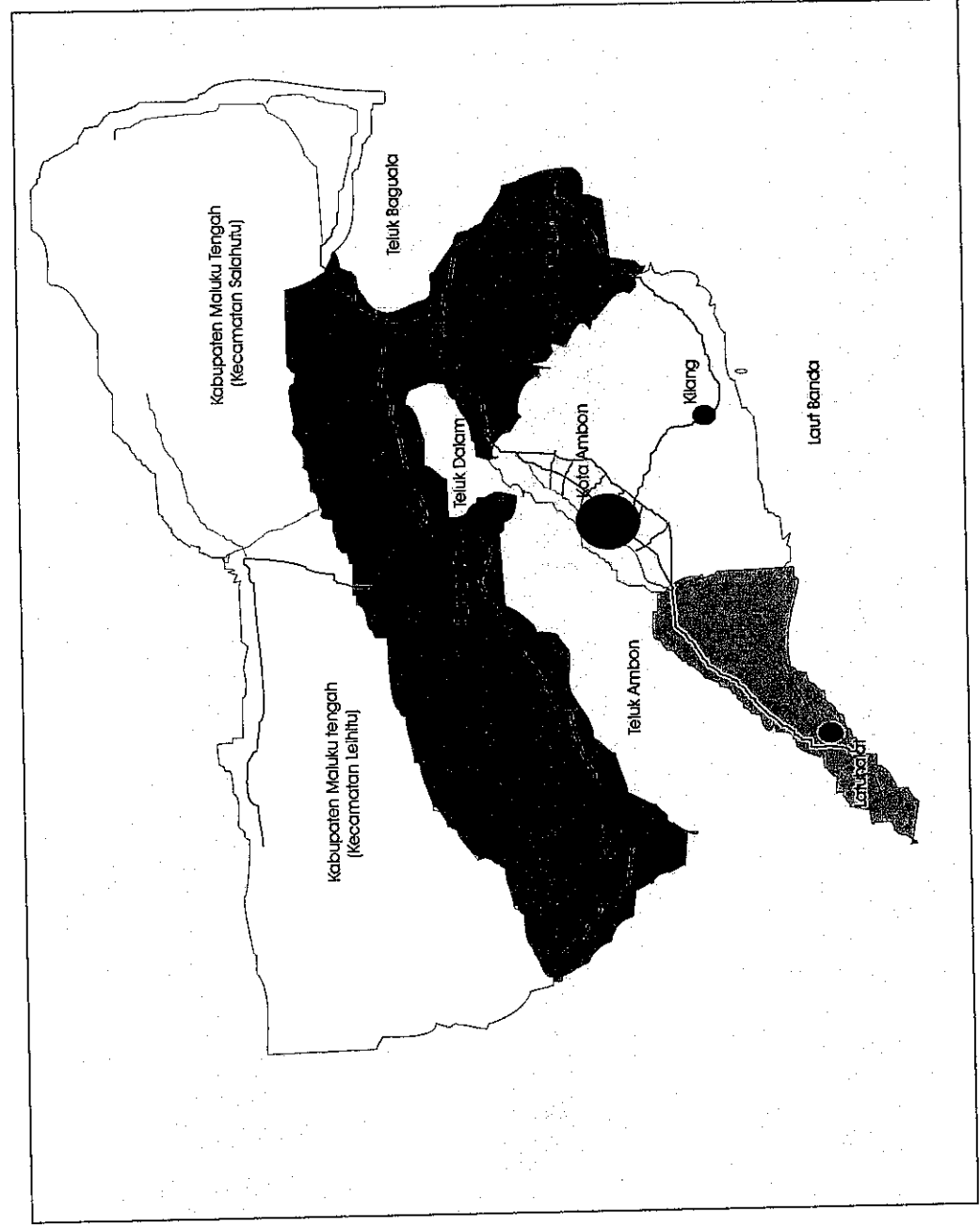
Perkembangan wilayah Kota Ambon sampai dengan tahun 1998 cenderung mengikuti kebijakan perwilayahan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon yang membagi Kota Ambon dalam 4 (Empat) wilayah pusat kawasan pelayanan untuk lebih mendorong perkembangan wilayah Pemerintah Kota Ambon membagi Kota Ambon dalam 7 (Tujuh) wilayah pelayanan, sebagai berikut :

- Sub Wilayah Pusat Kota dan sekitarnya dengan pusat pelayanan Kota Ambon lama akan terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perikanan, aneka industri, industri kecil dan pelayanan jasa lainnya.
- Sub wilayah Rumah Tiga dan sekitarnya dengan pusat pelayanan Rumah Tiga akan dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, permukiman serta usaha pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura dan pariwisata.
- Sub wilayah Passo dan sekitarnya dengan pusat pelayanan Passo akan dikembangkan sebagai kawasan industri, permukiman, pendidikan dan perikanan.

- Sub wilayah Laha dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Laha akan dikembangkan sebagai kawasan pelayanan jasa perhubungan udara, usaha perikanan, pertanian tanaman pangan dan pertambangan galian C.
- Sub wilayah Hutumuri dan sekitarnya dengan pusat pelayanan Hutumuri akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian (komoditi tanaman perdagangan) peternakan, perikanan dan pariwisata.
- Sub wilayah Kilang dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Kilang akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian (komoditi tanaman perdagangan) khususnya hortikultura, perkebunan dan pariwisata.
- Sub wilayah Latuhalat dan sekitarnya dengan pusat pelayanan di Latuhalat akan dikembangkan sebagai kawasan perikanan, peternakan, perindustrian, perkebunan dan pariwisata.

Untuk jelasnya kebijakan pengembangan wilayah Kota Ambon dapat dilihat pada gambar.III.5., berikut :

<div></div> <div>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</div>			
TESIS			
EVALUASI KEBUJUKAN RELOKASI PASCA KERUSUHAN SOSIAL DI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON			
GAMBAR III.5 PETA STRUKTUR TATA RUANG KOTA AMBON			
<div><div><p>Pusat Pertumbuhan</p></div><div><p>Sub Pusat Pertumbuhan</p></div><div><p>Sub Pusat Pertumbuhan Sekunder</p></div></div>			
U		SKALA	NO GAMBAR
		1 : 200.000	02
SUMBER : RENCANA INDUK KOTA AMBON			



### 3.5.1.1. Rencana Tata Guna Tanah

Sesuai Rencana Induk Kota tahun 1984 – 2004, rencana *zoning* atau tata guna tanah Kota Ambon, meliputi rencana untuk wilayah perencanaan dan perluasan dengan didasarkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Kondisi topografi dan hidrologi
- Tingkat kemudahan hubungan (aksesibilitas)
- Kelengkapan fasilitas pelayanan
- Tingkat kenyamanan
- Dominasi penggunaan tanah
- Kemudahan pengalihan fungsi yang telah ada pada kawasan
- Kebijakan pengembangan kota

Rencana *Zoning* atau tata guna tanah Kota Ambon, meliputi :

- Sektor Perdagangan

Kegiatan perdagangan dibedakan atas perdagangan regional dan lokal dikembangkan di pusat kota, kegiatan perdagangan bagian wilayah kota akan dikembangkan di wilayah Poka dan Passo. Untuk saat ini wilayah Passo telah terlihat perkembangannya dengan adanya pasar yang berskala lokal dan perkembangan pertokoan disepanjang jalan utama.

- Sektor Industri

Desa Batu Gong akan dikembangkan sebagai industri basis yang berskala besar dan menengah. Industri perabotan rumah tangga dan kerajinan rakyat dikembangkan di wilayah sekitar Passo yang berdekatan dengan Desa Batu Gong sehingga memungkinkan keterkaitan industri basis dan non basis. Rencana ini telah terealisasi dan sebahagian besar sesuai dengan rencana.



- **Sektor Pemerintahan**

Sektor pemerintahan dikembangkan di wilayah pusat kota untuk melayani skala propinsi dan kota, juga akan dikembangkan terutama di sub wilayah Poka – Rumah Tiga dan pada sub – sub wilayah utama lainnya. Rencana ini sebahagian besar terealisasi sesuai rencana dengan pengembangan kantor pemerintahan dan fasilitas pemerintahan pada lokasi rencana.

- **Sektor Pendidikan**

Sub wilayah utama Poka – Rumah Tiga akan dipusatkan sebagai lokasi pusat pendidikan tinggi Kota Ambon. Sampai dengan tahun 1998 rencana ini telah sebahagian besar terealisasi, perguruan tinggi yang masih berlokasi di luar lokasi rencana adalah perguruan tinggi swasta. Pendidikan menengah, dikembangkan pada setiap wilayah yang berkedudukan sebagai sub wilayah utama. Sebahagian besar rencana ini terealisasi dengan dibangunnya fasilitas pendidikan menengah ke sub wilayah utama dan sampai ke sub wilayah sekunder. Pendidikan dasar telah terdapat pada setiap desa yang ada di sub wilayah pengembangan.

- **Sektor Peribadatan**

Rencana untuk menyediakan fasilitas peribadatan pada tingkat sub wilayah dan tingkat lingkungan sampai dengan tahun 1998 telah sesuai dengan rencana dan bahkan melebihi target.

- **Sektor Kesehatan**

Rencana untuk menyediakan fasilitas kesehatan berskala wilayah seperti rumah sakit umum pada pusat wilayah utama telah terealisasi dan juga dikembangkan pada sub wilayah Laha / Tawiri yang dikelola oleh militer Angkatan Udara. Fasilitas kesehatan yang berskala sub wilayah dikembangkan pada pusat-pusat wilayah utama yang setara dengan puskesmas dan pada pusat-pusat lingkungan

dikembangkan puskesmas pembantu kondisi ini telah terealisasi sampai dengan tahun 1998, bahkan melebihi target yang direncanakan.

### 3.5.1.2. Penggunaan Lahan

Didalam pengembangannya Kota Ambon dikelompokkan dalam 7 (Tujuh) lokasi pengelompokan wilayah pengembangan lahan budidaya non-pertanian, yaitu :

- Pusat Kota dan sekitarnya (sebahagian petuanan Amahusu sampai dengan Desa Latta), dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^{\circ} 36'$ , seluas 13,5  $\text{Km}^2$  atau seluas 5,44 %.
- Rumah Tiga dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^{\circ} 18'$ , seluas 4,5  $\text{Km}^2$  atau seluas 5,57 %.
- Passo dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^{\circ}$ , seluas 14,75  $\text{Km}^2$  atau seluas 4,74 %.
- Laha dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^{\circ} 33'$ , seluas 4,25  $\text{Km}^2$  atau seluas 6,18 %.
- Hutumuri dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $6^{\circ} 16'$ , seluas 4,25  $\text{Km}^2$  atau seluas 9,70 %.
- Kilang dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $5^{\circ} 16'$ , seluas 3,50  $\text{Km}^2$  atau seluas 9,91 % dan areal ketinggian 50-250 m dan kemiringan rata-rata  $6^{\circ} 16'$ , seluas 3,25  $\text{Km}^2$  atau seluas 10,30 %.
- Latuhalat dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $5^{\circ} 40'$ , seluas 4,00  $\text{Km}^2$  atau seluas 8,57 %, seperti tabel.III.2. berikut :

**TABEL.III.2. LOKASI PENGELOMPOKAN WILAYAH  
PENGEMBANGAN LAHAN BUDIDAYA NON-PERTANIAN  
DI KOTA AMBON**

No.	Lokasi	Area		Luas (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
		Ketinggian (m)	Kemiringan (°)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pusat Kota dan sekitarnya	0 – 50	3° 36'	13,50	5,44
2.	Rumah Tiga dan sekitarnya	0 – 50	3° 18'	4,50	5,57
3.	Passo dan sekitarnya	0 – 50	3°	14,75	4,74
4.	Laha dan sekitarnya	0 – 50	3° 33'	4,25	6,18
5.	Hutumuri dan sekitarnya	0 – 50	6° 16'	4,25	9,70
6.	Kilang dan sekitarnya	0 – 50	5° 16'	3,50	9,91
		50 – 250	6° 16'	3,25	10,30
7.	Latuhalat dan sekitarnya	0 – 50	5° 40'	4,00	8,57

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

Perkembangan penggunaan lahan di Kota Ambon berdasarkan hasil penelitian Badan Pertanahan Nasional, terjadi penyimpangan mencapai 382,43 Ha. Penyimpangan penggunaan lahan yang cukup besar adalah dari perkebunan menjadi pemukiman. Penyimpangan penggunaan lahan antara lain :

Pemanfaatan daerah konservasi alam sebagai area permukiman; pada daerah lereng pegunungan seperti Desa Batu Merah, Desa Batu Gajah, Desa halong, Desa Batu Meja, Desa Batu Gantung Dalam, Desa Kuda Mati, Desa Benteng dan Kawasan sekitar Gunung Nona; pada daerah pantai seperti Desa OSM, Desa Tanah Lapang Kecil, Desa Waihaong ke Arah Desa Batu Merah, Desa Tantui dan Desa Negeri Lama; pada daerah aliran sungai seperti Desa Batu Merah, Desa Batu Gantung dan Desa Waihaong. Pemanfaatan daerah konservasi alam sebagai area pendidikan di Desa Ahuru dan industri di Desa Amahusu, seperti gambar.III.6., berikut :



### 3.5.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Komposisi kependudukan dan ketenagakerjaan Kota Ambon, adalah sebagai berikut :

#### 3.5.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Ambon selama periode 1980-1992 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil sensus tahun 1980 jumlah penduduk adalah sebesar 207.702 jiwa dan pada tahun 1992 sebesar 279.503 jiwa atau laju pertumbuhan 2,51 %. Pertumbuhan penduduk Kota Ambon pada periode ini lebih banyak dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang masuk ke Kota Ambon. Pada tahun 1998 penduduk Kota Ambon berjumlah 314.417 jiwa, seperti tabel.III.3. berikut :

**TABEL.III.3. PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA AMBON TAHUN 1980-1998**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan Penduduk	
			Absolut (Jiwa)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1980	207.702		
2.	1981	213.921	6.291	3,03
3.	1982	217.107	3.186	1,49
4.	1983	217.715	608	0,28
5.	1984	219.082	1.367	0,63
6.	1985	225.182	6.100	2,78
7.	1986	234.490	9.308	2,93
8.	1987	241.367	6.877	2,93
9.	1988	242.661	1.294	0,54
10.	1989	246.568	3.907	1,16
11.	1990	276.955	30.387	12,32
12.	1991	277.334	379	0,14
13.	1992	279.503	2.169	0,78
14.	1993	281.744	2.241	0,80
15.	1994	283.827	2.083	0,74
16.	1995	286.475	2.648	0,93
17.	1996	308.744	25.269	8,82
18.	1997	310.921	2.177	0,71
19.	1998	314.417	3.496	1,12

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

#### 3.5.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Ambon, meliputi :

### A. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Perbandingan penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebesar 141.033 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 134.855 jiwa dengan rasio jenis kelamin 1 : 1,04. Penduduk Kota Ambon menurut sensus penduduk pada tahun 1990 usia penduduk yang termasuk usia produktif (usia 15-54 tahun) dibandingkan penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun) dan (usia 55-75 tahun ke atas). Perbandingan jumlah usia produktif dan usia non produktif, jumlah penduduk usia produktif sebesar 163.243 jiwa atau 59,17 % dari jumlah total penduduk dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif 112.645 jiwa. Angka ketergantungan penduduk Kota Ambon adalah sebesar 69, seperti tabel.III.4. berikut :

**TABEL.III.4. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS SERTA RATIO JENIS KELAMIN DI KOTA AMBON, TAHUN 1990.**

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ratio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0 - 4	16.507	14.606	31.113	113
2.	5 - 9	17.749	15.413	33.162	115
3.	10 - 14	15.939	15.042	30.981	106
4.	15 - 19	18.243	17.611	35.854	104
5.	20 - 24	17.636	16.729	34.365	105
6.	25 - 29	14.059	14.223	28.282	99
7.	30 - 34	10.463	10.156	20.619	103
8.	35 - 39	7.754	7.371	15.125	105
9.	40 - 44	5.748	5.589	11.337	103
10.	45 - 49	4.664	4.378	9.042	107
11.	50 - 54	4.001	3.924	7.925	102
12.	55 - 59	2.657	2.721	5.378	98
13.	60 - 64	2.142	2.358	4.500	91
14.	65 - 69	1.437	1.776	3.213	81
15.	70 - 74	1.006	1.374	2.380	73
16.	75 keatas	1.028	1.584	2.612	65
Jumlah		141.033	134.855	275.888	105

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

### B. Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan data penduduk tahun 1991 jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut :

Jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 112.302 jiwa atau sebesar 41,11 %, penduduk yang beragama Kristen Protestan berjumlah 146.093 jiwa atau sebesar 53,46 % dan sebesar 5,43 % adalah penduduk yang beragama Kristen Katolik, Hindu dan Budha, seperti tabel.III.5., berikut :

**TABEL.III.5. JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA TIAP KECAMATAN DI KOTA AMBON, TAHUN 1991**

No.	Kecamatan	Islam		Kristen Protestan		Kristen Katolik		Hindu		Budha	
		(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Nusaniwe	28.730	10,52	52.674	19,28	4.303	1,58	63	0,23	27	0,001
2.	Sirimau	47.975	17,56	56.378	20,64	4.378	1,60	144	0,05	64	0,023
3.	Teluk Ambon Baguala	35.597	13,03	36.987	13,54	5.692	2,08	24	0,009	113	0,041
	<b>Jumlah</b>	<b>112.302</b>	<b>41,11</b>	<b>146.039</b>	<b>53,46</b>	<b>14.373</b>	<b>5,26</b>	<b>231</b>	<b>0,289</b>	<b>204</b>	<b>0,065</b>

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon, 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon

### C. Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Sektor industri merupakan sektor yang dominan menyerap tenaga kerja dengan jumlah sebesar 3.141 orang atau sebesar 32,39 % kemudian diurutan berikutnya sector bidang usaha Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sebesar 2.762 orang atau sebesar 28,48 %, seperti tabel.III.6. berikut :

**TABEL.III.6. PERKEMBANGAN PENDUDUK MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA AMBON, TAHUN 1988 - 1991.**

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja			
		1988	1989	1990	1991
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian/Peternakan/Kehutanan	721	52	2.762	2.762
2.	Pertambangan/galian	-	-	-	-
3.	Industri	127	126	3.141	3.141
4.	Bangunan	51	-	1.160	1.169
5.	Perdagangan Besar/Eceran	28	57	1.687	1.687
6.	Pengangkutan, perhubungan dan Penimbunan	24	22	134	134
7.	Jasa-jasa	31	247	527	527
8.	Listrik, Gas dan Air Minum	-	-	287	287
	<b>Jumlah</b>	<b>982</b>	<b>504</b>	<b>9.698</b>	<b>9.698</b>

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon.

#### D. Persebaran Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Ambon pada tahun 1992 berjumlah sebesar 279.503 Jiwa terdistribusi di 3 (tiga) Kecamatan dan 49 Kelurahan. Kepadatan rata-rata penduduk di Kota Ambon sebesar 772 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Nusaniwe dengan kepadatan 923 jiwa per Km<sup>2</sup> urutan berikutnya Kecamatan Sirimau 713 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan 713 jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Baguala dengan kepadatan 492 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk pada pusat kota merupakan kepadatan penduduk yang paling tinggi pada Kelurahan Nusaniwe, Kelurahan Wainitu, Kelurahan Waihaong, Kelurahan Kuda Mati, Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Silale, Kelurahan Honipopu, Kelurahan Ahusen, dan Kelurahan Rijali. Kepadatan terendah berada di Desa Hukurila dan Desa Soya, seperti tabel.III.7. dan tabel.III.8., berikut :

**TABEL.III.7. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK TIAP KECAMATAN DI KOTA AMBON TAHUN 1990 – 1992.**

No.	Kecamatan	Luas (Km)	1990		1991		1992	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nusaniwe	883.452	82.287	931	88.319	1.000	81.510	923
2.	Sirimau	110.310	95.176	863	108.558	984	78.602	713
3.	Teluk Ambon Baguala	167.000	59.105	414	79.013	473	82.107	492

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon tahun 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon.

**TABEL.III.8. SEBARAN KEPADATAN PENDUDUK DAN RATA-RATA KELUARGA, TAHUN 1992**

No.	Kecamatan Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Per Km <sup>2</sup> )	Rata-Rata Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Kecamatan Nusaniwe					
1.	Kelurahan Silale	0,1802	4.367	24.234	839	5
2.	Kelurahan Waihaong	0,1500	6.514	43.427	1.238	5
3.	Kelurahan Urimessing	0,2690	4.098	15.234	746	5
4.	Kelurahan Mangga Dua	0,1840	3.874	21.054	678	6
5.	Kelurahan Kuda Mati	0,6650	15.568	23.411	2.716	6
6.	Kelurahan Wainitu	0,2984	13.309	44.601	2.300	6
7.	Kelurahan Benteng	0,8664	13.036	15.046	2.372	6
8.	Kelurahan Nusaniwe	0,1600	8.411	52.569	1.452	6
9.	Desa Urimessing	46,1600	899	5.178	112	6
10.	Desa Amahusu	8,0000	690	3.348	419	5
11.	Desa Silale	2,4122	230	1.251	519	5



12.	Desa Nusaniwe	16,0000	593	3.049	191	5
13.	Desa Latuhalat	13,0000	1.115	6.021	463	5
II.	Kecamatan Sirimau					
1.	Desa Naku	5,0000	112	677	135	6
2.	Desa Kilang	3,0000	146	799	266	5
3.	Desa Hukurila	7,5000	90	429	57	5
4.	Desa Ema	3,0000	186	895	298	5
5.	Desa Hatalae	5,0000	152	865	173	6
6.	Desa Soya	60,0000	938	5.458	91	6
7.	Desa Batu Gajah	0,4500	6.009	13.353	1.101	5
8.	Desa Batu Meja	0,8500	10.441	12.284	1.988	5
9.	Kelurahan Ahusen	0,2400	5.470	22.792	1.193	5
10.	Kelurahan Honipopu	0,3400	7.592	22.329	1.534	5
11.	Kelurahan Uritetu	0,3500	5.448	15.566	1.076	5
12.	Kelurahan Rijali	0,2800	5.749	20.532	1.135	5
13.	Kelurahan Karang Panjang	0,4800	7.131	14.856	1.383	5
14.	Kelurahan Amatelu	1,1700	7.043	8.240	1.554	5
15.	Desa Batu Merah	17,0000	5.109	2.398	141	-
16.	Kelurahan Pandan Kasturi	4,0000	2.112	8.449	1.621	5
17.	Desa Hative Kecil	1,5300	1.532	12.767	302	1
18.	Desa Galala	0,1200	1.532	12.767	302	5
III.	Kecamatan Teluk Ambon Baguala					
1.	Desa Leahari	5,0000	117	615	123	5
2.	Desa Rufong	5,0000	165	874	175	5
3.	Desa Hutumuri	16,0000	713	3.457	216	5
4.	Desa Batu Gong	0,6200	3.707	5.979	600	6
5.	Desa Passo	12,9300	2.245	12.181	942	5
6.	Kelurahan Lateri	2,0100	2.044	4.109	773	5
7.	Desa Latta	0,1000	2.592	25.920	419	6
8.	Desa Halong	18,0000	1.764	9.061	503	5
9.	Desa Negeri Lama	4,5000	297	1.338	282	5
10.	Desa Nania	0,1200	3.443	28.608	715	5
11.	Desa Waiheru	6,0000	909	4.009	668	4
12.	Desa Hunuth/Durian Patah	2,0000	726	1.452	314	5
13.	Desa Poka	3,0000	2.951	8.853	1.821	5
14.	Desa Rumah Tiga	30,5000	2.565	11.302	371	4
15.	Desa Wayame	7,5000	481	2.555	341	5
16.	Desa Hative Besar	30,0000	811	4.460	149	5
17.	Desa Tawiri	5,7200	725	3.625	634	5
18.	Desa Laha	18,0000	912	4.481	249	5

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon Tahun 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon

### 3.5.3. Sosial Budaya

Masyarakat Pulau Ambon / Propinsi Maluku sejak sejak Zaman kolonial kondisi masyarakatnya heterogen; dengan adanya perbedaan suku dan bermacam kultur etnis, sebahagian besar masyarakat Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease merupakan penduduk yang berasal dari Pulau Seram yang dikenal sebagai pulau Ibu / Induk (Nusa Ina), ini terlihat dari nama sub suku kecil atau yang dikenal dengan "fam" / marga yang terdapat di Kota Ambon hingga kini, seperti "fam" / marga Wattimena, Lokkolo, Kakisina, Korputty, Kakerissa, Riupassa, Anakota, Payapo, Pasiseron, Manuputty, Pasal, Pasanea, Kiry, Killian, Tamaela, Simatau, Sitania, Mahusa, Halatu, Tauran, Wattimuri, Lasamahu, Soutssa, Lessy dan lain-lain.

Pada masa kolonial masyarakat Pulau Ambon terbentuk berdasarkan jenis ikatan-ikatan sosial berdasarkan suku/ikatan keluarga, teritori dan kepercayaan. Pembahagian masyarakat berdasarkan ikatan keluarga atau hubungan darah (*genealogis*), sebagai berikut :

- Kelompok berdasarkan keturunan atau "*fam*" / marga / klan

Kelompok berdasarkan keturunan mendiami rumahtau – rumahtau, yaitu rumah besar dimana sekeluarga seketurunan bertempat tinggal. Sekumpulan rumahtau-ramahtau membentuk teritori pemukiman yang disebut komunitas Uku. Sekumpulan komunitas Uku-Uku membentuk Hena. Sekumpulan Hena-Hena membentuk Uli, di Kota Ambon terdapat 2 (Dua) Uli, yaitu Ulisiwa dan Ulilima.

- Susunan masyarakat berdasarkan teritori terdiri dari :

Soa-Soa, yaitu ikatan social berdasarkan teritori komunal. Sekumpulan Soa-Soa membentuk "*negeri*" / Desa. Selain itu ada pula pola permukiman / "*negeri*" / Desa berdasarkan komunitas, seperti Siri Sori Salam dan Siri Sori Sarani di salahsatu Pulau – Pulau Lease; Pulau Saparua.

Tradisi yang menonjol di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (dan Propinsi Maluku) adalah "*Pela*", yaitu persaudaraan secara adat yang sudah ada sejak dahulu bersamaan dengan kehidupan beragama. "*Pela*" adalah suatu persaudaraan antar negeri / Desa, didalam suatu pulau tertentu maupun desa antar pulau. Tradisi ini terdapat pada Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusalaut dan Pulau Seram. "*Pela*" terdiri dari :

- "*Pela Tuni*", yaitu bermakna ikatan persaudaraan untuk selama-lamanya.
- "*Pela Gandong*", yaitu bermakna ikatan persaudaraan sebagai wadah kerja sama anggota masyarakat.

- ” *Pela Tempa Siri* ”, yaitu bermakna ikatan persaudaraan sebagai simbol musyawarah dalam menyelesaikan persoalan hidup masyarakat.

Selain itu terdapat tradisi di Kota Ambon dan Propinsi Maluku yang merupakan perwujudan gotong-royong dan toleransi pada masyarakat negeri / desa yang dikenal dengan istilah ” *Masohi* ” dalam pembangunan Mesjid, Gereja dan tempat ibadah lain yang dilakukan secara bersama dan pembuatan lahan kebun, pembangunan rumah, pembangunan jembatan dan lain – lain.

Masyarakat Ambon dan pulau-pulau Lease terdiri dari, menurut tempat asal dan urutan kedatangannya terbagi menjadi 5 (Lima) tahapan, yaitu :

- Kelompok ” *fam* ” / marga – Tuni, yang berasal dari Pulau Seram dan sekitarnya.
- Kelompok ” *fam* ” / marga – Wakan, yang berasal dari kepulauan Banda dan Kei, Daerah Bagian Selatan dan Tenggara.
- Kelompok ” *fam* ” / marga – Moni, yang berasal dari ” *daerah Utara* ”, seperti Pulau Halmahera, Pulau Ternate. Ada juga yang berasal dari kepulauan Sula, daerah Timur bagian Papua dan negeri Rohomoni Pulau Haruku.
- Kelompok ” *fam* ” / marga – Mahu, yang berasal dari ” *daerah Barat* ”, terutama Pulau Jawa, seperti dari Tuban.
- Suku Buton, Bugis, Makassar, Arab dan Tionghoa

Yang memberikan kekayaan budaya yang beraneka ragam budaya dalam bentuk adat-istiadat, kesenian dan budaya tradisional dan bahasa.

#### 3.5.4. Perekonomian

Bidang usaha yang memberikan pemasukan pendapatan terbesar adalah bidang usaha perdagangan, perhotelan dan restoran sebesar 26,07 % dari total Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Dan bidang usaha yang memberikan pemasukan dan belum dikelola secara optimal adalah pertambangan dan bahan galian. Secara keseluruhan pendapatan daerah Kota Ambon pada tahun 1991 berdasarkan harga yang berlaku mencapai 440.638.500,000. Keadaan ini menunjukkan perkembangan yang cukup besar selama periode tahun 1983-1991, yaitu sebesar 254 % atau laju pertumbuhan per tahun rata-rata mencapai 31,86 %, tingkat pendapatan perkapita tahun 1991 sebesar Rp. 132.403 per bulan. Jika dilihat berdasarkan harga konstan pada tahun 1991 sebesar 210.048.369,000. Pada tahun 1998, menurut perhitungan atas dasar harga konstan tahun 1993, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon, sektor-sektor pendapatan memberikan sumbangan sebagai berikut :

- Sektor pertambangan dan galian, 5.063,74 atau sebesar 0,63 %.
- Sektor listrik dan air minum, 10.721,46 atau sebesar 1,34 %.
- Sektor bangunan dan konstruksi, 24.805,15 atau sebesar 3,11 %.
- Sektor industri pengolahan, 52.893 atau sebesar 6,62 %.
- Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 90.622,5 atau sebesar 11,35 %.
- Sektor angkutan dan komunikasi, 107.451,24 atau sebesar 13,46 %.
- Sektor jasa-jasa, 153.078,70 % atau sebesar 19,17 %.
- Sektor perdagangan, hotel dan restoran, 153.325,79 atau sebesar 19,20 %.
- Sektor pertanian 200.519,84 atau sebesar 25,11 %.

Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 1998, adalah sebesar 798.431,070, angka ini menunjukkan penurunan - 7,33 % dibandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 1997 sebesar 861.610,080, seperti tabel.III.9. dan tabel.III.10., berikut :

**TABEL.III.9. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA AMBON ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU  
TAHUN 1983 - 1991 (RIBUAN RUPIAH).**

No.	Sektor	Tahun									
		1983 (3)	1984 (4)	1985 (5)	1986 (6)	1987 (7)	1988 (8)	1989 (9)	1990 (10)	1991 (11)	
1.	Pertanian	23.381.160	27.019.698	29.349.003	29.821.645	29.732.785	31.130.582	35.376.894	56.272.269	89.810.575	
2.	Pertambangan dan Galian	1.981.008	2.317.557	3.343.955	2.743.280	1.975.823	2.340.751	1.532.494	2.427.733	3.553.461	
3.	Industri Pengolahan	2.209.645	3.630.795	6.079.335	8.749.339	14.309.024	16.679.737	23.482.513	28.660.236	30.975.895	
4.	Listrik dan Air Minum	1.510.916	1.859.459	2.163.727	2.485.012	2.741.339	3.053.979	3.374.470	4.603.241	5.187.323	
5.	Bangunan/Konstruksi	9.331.204	10.890.626	15.747.925	13.184.777	9.255.912	11.250.139	7.365.489	13.021.119	29.990.728	
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	31.572.566	37.019.837	35.760.614	45.103.018	60.139.953	66.769.838	83.290.585	100.340.767	114.892.840	
7.	Angkutan dan Komunikasi	15.036.163	16.095.014	16.842.501	19.131.569	21.915.356	23.236.887	26.298.878	34.707.085	41.635.338	
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	35.871.779	43.902.692	52.270.368	56.481.345	66.531.026	111.474.820	97.766.976	121.525.216	117.503.904	
9.	Jasa-jasa	3.283.795	3.428.859	3.691.223	3.993.087	4.416.772	5.236.981	6.044.598	6.586.760	7.300.550	
Jumlah		124.178.236	146.164.537	165.248.651	181.693.072	210.967.990	271.173.714	284.532.897	368.144.426	440.638.500	

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon Tahun 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon Tahun 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon

**TABEL.III.10. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO BERDASARKAN ATAS HARGA YANG BERLAKU  
DAN HARGA KONSTAN TAHUN 1996 - 1998 (RIBU RUPIAH)**

No.	Sektor	Tahun							
		Atas Harga yang Berlaku				Atas Harga Konstan			
		1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1998
1.	Pertanian	172.027,75	211.147,54	356.857,71	156.088,25	176.867,39	200.519,84	(3)	(8)
2.	Pertambangan dan Galian	9.360,70	9.892,04	10.133,65	6.962,34	6.800,62	5.063,74	(7)	(8)
3.	Industri Pengolahan	88.216,82	96.160,74	111.920,26	70.972,53	65.258,31	52.839,65		
4.	Listrik dan Air Minum	14.531,56	15.348,71	20.751,91	9.638,36	10.186,21	10.721,46		
5.	Bangunan/Konstruksi	52.354,91	57.253,48	56.928,37	42.724,75	44.685,91	24.805,15		
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	238.690,25	250.928,74	297.307,54	189.805,23	197.402,11	153.325,79		
7.	Angkutan dan Komunikasi	118.091,21	137.550,78	153.987,07	98.112,41	105.238,22	107.451,24		
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	118.797,35	138.473,80	136.618,36	95.550,73	101.949,98	90.622,50		
9.	Jasa-jasa	174.385,61	198.893,00	246.167,38	145.068,09	153.221,33	153.078,70		
Jumlah		986.456,16	1.115.648,83	1.390.672,25	814.922,69	861.610,08	798.431,07		

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

### 3.5.5. Transportasi Kota

Transportasi yang dimiliki oleh Kota Ambon meliputi transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi darat didukung oleh prasarana jalan yang menghubungkan antar sub kegiatan kota didalam Kota Ambon dan antar desa atau kelurahan yang secara umum telah menjangkau seluruh kota. Sarana transportasi kota telah memiliki moda transport angkutan kota untuk jenis moda yang melayani pusat kota dilayani oleh mini bis, sedangkan untuk angkutan regional (ke Pulau Seram) didukung oleh prasarana penyeberangan Ferry di Desa Liang menggunakan bis yang berukuran sedang.

Panjang jalan di Kota Ambon pada tahun 2000 seluruhnya mencapai panjang 156,15 Kilo meter, dengan rincian jenis permukaan jalan sebagai berikut, diaspal 155,02 (99,28 %) Kilo meter, kerikil 0,65 Kilo meter (0,42 %) dan tanah 0,48 Kilo meter (0,30 %). Kondisi permukaan jalan, bagian terbesar adalah berkondisi baik 119,27 Kilo meter (76,38 %), kondisi sedang 26,5 Kilo meter (16,97 %), kondisi rusak 7,98 Kilo meter (5,11 %) dan rusak berat 2,14 Kilo meter (1,53 %), seperti table.III.11.

**TABEL.III.11. PANJANG JALAN MENURUT KONDISI  
JALAN DI KOTA AMBON, TAHUN 1996 – 2000.**

No.	Kondisi Jalan	Tahun				
		1996	1997	1998	1999	2000
		Km	Km	Km	Km	Km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Baik	228,54	233,69	238,75	100,86	119,27
2.	Sedang	7,86	6,36	5,75	66,84	26,50
3.	Rusak	5,25	2,20	1,78	4,70	7,98
4.	Rusak Berat	2,55	1,95	1,95	2,40	2,40
Jumlah		244,20	244,20	248,23	174,44	156,35

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

Jumlah mobil angkutan penumpang yang melayani penumpang didalam wilayah Kota Ambon sampai dengan tahun 1998, sebanyak 1260 unit, seperti tabel.III.12., berikut :

**TABEL.III.12. JUMLAH BUS ANGKUTAN PENUMPANG  
MENURUT TRAYEK YANG BEROPERASI DALAM  
WILAYAH KOTA AMBON, TAHUN 1996 – 1998**

No.	Trayek yang Dilayani	Jumlah Bus		
		Tahun		
(1)	(2)	1996	1997	1998
1.	Lin I	51	51	48
2.	Lin II	23	24	23
3.	Lin III	107	107	107
4.	Lin IV	1	1	1
5.	Lin V	15	15	17
6.	Batu Merah	40	40	39
7.	Karang Panjang	42	42	44
8.	Ahuru	21	21	26
9.	Soya	7	7	6
10.	Kusu-Kusu	4	4	5
11.	Air Salobar	129	129	126
12.	Kudamati	104	104	104
13.	Benteng Atas	22	22	22
14.	Kramat Jaya/Gunung Nona	7	8	8
15.	Mahia	3	3	3
16.	Taman Makmur	12	12	15
17.	Amahusu	16	16	16
18.	Latuhalat	45	45	44
19.	Air Louw	6	6	6
20.	Serri	4	4	3
21.	Kebun Cengkeh	38	38	35
22.	Tantui	79	78	81
23.	Dermaga Ferry/Galala	86	85	83
24.	Halong Baru	24	24	22
25.	Lateri	13	13	13
26.	Passo/Larier	28	28	29
27.	Batu Gong	30	29	28
28.	Hutumuri	3	3	3
29.	Leahari	3	3	4
30.	Poka – Perumnas	57	56	55
31.	Hunuth	63	63	63
32.	Hative Besar	36	37	36
33.	Laha	12	12	12
34.	Hatalai	2	3	3
35.	Kampung Keranjang	3	3	3
36.	Poka – Laha	18	18	19
37.	Poka – Wayame	19	20	20
38.	Batu Merah Atas	11	11	13
39.	Kayu Putih	7	7	9
40.	Hukurila	1	1	1
41.	I A I N	8	8	11
42.	Kopertis	4	4	6
43.	Halong Atas	5	6	8
44.	Waiheru Dalam	3	3	4
45.	Hative Kecil Atas	10	10	11
46.	Nania Atas	2	2	2
47.	Kilang	1	2	2
48.	Wara Air Kuning	5	6	11
49.	Air Salobar - Galala	2	2	2
50.	Ambon – Bandara	2	2	2
51.	Ema	-	1	2
52.	Naku	-	1	1
53.	Toisapu	-	-	1
Jumlah		1.234	1.240	1.260

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

Transportasi laut di Kota Ambon didukung oleh prasarana pelabuhan dan pergudangan yang mampu melayani angkutan penumpang dan angkutan barang dari

kapal-kapal pelayaran lokal, pelayaran rakyat dan perintis, pelayaran nusantara dan pelayaran samudera. Prasarana pendukung transportasi laut, meliputi, pelabuhan berjumlah 1 (Satu), dermaga beton berjumlah 3 (Tiga ), dermaga kayu berjumlah 1 (Satu) dan pergudangan seluas 14.565 meter persegi ( $m^2$ ), seperti tabel.III.13., berikut :

**TABEL.III.13. BANYAKNYA PELABUHAN, DERMAGA DAN LUAS GUDANG DI KOTA AMBON, TAHUN 1996 – 2000.**

No.	Rincian	Jumlah				
		Tahun				
(1)	(2)	1996	1997	1998	1999	2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelabuhan	1	1	1	1	1
2.	Dermaga Beton	3	3	3	3	3
3.	Dermaga Kayu	1	-	-	-	-
4.	Luas Gudang	14.565	14.565	14.565	14.565	14.565

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon.

Transportasi udara di Kota Ambon didukung oleh prasarana Bandar Udara Pattimura-Laha dengan status Bandar Udara Internasional, berukuran panjang 1.850 meter dan lebar 45 meter, berkonstruksi *hotmix* yang mampu melayani angkutan penumpang dan barang dari penerbangan lokal, penerbangan nusantara dan penerbangan internasional.

### 3.5.6. Perumahan dan Permukiman

Perkembangan perumahan dan permukiman di Kota Ambon cukup pesat terlihat dengan adanya pertumbuhan kawasan permukiman, terutama pada Desa Wayame, Desa Poka, Desa Rumah Tiga, Desa Durian Patah, Desa Passo, Desa Negeri Lama dan beberapa bagian pusat kota pada daerah yang berlereng terjal yang secara teknis kurang memenuhi persyaratan, seperti Desa Batu Merah, sepanjang Sungai Wai Batu Gantung, Wai Batu Gajah, Kelurahan Kudamati dan daerah sekitar lereng Gunung Nona. Menurut hasil revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon Tahun 2005 jumlah rumah yang dibutuhkan sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 77.157 unit rumah dan



kebutuhan ruang 1.774,6 Hekto Are sampai dengan 4.205,2 Hekto Are, seperti tabel. III.14., berikut :

**TABEL.III.14. PERKIRAAN KEBUTUHAN UNIT  
RUMAH DAN RUANG DI KOTA AMBON,  
TAHUN 1995 – 2005**

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Rumah (Unit)				Total
			Villa	Besar	Sedang	Kecil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1995	60.216	6.022	6.022	18.065	30.107	60.216
2.	2000	68.163	6.816	6.816	20.449	34.082	68.163
3.	2005	77.157	7.716	7.716	23.147	38.578	77.157
<b>Kebutuhan Ruang</b>							
1.	1995	60.216	602,2 - 1.505,5	240,9 - 602,2	271,0 - 722,6	271,0 - 451,6	1.385,1 - 3.281,9
2.	2000	68.163	681,6 - 1.704,0	272,6 - 681,6	306,7 - 818,0	306,7 - 511,2	1.567,6 - 3.714,8
3.	2005	77.157	771,6 - 1.929,0	308,6 - 771,6	347,2 - 925,9	347,2 - 578,7	1.774 - 4.205,2

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon Tahun 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon.

### 3.5.7. Fasilitas Umum

#### 3.5.7.1. Sarana Pendidikan

Sampai dengan periode tahun 1997/1998 sarana pendidikan di Kota Ambon, meliputi :

- Taman Kanak-Kanak berjumlah 63 sekolah dan 63 gedung.
- Sekolah Dasar berjumlah 185 sekolah dan 149 gedung.
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 42 sekolah dan 36 gedung.
- Sekolah Menengah Umum berjumlah 34 sekolah dan 28 gedung.
- Sekolah Perawat Kesehatan berjumlah 3 gedung (1998).
- Akademi Perawat dan Program Kebidanan 3 gedung (1998).
- Pendidikan Perguruan Tinggi; Sekolah Tinggi Administrasi Trinitas (STIA Trinitas/swasta), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN/swasta), Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM/swasta), seperti tabel.III.15 berikut :

**TABEL.III.15. BANYAKNYA SEKOLAH DAN GEDUNG, DAN  
PERGURUAN TINGGI, TAHUN 1996/1997-1997/1998.**

No.	Tahun	Sekolah (S) dan Gedung (G)								Perguruan Tinggi			
		TK		SD		SLTP		SMU		STAN	STIA	UKIM	UNPATTI
		S	G	S	G	S	G	S	G				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	1996/1997	63	60	185	137	41	33	33	28	1	1	1	1
2.	1997/1998	63	63	185	149	42	36	34	28	1	1	1	1

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

### 3.5.7.2. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan di Kota Ambon sampai dengan tahun 1998, berjumlah 305 unit, yang meliputi Mesjid 113 unit, Langgar 15 unit, Mussallah 28 unit, Gereja Protestan 127 unit, Gereja Katholik 11 unit, Kapel 6 unit, Pura 1 unit dan Vihara 1 unit, seperti tabel.III.16. berikut :

**TABEL. III.16. BANYAKNYA SARANA PERIBADATAN DI KOTA  
AMBON TAHUN 1996-1998**

No.	Tahun	Sarana Peribadatan (Unit)								Jumlah Total
		Mesjid	Langgar	Mussa lah	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Kapel	Pura	Vihara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	1996	113	15	28	125	11	7	1	1	301
2.	1997	113	15	28	127	11	7	1	1	305
3.	1998	113	15	28	127	11	7	1	1	305

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

### 3.5.7.3. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kota Ambon sampai dengan tahun 1998, meliputi Rumah Sakit/Bersalin (RS/B) 10 (Sepuluh) unit, Balai Pengobatan (BP) 12 (Dua Belas) unit, Puskesmas (P) 17 Unit, Puskemas Pembantu (PP) 32 (Tiga Puluh Dua) Unit, Apotek (A) 21 (Dua Puluh Satu) unit, Depot Obat (DO) 36 (Tiga Puluh Enam) unit, Pedagang Farmasi (PF) 6 (Enam) unit, Tempat Praktek Dokter Umum (TPDU) 38 (Tiga Puluh Delapan) unit, Tempat Praktek Dokter Spesialis (TPDS) 22 (Dua Puluh Dua) unit, Tempat Praktek Dokter Gigi (TPDG) 14 (empat belas) unit, seperti pada tabel.III.17., berikut :

**TABEL.III.17. BANYAKNYA SARANA KESEHATAN DI KOTA AMBON  
TAHUN 1996 – 1998**

No.	Tahun	Sarana Kesehatan (Unit)									
		RS/B	BP	P	PP	A	DO	PF	TPDU	TPDS	TPDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	1996	9	15	17	30	20	22	6	52	16	16
2.	1997	10	10	17	31	20	33	5	57	7	19
3.	1998	10	12	17	32	21	36	6	38	22	14

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon.

### 3.5.8. Sarana Perekonomian

Perkembangan sarana perekonomian, sarana perdagangan, sarana perkantoran dan perbankan cukup baik, terlihat dengan pertambahan jumlah sarana dari tahun ke tahun. Sesuai data tahun 1987 dan 1991 sarana perdagangan; pasar pemerintah berjumlah 23 unit dengan jumlah pedagang yang ditampung 2.107 pedagang dan sarana perdagangan swasta. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyediaan sarana perdagangan dan perbankan. Pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan jangkauan pelayanan dan perawatan terhadap sarana yang ada. Untuk jelasnya Jumlah perusahaan perdagangan seperti tabel.III.18., berikut :

**TABEL.III.18. JUMLAH PERUSAHAAN PERDAGANGAN DI KOTA AMBON  
TAHUN 1987 DAN 1991**

No.	Kota	1987			1991		
		Pedagang Kecil	Pedagang Menengah	Pedagang Besar	Pedagang Kecil	Pedagang Menengah	Pedagang Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Ambon	384	1.976	1.456	3.036	2.076	536

Sumber : Rencana Tata Ruang Kota Ambon Tahun 1993/1994, Pemerintah Kota Ambon

### 3.6. Kondisi Wilayah Kota Ambon Dalam Kerusuhan Sosial

Kerusuhan Sosial yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 memberikan dampak negatif yang luas terhadap Propinsi Maluku meliputi antara lain pemanfaatan guna lahan, kependudukan, perekonomian, transportasi, perumahan dan permukiman, fasilitas pendukung permukiman dan sarana perekonomian. Jumlah perumahan dan

permukiman di Propinsi Maluku berjumlah 52.714 unit. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan pada tahun 1999 adalah sebesar – 29, 11 % dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 1998. Kerusuhan Sosial menyebabkan instabilitas keamanan; masyarakat tidak merasa aman sehingga masyarakat mencari perlindungan ke tempat-tempat yang dianggap aman seperti markas kepolisian, markas militer, bergabung dengan komunitasnya, kondisi ini mengakibatkan terjadinya segregasi wilayah menurut komunitas relatif pada seluruh wilayah Propinsi Maluku. Kota Ambon juga mengalami kondisi yang mirip dengan kondisi di Propinsi Maluku umumnya, masyarakat tersekat-sekat pada desanya atau komunitasnya dan kondisi ini berpengaruh pada implementasi kebijakan perumahan dan permukiman.

#### 3.6.1. Kondisi Guna Lahan

Kerusuhan sosial yang menyebabkan terjadinya segregasi wilayah memberikan pengaruh terhadap perumahan dan permukiman penduduk. Permukiman penduduk cenderung mengikuti segregasi wilayah yang terjadi dan kondisi ini relatif terjadi di seluruh Kota Ambon.

#### 3.6.2. Kependudukan

Kerusuhan sosial mengakibatkan masyarakat yang mengalami kerusuhan dan mengungsi sebesar 89.834 jiwa atau 20.979 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada lokasi penampungan yang meliputi instalasi militer, prasarana pemerintah/swasta, sekolah, tempat ibadah pertokoan, rumah penduduk dan barak yang dibangun pemerintah. Pengungsi yang terdapat di Kota Ambon bukan saja berasal dari Kota Ambon/Pulau Ambon tetapi juga berasal dari Kabupaten Maluku Utara dan Maluku Tengah. Penyediaan barak pengungsi yang dibangun pemerintah terdapat pada 12 (Dua Belas) lokasi yang dapat menampung sebanyak 1.092 Kepala Keluarga (KK) sedangkan yang belum tertampung sebanyak 19.887 Kepala Keluarga (KK). Jumlah masyarakat

yang mengalami kerusuhan sosial yang telah tertangani dalam pemberian BBR + Jadup sebanyak 23.340 jiwa atau 4.668 Kepala Keluarga (KK), sedangkan yang belum tertangani berjumlah sebesar 81.555 jiwa atau 16.311 Kepala Keluarga (KK) seperti tabel.III.19., dibawah ini :

**TABEL.III.19. JUMLAH MASYARAKAT YANG MENGALAMI KERUSUHAN SOSIAL (JMMKS) DI KOTA SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2003**

No.	Kota	Jumlah JMMKS		Telah Tertangani				Belum Tertangani		Bermukim di Barak		Keterangan
		KK	Jiwa	BBR+ Jadup		BBR		KK	Jiwa	Telah Tertangani	Belum Tertangani	
				KK	Jiwa	KK	Jiwa			KK	KK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Ambon	20.979	89.834	4.668	23.340	-	-	16.311	81.555	1.092	19.887	

Sumber : Pos Komando Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku, Pemerintah Propinsi Maluku, 2003

### 3.6.3. Sosial Budaya

Kerusuhan sosial mengakibatkan di Kota Ambon terjadi penyebaran penduduk, perumahan dan permukiman prasarana dan sarana dasar kebutuhan masyarakat secara komunitas, kondisi ini menyebabkan Kota Ambon seakan tersekat-sekat didalam wilayah daratan maupun laut (Teluk Ambon) yang mengakibatkan biaya tambahan untuk transportasi. Dampak lain adalah kecenderungan merosotnya wibawa adat-istiadat / tradisi, pranata sosial dan tokoh-tokoh didalam masyarakat. Terdapat 2 (Dua) pandangan tentang posisi adat-istiadat / tradisi :

- Pandangan yang menganggap adat-istiadat / tradisi dapat dijadikan salahsatu pilihan untuk meredakan dan menyelesaikan kerusuhan sosial.
- Pandangan yang cenderung menganggap adat-istiadat / tradisi tidak dapat dijadikan salahsatu pilihan untuk meredakan dan menyelesaikan kerusuhan sosial.

Disamping itu terdapat sikap traumatis psikologis masyarakat, seperti curiga, tidak merasa aman, terputusnya tali silaturahmi yang biasa terjalin.

Kondisi eksisting permukiman masing-masing komunitas saling silang berlapis menyusur sepanjang pantai mengikuti jalan kearah tengah kota, dimana permukiman tiap komunitas relatif homogen. Kondisi ini telah terbentuk puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang membentuk kesatuan permukiman kota, sehingga eksistensinya patut dihargai dan dihormati.

Dampak psikologis pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial akan membekas sebelum hilang sama sekali, masyarakat traumatis dan dapat bereaksi agresif dalam menanggapi hal-hal yang dapat mengingatkannya kembali dengan kerusuhan. Untuk mencegah dan mengeliminirnya perlu pembentukan ruang-ruang interaksi untuk pembauran yang dapat mempererat kebersamaan masyarakat dalam pembangunan fisik dan non-fisik. Upaya – upaya untuk mengatasi kondisi ini dengan berbagai cara, untuk itu dapat ditempuh strategi dan pengembangan ruang interaksi yang meliputi :

- upaya meredakan kerusuhan sosial lewat forum-forum masyarakat dengan mengaktualisasikan kembali adat.
- upaya pemerintah lewat peningkatan status keamanan menjadi darurat sipil dan lewat perjanjian Malino II yang kesemuanya untuk menyelesaikan kerusuhan sosial secara proposional.
- Sosialisasi rekonsiliasi antar kelompok yang bertikai sehingga masing-masing pihak dapat melupakan kerusuhan dan berusaha membangun kebersamaan untuk dapat membangun kembali kota Ambon.
- Mengembangkan ruang interaksi yang dimanfaatkan bersama sebagai sarana kegiatan bersama, olahraga dan berekreasi.
- Pembangunan dan pengembangan permukiman yang heterogen untuk menghilangkan batas-batas psikologis yang mendorong pembauran

Kondisi Kota Ambon berangsur membaik memasuki tahun 2003 dengan upaya-upaya dan strategi yang dilaksanakan, terjalinnya tali silaturahmi, transportasi telah dapat melalui seluruh wilayah daratan dan laut di Pulau Ambon, masyarakat sudah dapat merasa aman berpergian ke tempat pelayanan publik, penggunaan prasarana dan sarana pelayanan publik secara bersama.

#### 3.6.4. Perekonomian

Kerusuhan sosial mengakibatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon mengalami penurunan yang drastis sebesar - 29,11 % pada tahun 1999.

Penurunan sektor pendapatan adalah sebagai berikut :

- Sektor bangunan dan konstruksi, sebesar - 92,66 %.
- Sektor Pertambangan dan galian, sebesar - 87,92 %.
- Sektor Industri Pengolahan, sebesar - 63,35 %.
- Sektor Perdagangan dan perhotelan, sebesar - 58,23 %.
- Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sebesar - 28,65 %.
- Sektor Angkutan dan Komunikasi, sebesar - 18,60 %.
- Sektor Pertanian, sebesar - 18,42 %.
- Sektor Listrik dan Air Minum, sebesar - 15,65 %.
- Sektor Jasa-Jasa, sebesar - 1,05 %.

seperti tabel.III.20., berikut :

**TABEL.III.20. PENURUNAN SEKTOR-SEKTOR PENDAPATAN  
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB) KOTA AMBON TAHUN 1999  
ATAS HARGA KONSTAN**

No.	Uraian	Tahun		Penurunan	Keterangan
		1998	1999		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian	200.519,39	163.581	- 18,42 %	
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.063	611,750	- 87,92 %	
3.	Industri Pengolahan	52.893,65	19.368,18	- 63,35 %	
4.	Listrik dan Air Minum	10.724,46	9.043,57	- 15,65 %	
5.	Bangunan / Konstruksi	24.805,15	1.821,22	- 92,66 %	

6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	153.325,79	64.044,07	- 58,23 %	
7.	Angkutan dan Komunikasi	107.451	87.460,49	- 18,60 %	
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	990.622,50	64.655,85	- 28,65 %	
9.	Jasa-Jasa	153.078,70	151.477,06	- 1,05 %	
	Jumlah	798.431,07	562.064,02	- 29,11 %	

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

#### 3.6.4.1. Sektor Perdagangan dan Jasa

Menurut catatan BPS tahun 2002 kegiatan perdagangan kota Ambon terdiri dari pedagang kecil sebanyak 1.122 pedagang, pedagang menengah sebanyak 43 pedagang dan pedagang besar 5 pedagang atau total ijin usaha yang dikeluarkan pemerintah Kota Ambon berjumlah 1,241 ijin, sektor perdagangan memberikan sumbangan 26,17 %. Kegiatan jasa keuangan khususnya perbankan belum menunjukkan transaksi keuangan yang berarti, kegiatan jasa yang cukup menonjol adalah pegadaian yang memiliki nasabah dan jumlah peredaran uang yang cukup besar. Secara keseluruhan kegiatan di sektor ini belum mampu memacu pertumbuhan ekonomi. PDRB Kota Ambon tahun 2002 masih menunjukkan angka negatif untuk itu pemerintah kota harus proaktif menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi kota melalui kegiatan mediasi, fasilitator, promosi dan dukungan kebijakan serta adanya jaminan keamanan dan stabilitas di Kota Ambon.

#### 3.6.4.2. Sektor Pariwisata

Obyek wisata bahari memiliki potensi yang cukup besar disamping obyek wisata sejarah. Obyek wisata bahari seperti Pantai Natsepa, Pantai Namalatu, Pantai Hukurila dan lainnya. Fasilitas penunjang sektor ini seperti perhotelan, perhubungan udara, perhubungan darat, fasilitas perbankan, telekomunikasi dan teknologi informasi sudah cukup tersedia tetapi masih perlu peningkatan. Disamping itu faktor keamanan dan stabilitas di Kota Ambon juga merupakan persyaratan bagi sektor ini. Sektor ini cukup memberikan kontribusinya bagi kegiatan kota.



#### 3.6.4.3. Sektor Industri

Kegiatan industri kecil cukup banyak menyerap tenaga kerja. Jenis industri kecil yang ada antara lain adalah, industri makanan, pengolahan ikan, kerajinan tangan, sedangkan industri besar seperti industri plywood kondisinya belum membaik. Kegiatan industri ini berlokasi di kawasan Passo.

#### 3.6.4.4. Sektor Perikanan

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kota Ambon, tetapi potensi ini belum secara optimal dimanfaatkan. Potensi pada kawasan Hutumuri sampai dengan Kawasan Latuhalat merupakan kawasan potesil untuk menjadi kawasan pengelolaan perikanan di Kota Ambon.

#### 3.6.4.5. Sektor Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Kota Ambon. Pertanian rakyat menghasilkan tanaman hortikultura seperti, Jagung, Kacang Tanah, Ubi, Singkong, Sayur-sayuran, Buah-buahan dan lainnya. Pertanian diusahakan dengan mengolah tanah kering yang ada, hasil pertanian ini dikonsumsi oleh masyarakat Kota Ambon. Sektor peternakan belum memberikan kontribusi bagi Kota Ambon karena ternak banyak dimasukan ke Kota Ambon.

#### 3.6.5. Transportasi

Kerusuhan sosial menyebabkan transportasi kota yang melalui darat hanya terjadi didalam segregasi wilayah. Untuk membawa kebutuhan masyarakat menempuh alternatif "transaksi" dimana terjadi penukaran sopir di perbatasan segregasi wilayah dan alternatif lain mobil pengangkut diberi pengawalan oleh pihak keamanan. Transportasi lain adalah melalui laut pada Teluk Dalam Ambon menggunakan speed boat dan memutar Pulau Ambon bila kondisi tidak memungkinkan untuk melalui Teluk

Dalam Ambon. Kondisi ini berangsur membaik dan pada tahun 2003 telah kembali normal.

### 3.6.6. Perumahan dan permukiman

Kerusuhan sosial menyebabkan kerusakan terhadap perumahan dan permukiman yang rusak berjumlah 12.203 unit yang tersebar pada beberapa desa dan kelurahan di Kota Ambon dan jumlah yang belum tertangani sampai dengan penanganan akhir Tahun 2003 sebesar 4.553 unit, seperti pada tabel.III.21., berikut :

**TABEL.III.21. PERUMAHAN YANG BELUM TERTANGANI PASCA KERUSUHAN SOSIAL**

No.	Prasarana dan sarana	Jumlah Unit Yang Belum Tertangani	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perumahan	7.650	Tersebar pada Desa dan Kelurahan

Sumber : Pemerintah Kota Ambon dan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku, 2003

### 3.6.7. Fasilitas Pendukung Permukiman

Kerusakan yang terjadi pada saat kerusuhan sosial, meliputi antara lain sarana pendidikan terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) 15 Unit, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI) 8 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs) 7 Unit, Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMU/SMK/MA) 8 Unit, Universitas Pattimura 1 unit dan Universitas Kristen Indonesia Maluku 1 unit, sarana peribadatan terdiri dari Mesjid 70 unit, Mushola 9 unit, Langgar 4 unit dan Gereja 50 unit, sarana kesehatan terdiri dari Puskesmas (P) 2 unit, Puskesmas Pembantu (PP) 6 unit, Rumah Dinas Para Medis (RDPM) 4 unit dan Rumah Sakit (RS) 2 unit, seperti pada tabel.III.22., berikut :

**TABEL.III.22. FASILITAS PENDUKUNG PERMUKIMAN YANG  
RUSAK DALAM KERUSUHAN SOSIAL**

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah Unit Yang Rusak	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.	TK	15	
2.	SD/MI	38	
3.	SLTP/MTs	7	
4.	SMU/SMK/MA	8	
5.	UNPATTI	1	
6.	UKIM	1	
<b>II.</b>	<b>Peribadatan</b>		
1.	Mesjid	70	
2.	Mushola	9	
3.	Langgar	4	
4.	Gereja	50	
<b>III.</b>	<b>Kesehatan</b>		
1.	P	2	
2.	PP	6	
3.	RDPm	4	
4.	RS	2	

Sumber : Pemerintah Kota Ambon

### 3.6.8. Sarana Perekonomian

Jumlah sarana perekonomian yang mengalami kerusakan pada saat kerusuhan sosial, meliputi Pasar (Psr) 7 unit dan Toko/Kios (Tk/K) 370 unit, Bank (Bnk) 3 unit, Hotel (H) 5 unit dan Bioskop (B) 1 unit, seperti pada tabel.III.23., berikut :

**TABEL.III.23. SARANA PEREKONOMIAN YANG RUSAK DALAM  
KERUSUHAN SOSIAL**

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah Unit Yang Rusak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Psr	7	
2.	Tk/K	370	
3.	Bnk	3	
4.	H	5	
5.	B	1	

Sumber : Pemerintah Kota Ambon

### 3.6.9. Kendala-Kendala Dalam Kerusuhan Sosial Untuk Implementasi Kebijakan Perumahan dan Permukiman

Kerusuhan sosial mengakibatkan perlu pemanfaatan yang efektif terhadap waktu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perumahan dan permukiman karena situasi

mudah berubah. Kendala dalam kerusuhan sosial terhadap pelaksanaan kegiatan, meliputi antara lain :

- Kelembagaan

Situasi dan kondisi yang mudah berubah menyebabkan terhambatnya koordinasi antar instansi terkait, yang mengakibatkan tidak sinkronnya data pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan penanganan permasalahan kerusuhan sosial secara masing-masing sektor, sehingga dibentuk pos komando penanganan terhadap masalah kerusuhan sosial yang berkedudukan di Kantor Gubernur.

- Lokasi

Untuk menempatkan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial memerlukan lahan yang memadai, dalam kondisi segregasi wilayah dipilih lokasi-lokasi yang memungkinkan sesuai situasi dan kondisi.

- Situasi keamanan

Situasi yang mudah berubah menyebabkan sering terhambatnya koordinasi yang cepat untuk mengatasi permasalahan di lapangan, distribusi bahan dan pelaksanaan kegiatan ini.

- Transportasi

Situasi yang mudah berubah membuat distribusi bahan ke lokasi kegiatan sering terhambat. Untuk transportasi melalui darat alternatif yang digunakan dengan cara "transaksi" dengan penukaran sopir di perbatasan segregasi wilayah atau pengawasan oleh pihak keamanan. Untuk transportasi melalui laut bahan yang akan di distribusikan menggunakan areal yang memungkinkan, seperti daerah-daerah yang relatif aman dan markas militer sebagai lokasi penumpukan bahan yang akan di distribusikan menggunakan transportasi darat.

- **Bahan**

Kebutuhan pembangunan perumahan dalam jumlah yang banyak memerlukan pemenuhan jumlah bahan yang banyak pula, menyebabkan pemenuhannya dalam waktu yang singkat mengalami hambatan, dimana kawasan perdagangan yang menyediakan bahan juga mengalami kerusakan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan perumahan ditempuh dengan pendekatan memanfaatkan pasar yang masih ada dan mencari langsung ke sumber bahan.

### **3.7. Implementasi Kebijakan Perumahan dan Permukiman di Kota Ambon**

Masalah-masalah perumahan dan permukiman didalam kerusuhan sosial, meliputi penanganan yang segera terhadap masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial ditempatkan pada tempat penampungan sementara, seperti markas kepolisian, markas militer, sekolah, kantor, rumah penduduk dan gudang-gudang milik perusahaan penanganan selanjutnya menempatkan pada barak pengungsian. Penanganan simultan lain adalah rehabilitasi / rekonstruksi terhadap rumah yang dimiliki oleh masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial, situasi didalam kerusuhan sosial yang mudah berubah membuat penanganan cara ini kurang berhasil karena mengalami kerusakan akibat kerusuhan sosial. Alternatif lain penanganan perumahan dan permukiman berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat dan wilayah Kota Ambon ditempuh kebijakan relokasi, seperti Dusun Benteng Karang, Desa Hila, Dusun OSM dan Dusun Wara. Masalah-masalah yang belum optimal tertangani dengan kebijakan perumahan dan permukiman adalah masyarakat yang mengalami kerusuhan tidak seluruhnya tertampung pada barak pengungsian dan menempati rumah-rumah yang rusak akibat kerusuhan sosial, pertokoan, gudang, sekolah, bekas peternakan dan sebahagian masih menempati kantor.

### 3.7.1. Permasalahan Perumahan dan Permukiman

Masalah perumahan dan permukiman akibat kerusakan sosial meliputi tanggap darurat dengan penyediaan barak pengungsian yang berjumlah 70 unit, rehabilitasi / rekonstruksi yang berjumlah 4533 unit sampai Tahun Anggaran 2003, termasuk relokasi 1881 unit dan permukiman kembali ke lokasi asal, seperti dari Desa Wai pada bulan Oktober 2003, dan Poka – Rumahtiga dalam proses.

### 3.7.2. Pendekatan Penanganan

Untuk menangani permasalahan perumahan dan permukiman di Propinsi Maluku menggunakan pendekatan yang digunakan secara nasional, sebagai berikut :

- Tanggap darurat

Masyarakat yang mengalami kerusakan sosial sementara ditempatkan pada lokasi penempatan sementara yang kemudian secara bertahap dipindahkan ke lokasi barak pengungsian dengan prioritas kepada yang menempati kantor, sekolah, perumahan penduduk.

- Rehabilitasi / Rekonstruksi

Untuk pelaksanaannya pendekatan ini diprioritaskan kepada lokasi yang situasi dan kondisinya cukup kondusif . Dalam pelaksanaannya dibangun rumah sederhana sehat setara Type-21

- Relokasi

Pendekatan ini adalah alternatif yang diambil berdasarkan situasi dan kondisi keamanan wilayah Kota Ambon, segregasi wilayah yang terjadi, kebutuhan perumahan dari masyarakat yang mengalami kerusakan sosial dan keinginan dari masyarakat yang mengalami kerusakan sosial dan lokasi yang memadai. Dalam pelaksanaannya dibangun rumah sederhana sehat Type-30.

- Permukiman Kembali ke Lokasi Semula

Pendekatan ini adalah alternatif yang diambil berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada proses rekonsiliasi dan perkembangan situasi dan kondisi wilayah kota yang kondusif dan keinginan dari masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial untuk kembali ke lokasi Desanya.

Pendekatan berdasarkan situasi dan kondisi di Kota Ambon, terbagi dalam 4 (Empat) periode :

- Periode I, antara saat terjadi kerusuhan sosial 19 Januari 1999 sampai dengan diberlakukan Status Darurat Sipil tanggal 25 Juli 2000, merupakan penanganan pemerintah pusat melalui proyek penanggulangan darurat PSD – CK akibat bencana alam dan kerusuhan sosial, yang berasal dari dana APBN. Pelaksanaan kegiatan ini Dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat masyarakat dengan didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ABRI lewat kegiatan bhakti ABRI.
- Periode II, antara mulai diberlakukan Status Darurat Sipil tanggal 25 Juli 2000 sampai dengan Perjanjian Malino II tanggal 12 Februari 2002. Pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi perumahan penduduk dan prasarana dan sarana akibat kerusuhan sosial melalui proyek rehabilitasi / rekonstruksi perumahan penduduk dampak kerusuhan dan proyek peningkatan lapangan kerja produktif padat karya sektor Pekerjaan Umum dengan dana yang berasal dari dana *sharing* APBN dan APBD.
- Periode III, antara Perjanjian Malino II tanggal 12 Februari 2002 sampai dengan akhir tahun anggaran 2002. Pelaksanaan rehabilitasi / rekonstruksi perumahan penduduk dan prasarana dan sarana akibat kerusuhan dengan tujuan untuk menunjang hasil Perjanjian Malino II diadakan Revisi terhadap dana APBN Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, sehingga proyek-proyek dibidang

Jalan dan Irigasi di alokasikan untuk menangani rehabilitasi / rekonstruksi perumahan penduduk. Pada periode ini terdapat 3 (Tiga) pola penanganan penanganan; pemulangan pengungsi dengan *leading sector* Dinas Sosial, pola pemberdayaan dengan *leading sector* Dinas Nakertrans dan pola Relokasi dengan *leading sector* Dinas Pekerjaan Umum- Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- Periode IV, periode yang mulai berlaku sejak tahun anggaran 2003 hingga kini, pada periode ini Dinas Pekerjaan umum Propinsi Maluku yang semula membangun rumah dirubah dengan pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan upah kerja yang disesuaikan dengan pendekatan secara umum pola pemerintah pusat.

### 3.7.3. Kondisi Dusun Benteng Karang yang Mengalami Kerusakan

Dusun Benteng Karang merupakan bagian dari Desa Hitumesing adalah binaan dari Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dusun Benteng Karang termasuk dalam wilayah administrasinya. Dusun Benteng Karang adalah salahsatu dari 4 (Empat) Dusun / Desa yang mengalami relokasi di Kota Ambon.

#### 3.7.3.1. Letak Dusun Benteng Karang.

Dusun Benteng Karang terletak diantara Desa Hunuth / Durian Patah dan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang berjarak 5 Kilometer dari ibukota Kecamatan, luas Dusun Benteng Karang 50 Hekto Are untuk lahan pertanian dan 2 Hekto Are untuk perumahan dan permukiman.

#### 3.7.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Dusun Benteng Karang berjumlah 336 KK.

#### 3.7.3.3. Mata Pencanharian

Mata Pencanharian Penduduk di Desa Benteng Karang, terutama bertani ladang / kebun, dengan komposisi yang bekerja sebagai petani 85 %, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 5 % dan bekerja di sektor informal lain sebesar 10 %.



#### 3.7.3.4. Transportasi

Desa ini terletak pada jalur transportasi darat yang menghubungkan Desa Hunuth / Durian Patah dan Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Transportasi darat umumnya terlayani dengan memanfaatkan trayek angkutan umum pada jalur transportasi antara Desa Hunuth / Durian Patah.

#### 3.7.4. Relokasi di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

##### A. Kecamatan Teluk Ambon Baguala

##### 1. Kondisi Fisik Wilayah

Kecamatan Teluk Ambon Baguala merupakan salahsatu dari 3 (Tiga) Kecamatan di Kota Ambon dengan luas 158,79 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (Enam Belas) desa dan 2 (Dua) kelurahan , yaitu :

- Desa Passo sebagai ibukota kecamatan.
- Desa Negeri Lama, yang berjarak 1,5 Kilo meter.
- Desa Nania, yang berjarak 2 Kilo meter.
- Desa Waiheru, yang berjarak 5 Kilo meter.
- Desa Hunuth / Durian Patah, yang berjarak 7 Kilo meter.
- Desa Hutumuri, yang berjarak 15 Kilo meter.
- Desa Rutong, yang berjarak 16 Kilo meter.
- Desa Leahari, yang berjarak 17 Kilo meter.
- Kelurahan Lateri, yang berjarak 3 Kilo meter.
- Desa Latta, yang berjarak 4 Kilo meter.
- Desa Halong, yang berjarak 5 Kilo meter.
- Desa Rumah Tiga, yang berjarak 12 Kilo meter.
- Desa Poka, yang berjarak 11 Kilo meter.
- Kelurahan Tihu, yang berjarak 11 Kilo meter.

- Desa Wayame, yang berjarak 16 Kilo meter.
- Desa Laha, yang berjarak 24 Kilo meter
- Desa Tawiri, yang berjarak 23,5 Kilo meter.
- Desa Hatiwe Besar, yang berjarak 18 Kilo meter.

Di dalam lokasi pengelompokan wilayah pengembangan lahan budidaya non-pertanian Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, merupakan 4 (Empat) lokasi pengelompokan dari 7 (Tujuh) lokasi pengelompokan wilayah pengembangan lahan budidaya non-pertanian di Kota Ambon. Pengelompokan wilayah tersebut, sebagai berikut :

- Lokasi Passo dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^0$ , seluas 14,75 Km<sup>2</sup> atau seluas 4,74 %.
- Lokasi Hutumuri dan sekitarnya dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $6^0 16'$ , seluas 4,25 Km<sup>2</sup> atau seluas 9,7 %.
- Lokasi Rumah Tiga dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^0 18'$ , seluas 4,5 Km<sup>2</sup> atau seluas 5,57 %.
- Lokasi Laha dan sekitarnya, dengan areal ketinggian 0-50 m dan kemiringan rata-rata  $3^0 33'$ , seluas 4,25 Km<sup>2</sup> atau seluas 6,18 %.

Seperti tabel.III.24., berikut :

**TABEL.III.24. LOKASI PENGELOMPOKAN WILAYAH  
PENGEMBANGAN LAHAN BUDIDAYA NON-PERTANIAN  
DI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA**

No.	Lokasi	Area		Luas (Km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
		Ketinggian (m)	Kemiringan ( <sup>0</sup> )		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rumah Tiga dan sekitarnya	0 – 50	$3^0 18'$	4,50	5,57
2.	Passo dan sekitarnya	0 – 50	$3^0$	14,75	4,74
3.	Laha dan sekitarnya	0 – 50	$3^0 33'$	4,25	6,18
4.	Hutumuri dan sekitarnya	0 – 50	$6^0 16'$	4,25	9,70

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Ambon Baguala berjumlah adalah sebesar 79.007 jiwa atau 28,64 % dari jumlah penduduk Kota Ambon . Jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah sebesar 59.690 jiwa atau sebesar 75,55 % dari jumlah penduduk dan penduduk yang tidak termasuk usia kerja adalah sebesar 19.317 jiwa atau sebesar 24,45 % dari jumlah penduduk seperti tabel.III.25., berikut :

**TABEL.III.25. PENDUDUK BERUSIA KERJA DAN BELUM BERUSIA KERJA DI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, TAHUN 1990.**

No.	Kecamatan	Berusia Kerja			Berusia Kerja			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Teluk Ambon Baguala	30.850	28.840	59.690	10.199	9.118	19.317	79.007

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon.

## 3. Jumlah Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan Sosial di Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Jumlah Pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial di Kecamatan Teluk Ambon yang mengalami relokasi dan *resettlement* sampai dengan periode Bulan Mei Tahun 2004 sesuai dengan rekomendasi Walikota Kota Ambon, yang mengalami relokasi berjumlah sebesar 1868 Kepala Keluarga (KK) dan mengalami *resettlement* berjumlah sebesar 8121 Kepala keluarga (KK) yang tersebar pada desa-desa di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Salahutu (Kabupaten Maluku Tengah), seperti pada tabel.III.26., berikut :

**TABEL.III.26. PENGUNGS/MASYARAKAT YANG MENGALAMI  
RELOKASI DAN RESETLEMENT DI KECAMATAN TELUK  
AMBON BAGUALA SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2004**

No.	Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Relokasi Jumlah (KK)	Resettlement Jumlah (KK)	Tahun Rekomendasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Passo		33	2002	Pengungsi/Masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial tersebar pada desa- desa di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Salahutu
		560		2003	
			1372	2004	
2.	Laha		97	2003	
3.	Rumah Tiga		2361	2003	
4.	Tawiri		84	2003	
		128		2003	
5.	Hatiwe Besar		353	2003	
6.	Wayame		80	2003	
7.	Poka		607	2002	
			1100	2003	
			211	2004	
		103		2003	
8.	Tihu		118	2002	
			570	2003	
		150		2003	
9.	Waiheru		627	2003	
		217		2003	
10.	Hunuth/Durian Patah		176	2003	
		7		2003	
11.	Halong		147	2003	
		361		2003	
12.	Latta		185	2003	
13.	Lateri	91		2003	
14.	Hutumuri	213		2003	
15.	Rutong	38		2003	
	Jumlah	1868	8121		

Sumber : Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon Baguala, 2004

#### 4. Perekonomian

Perekonomian Kecamatan ini didukung oleh sektor pertanian (perkebunan, perikanan dan peternakan) yang memberikan sumbangan sebesar 23,83 %, sektor Jasa memberikan sumbangan sebesar 16,56 % dan sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 15,32 % dan sektor lainnya memberikan sumbangan sebesar 44,29 %. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan ini pada tahun 1999 mengalami penurunan -24,13 % dan pada tahun 2000 mengalami penurunan -19,37 % dibandingkan Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998, seperti pada tabel.III.27., berikut :

**TABEL.III.27. PENURUNAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB) KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA TAHUN 1999-2000  
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU**

No.	Lapangan Usaha	Tahun			Keterangan
		1998	1999	2000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian	91.004,21	83.952,35	89.937,14	
2.	Pertambangan dan Penggalan	5.777,12	715,49	726,42	
3.	Industri Pengolahan	69.169,47	25.177,44	17.293,71	
4.	Listrik dan Air Minum	7.970,44	8.009,09	6.635,83	
5.	Bangunan/Konstruksi	14.583,71	1.671,15	2.421,12	
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	56.139,24	42.154,53	49.389,24	
7.	Angkutan dan Komunikasi	49.830,47	45.357,09	54.762,42	
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	27.320,11	20.273,26	18.076,24	
9.	Jasa-Jasa	57.326,95	60.307,05	66.449,27	
	<b>Jumlah</b>	<b>379.121,70</b>	<b>287.617,46</b>	<b>305.691,39</b>	
	<b>Penurunan</b>		<b>- 24,13 %</b>	<b>- 19,37 %</b>	

Sumber : Kecamatan Teluk Ambon Baguala Dalam Angka 2001, Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2001

## 5. Transportasi

Transportasi yang terdapat di Kecamatan Teluk Ambon Baguala adalah transportasi darat dan transportasi laut, transportasi darat didukung oleh prasarana jalan dan sarana transport yang menghubungkan Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan Kota Ambon, dengan desa dan kelurahan yang merupakan binaan dari Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Jumlah angkutan umum yang melayani Kecamatan ini pada tahun 2000 sebesar 94 minibis yang berarti mengalami penurunan jumlah sebesar 236 minibis dibandingkan pada tahun 1998 berjumlah sebesar 330 minibis. Transportasi laut belum memiliki prasarana dan sarana pelabuhan / dermaga tetapi kelandaian pantainya dimanfaatkan sebagai tempat berlabuh pelayaran rakyat ke pulau-pulau Lease dan Pulau Seram.

## 6. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum yang terdapat di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, meliputi antara lain : sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan.

- Sarana pendidikan di Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari :
  - Taman Kanak-Kanak berjumlah 65 sekolah,
  - Sekolah Dasar 186 sekolah,

- Sekolah Menengah Pertama 44 sekolah,
- Sekolah Menengah Umum 26 sekolah,
- Sekolah Menengah Kejuruan (termasuk Sekolah kejuruan pertanian; Sekolah Pertanian Menengah Atas) 8 sekolah;
- Madrasah Ibtidaiyah 6 sekolah,
- Madrasah Tsanawiyah 4 sekolah,
- Madrasah Aliyah 3 sekolah,
- Perguruan Tinggi 2 perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi, Universitas Pattimura).

Seperti tabel.III.28., berikut :

**TABEL.III.28. SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, TAHUN 1996/1997**

No.	Tahun	Sekolah								Perguruan Tinggi		Keterangan
		TK	SD	SLTP	SMU	SMK	MI	MT	MA	STIA	UNPATTI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	1996/1997	65	186	44	26	8	6	4	9	1	1	

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, Pemerintah Kota Ambon.2000

- Sarana Peribadatan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala terdiri dari :
  - Mesjid 37 unit, Mushallah 1 unit,
  - Gereja Kristen Katolik 4 unit
  - Gereja Kristen Protestan 35 unit
  - Vihara 1 unit

Seperti tabel.III.29., berikut :

**TABEL.III.29. SARANA PERIBADATAN DI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, TAHUN 1998.**

No.	Tahun	Sarana Peribadatan (Unit)					Keterangan
		Mesjid	Mushallah	Gereja Kristen Katholik	Gereja Kristen Protestan	Vihara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1998	37	1	4	35	1	

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon.

- Sarana Kesehatan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala , meliputi :
  - Rumah Sakit Dikelola TNI (RST) 2 rumah sakit ,
  - Puskesmas (P) 6 puskesmas, Puskesmas Pembantu (PP) 10 puskesmas, Posyandu (PY) 55 posyandu,
  - Apotik (A) 2 Apotik, Toko Obat (TO) 3 toko,
  - Tempat Praktek Dokter Umum (TPDU) 7 tempat praktek dan Tempat Praktek Dokter Gigi (TPDG) 3 tempat praktek.

Seperti tabel.III.30., berikut :

**TABEL.III.30. SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, TAHUN 1998**

No.	Tahun	Sarana Kesehatan								Keterangan
		RST	P	PP	PY	A	TO	TPDU	TPDG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	1998	2	6	10	55	2	3	7	3	

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2000, Pemerintah Kota Ambon.

## 7. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, meliputi pasar di Desa Passo, pertokoan di Desa Passo dan Desa Wayame dan industri di Desa Passo / Batu Gong (industri kayu lapis), industri Batako di Desa Passo, industri minyak kelapa dan sabun di Desa Larier dan kegiatan yang bersifat *home industry*, seperti penggergajian kayu, pembuatan mebel, pembuatan konstruksi kayu untuk rumah

dan bengkel. Industri kayu lapis berorientasi ekspor ke luar negeri dan juga melayani kebutuhan pasar dalam negeri.

## B. Desa Passo

### 1. Kondisi Fisik Wilayah

Luas Desa Passo 12, 93 Km<sup>2</sup>, dengan kondisi topografi relatif datar pada bahagian pusat desa yang dimanfaatkan untuk perkantoran, permukiman, pertokoan pertanian, industri dan pelabuhan sedangkan bertopografi relatif terjal dimanfaatkan untuk untuk pengembangan permukiman, perkebunan dan sebagai daerah *cathment area*.

### 2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Passo 2.245 Kepala Keluarga (KK) atau 12.181 jiwa, dengan pekerjaan penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta dan bekerja disektor informal lain seperti petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan dan sejenisnya.

### 3. Jumlah Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan Di Desa Passo

Jumlah pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial yang masih menetap di Desa Passo berjumlah , seperti pada tabel.III.31., berikut :

**TABEL.III.31. JUMLAH PENGUNGSI/MASYARAKAT YANG MENGALAMI KERUSUHAN SOSIAL YANG MASIH MENETAP DI DESA PASSO SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2004**

No.	Daerah Asal Mengungsi	Jumlah Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan	Keterangan
		(KK)	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Ambon	90	Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusakan Sosial tersebar Pada Barak Pengungsian, Gudang, Bekas Peternakan, Rumah Penduduk, Sekolah dan Kantor di Desa Passo
2.	Desa Waiheru/Hunuth/Durian Patah/Nania	311	
3.	Poka	403	
4.	Rumah Tiga	634	
5.	Galala/Hatiwe Kecil/Tanfui	510	
6.	Laha/Hatiwe Besar	12	
7.	Haruku/Saparua (Kabupaten Maluku Tengah)	18	
8.	Banda (Kabupaten Maluku Tengah)	11	



9.	Bula/Kasui/Masohi (Kabupaten Maluku Tengah)	89	
10.	Buru (Kabupaten Maluku Tengah)	210	
Jumlah		2.288	

Sumber : Pemerintah Desa Passo dan Survei, 2004

#### 4. Perekonomian

Perekonomian Desa Passo didukung oleh sektor pertanian (perkebunan, perikanan dan peternakan), pertambangan dan galian, industri pengolahan, Listrik dan Air Minum, Bangunan / Konstruksi, Perdagangan dan Restoran, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

#### 5. Transportasi

Transportasi yang terdapat di Desa Passo meliputi transportasi darat dan transportasi laut. Desa Passo merupakan titik pertemuan jalur transportasi dari dan ke arah Kabupaten Maluku Tengah, titik pertemuan ke arah Bandara dan pusat kota dan kearah Kecamatan Sirimau dari jalur Barat (“ belakang “).

#### 6. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum yang terdapat di Desa Passo, meliputi sarana Pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan.

#### 7. Sarana Perekonomian

Sarana Perekonomian yang terdapat di Desa Passo meliputi Pasar Regional, Pertokoan, Bank, Industri plywood, industri Konstruksi, industri sabun cuci dan industri minyak kelapa.

#### 8. Kedudukan spasial Desa Passo

Kedudukan spasial Desa Passo dalam kebijakan spasial Desa Passo dalam kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Ambon, sebagai berikut :

- Sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon Desa Passo merupakan salahsatu pusat pelayanan sub wilayah pelayanan dari 7 (Tujuh) wilayah pelayanan di Kota


Ambon yang dikembangkan sebagai kawasan industri, permukiman, pendidikan dan perikanan.

### C. Dusun Ama Ory / Kelompok Sasaran.

#### 1. Kondisi Relokasi di Dusun Ama Ory, Desa Passo

Lokasi Permukiman di Dusun Ama Ory terletak di Desa Passo yang berjarak 3,5 Kilo Meter dari Pusat Desa Passo, merupakan daerah bertopografi relatif terjal. Pembangunan permukiman di Dusun Ama Ory, dibiayai oleh pendanaan APBN Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2001. Lokasi tersebut seperti gambar.

III.4., berikut :

PROGRAM PASCA SARJANA JAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	TESIS		SKALA	NO GAMBAR
	EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PASCA KERUSUHAN SOSIAL DI DESA PASSO, KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, KOTA AMBON		1 : 20.000	04
	GAMBAR.III.7. PETA LOKASI SITE	SUMBER : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON DAN SURVEY		

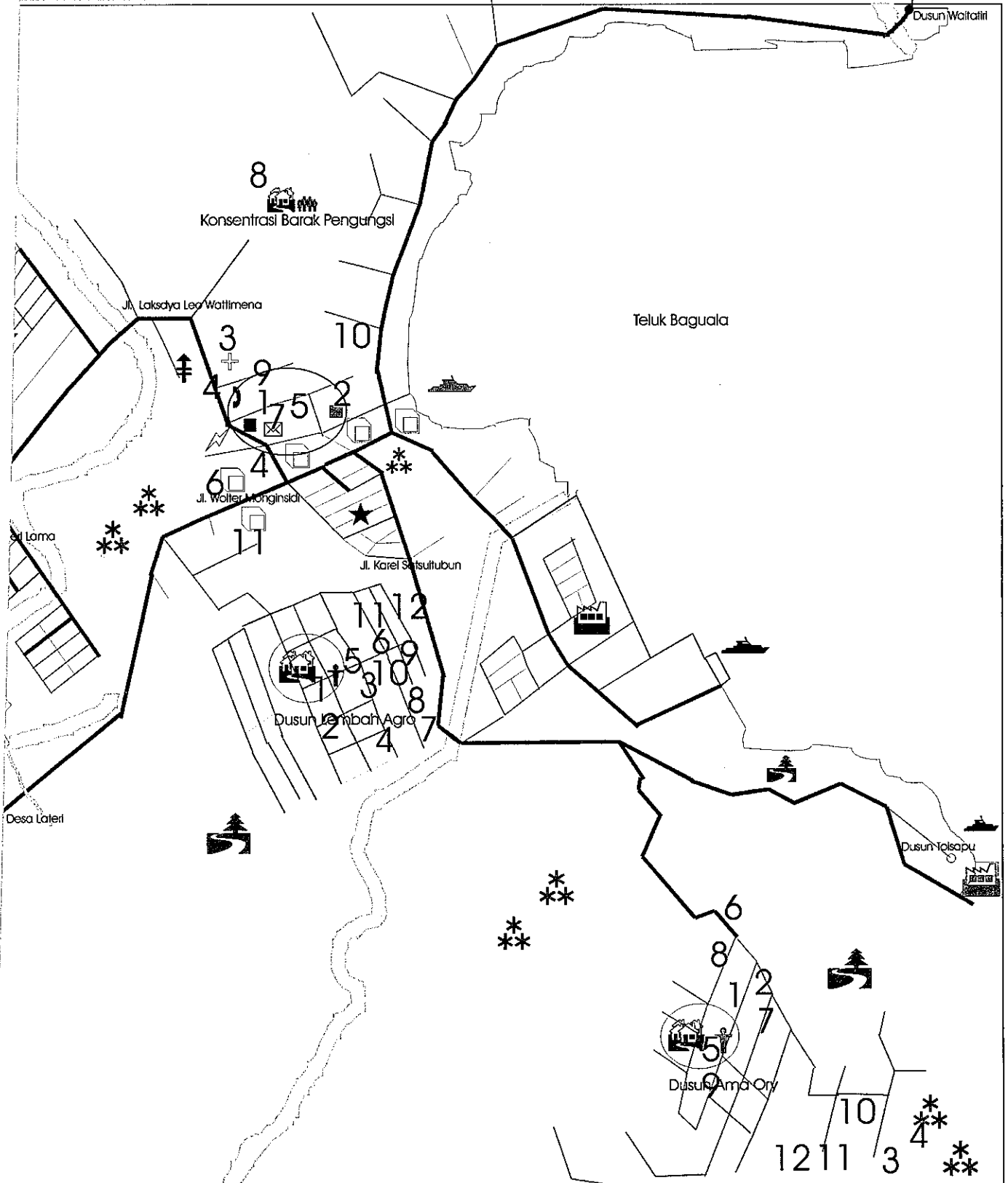
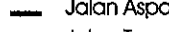
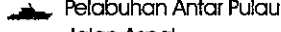
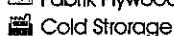
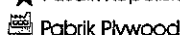
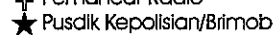
ENDA

antor Kecamatan

antor Desa

usat Pemerintahan di Desa Passo

asar dan Pertokoan



Jumlah pemukim dilokasi ini berjumlah 336 Kepala Keluarga (KK) rata-rata pekerjaan pemukim dahulu sebagai petani ladang / berkebun dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil 5 %, Petani 85 % dan bekerja di sektor informal lain 10 %. Di lokasi ini pekerjaan pemukim sebagai Pegawai Negeri Sipil , Petani dan Pekerja di sektor informal dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil 5 %, Petani 70 % dan pekerja di sektor informal lain 25 %.

Kondisi prasarana dan sarana yang terdapat pada lokasi permukiman ini terdiri dari, rumah setara type 21, jalan penghubung berupa jalan perkerasan yang diaspal, jalan lingkungan berupa jalan setapak dan jalan sirtu, prasarana dan sarana air bersih, sarana pendidikan berupa 3 (Tiga) ruang kelas, bangunan ibadah, lapangan terbuka dan listrik. Relokasi di lokasi ini membutuhkan penyediaan lahan usaha, karena pada saat ini pemukim relokasi telah melewati lahan pemilik tanah yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, selain itu diperlukan trayek angkutan umum yang selama ini dilayani oleh 1 (Satu) kendaraan mikrolet dan ojek motor yang dirasakan cukup memberatkan pengeluaran biaya hidup sehari-hari.

## 2. Kegiatan / Proyek Relokasi Dusun Ama Ory di Desa Passo

- Pembangunan Perumahan
  - Proyek Sarana dan Prasarana Permukiman Maluku  
Tahun Anggaran 2000  
Dana APBN
  - Proyek Pengembangan Perumahan dan Permukiman  
Tahun Anggaran 2001  
Dana APBN
- Pembangunan Prasarana dan Sarana
  - Sekolah

Proyek Bantuan dari Pemerintah Belanda

Tahun Anggaran 2001

Dana APBD

- Rumah Ibadah

Proyek Bantuan dari Pemerintah Belanda

Tahun Anggaran 2001

Dana APBD

- Air Bersih

Proyek Sarana dan Prasarana Permukiman Maluku

Tahun Anggaran 2001

Dana APBN

- Jalan Penghubung

Proyek Bina Marga

Tahun Anggaran 2000

Dana APBN

- Talud/Tembok Penahan Tebing dan Saluran air hujan

Proyek Pengembangan Rumah Pengungsi

Tahun Anggaran 2001

Dana APBD

- Jalan Setapak

Proyek Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Tahun Anggaran 2001

Dana APBN

3. Hasil Kegiatan/Proyek

- Permukiman di Dusun Ama Ory

- Luas Lahan Permukiman 12 Ha
- Luas Lahan Pertanian/Usaha 8 Ha
- Jumlah Rumah 336 Unit
- Prasarana dan Sarana
  - Sekolah 3 (Tiga) ruang kelas
  - Rumah Ibadah 1 (Satu) unit
  - Fasilitas air bersih untuk 336 unit rumah
  - Jalan penghubung lingkungan dengan jalan utama
  - Listrik
  - Talud/Tembok Penahan Tebing
  - Jalan Setapak
  - Saluran Air Hujan
  - Lapangan Terbuka

#### D. Dusun Lembah Agro / Kelompok Kontrol

##### 1. Kondisi Relokasi di Dusun Lembah Agro

Lokasi permukiman Dusun Lembah Agro terletak di Desa Passo yang berjarak 1,5 Km dari pusat Desa Passo, merupakan daerah perbukitan dimana pembangunan rumah memanfaatkan kelerengan yang relatif datar pada daerah perbukitan dan lembah. Pembangunan permukiman di Lembah Agro dibiayai oleh suatu yayasan non-profit yang memberikan stimulan pondasi rumah, rangka bangunan rumah, penutup atap bangunan berupa zink dan WC dan swadaya masyarakat, Luas rumah 36 m<sup>2</sup>. Jumlah pemukim dilokasi ini berjumlah 300 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 215 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Kabupaten Buru, Kecamatan Buru Utara, Kecamatan Buru Utara Timur dan 85 Kepala Keluarga (KK) dari Kota Ambon. Pemukim yang berasal dari Kabupaten Buru dulunya merupakan petani dan yang berasal dari Kota

Ambon bervariasi pekerjaannya. Pekerjaan pemukim di lokasi ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja di sektor informal seperti petani, berjualan kebutuhan sehari-hari, berjualan bakso keliling, berjualan es keliling dan sejenisnya. Kondisi prasarana dan sarana yang terdapat pada lokasi permukiman ini sarana ibadah, sarana kesehatan, fasilitas air bersih, saluran air hujan/air kotor, listrik, jalan setapak dan jalan lingkungan yang masih merupakan jalan tanah yang cukup menyulitkan transportasi pemukim yang berada pada daerah bukit untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Relokasi di lokasi ini membutuhkan bantuan teknis pembangunan dan prasarana dan sarana penunjang seperti jalan lingkungan yang diperkeras, penambahan fasilitas air bersih dan bantuan teknis untuk memelihara kelerengan bukit

## 2. Hasil kegiatan Relokasi Dusun Lembah Agro

- Permukiman di Dusun Lembah Agro
  - Jumlah rumah 300 Unit
  - Status Tanah Hak Pakai
- Prasarana dan Sarana
  - Rumah ibadah
  - Fasilitas air Bersih
  - Listrik
  - Jalan penghubung
  - Jalan Setapak
  - Saluran air hujan/air kotor
  - Lahan usaha atas ijin pemerintah Desa Passo

## E. Tabulasi Hasil Kegiatan di Dusun Ama Ory dan di Dusun Lembah Agro

Tabulasi hasil kegiatan relokasi di Dusun Ama Ory dan Dusun Lembah Agro, Desa Passo seperti pada tabel.III.32., berikut :

**TABEL.III.32. HASIL KEGIATAN DI DUSUN AMA ORY DAN DI  
DUSUN LEMBAH AGRO, DESA PASSO**

No.	Hasil Kegiatan	Dusun Ama Ory	Dusun Lembah Agro	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I.</b>	<b>Pembangunan Rumah</b>			
1.	Rumah	336 unit (Rumah permanen, Luas lahan permukiman 12 Ha dan luas lahan untuk pertanian 8 Ha)	300 unit (Stimulan rumah berupa pondasi rumah, rangka bangunan rumah dan penutup atap berupa zink dan status tanah hak pakai)	
<b>II.</b>	<b>Prasarana dan sarana</b>			
1.	Sekolah	3 ruang	-	
2.	Rumah Ibadah	1 unit	1 unit	
3.	Prasarana dan sarana Air Bersih	336 unit	2 unit pompa air	
4.	Balai Pengobatan	-	1 unit	
5.	Jalan Penghubung Lingkungan	Jalan Aspal	Jalan Tanah	
6.	Jalan setapak	Ada	Ada	
7.	Talud	Ada	-	
8.	Saluran Air Hujan/Air Kotor	Ada	Ada	
9.	Lapangan Terbuka	Ada	-	
10.	Sarana Pemakaman	Ada	-	

Sumber : Hasil Survey Lapangan



## BAB. IV.

### ANALISIS PROSES RELOKASI

#### 4.1. Analisis Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran), Desa Passo

Kebijakan relokasi yang diimplementasikan merupakan penerjemahan dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan relokasi. Dalam implementasi kebijakan ini merupakan penjelasan tentang pelaksana, target dan lingkup kebijakan, kelompok sasaran, sistem manajemen kebijakan, pembiayaan dan kinerja kebijakan.

Kebijakan relokasi yang diimplementasikan bersifat *non-self executing* yang melibatkan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan masyarakat dalam implementasinya, Islamy (2002 :106), baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penanggung jawab kebijakan relokasi ini adalah lembaga eksekutif dalam hal ini Departemen Kimpraswil dengan perwakilannya di daerah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku.

Kebijakan relokasi yang diimplementasikan di katagorikan sebagai kebijakan *redistributive* yaitu kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan, Islamy (2002 :103), yang merupakan suatu tindakan sebagai pilihan terakhir dalam pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial.

Adapun Hirarki kebijakan ini, sebagai berikut :

##### a. Tingkat Pusat

1. Keputusan Menteri Kimpraswil Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan Tahun 1999.
2. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B.287/PBP/X/01 Tentang BAKORNAS.

b. Tingkat Daerah

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 117 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja SATKORLAK PBP Maluku dan Kabupaten/Kota.
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pengungsi/ Masyarakat yang Mengalami kerusakan Sosial Propinsi Maluku.
3. Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 1999/2000-2003 oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku.

Yang bertujuan untuk penanganan terhadap masyarakat yang mengalami kerusakan sosial pada masalah perumahan dan permukiman khususnya masalah relokasi. Pada tingkat Departemen, kebijakan yang diimplementasikan dengan memperhatikan segala ketentuan proses administrasi sebagai wujud implementasi dan pengendalian kebijakan yang berlaku seperti memperhatikan :

- a. Organisasi Administrasi seperti struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab.
- b. Politik Administrasi; dimana suatu kebijakan memerlukan dukungan berbagai aspek politik dalam pelaksanaan administrasi, dengan mengacu pada :
  - Peraturan Perundangan Terkait, Prosedur dan Tata Laksana
  - Peraturan dan Kewenangan Pimpinan Departemen Kimpraswil
  - Pengawasan oleh lembaga legislatif
  - Badan Peradilan
  - Departemen lain yang terkait
  - Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota
  - *Interest Group*
  - Partai Politik
- c. *Administrasi Policy Making* merupakan kebijakan pelaksanaan yang meliputi antara lain :

- Pembuatan aturan main (juklak/juknis)
- Ajudikasi
- *Law enforcement*
- *Program Operation*

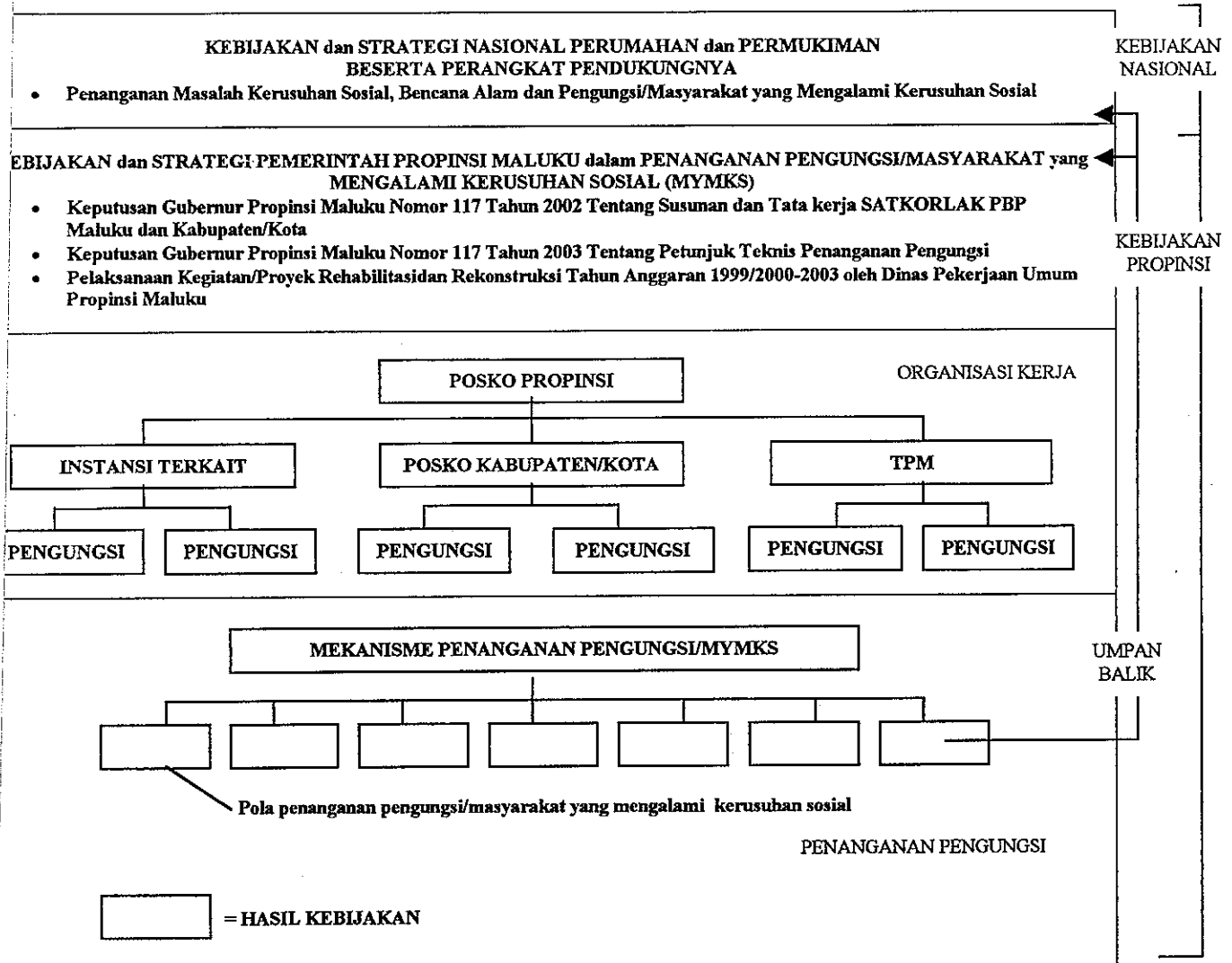
Sedangkan pada tingkat Daerah/Dinas mengikuti pola yang dianut oleh Departemen dalam implementasi dan pengendalian kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan relokasi pada tingkat daerah memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dan keterpaduan antar instansi terkait sehingga dapat memberikan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan masalah pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial umumnya dan relokasi khususnya. Pemilihan lokasi pada saat itu sangat dipengaruhi oleh situasi keamanan yang menyebabkan segregasi wilayah secara komunitas, Desa Passo pada saat itu merupakan daerah yang relatif aman dan memiliki dukungan dalam kebijakan pengembangan wilayah dan kepadatan penduduk dalam skala Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang relatif lebih kecil dibandingkan kecamatan yang lain, aspek sosial ekonomi dan sosial budaya sebagai lokasi relokasi. Disamping itu Desa Passo memiliki ruang lahan untuk pengembangan permukiman, semua ini nantinya akan berperan dalam mendukung perkembangan wilayah bila dapat dikelola dengan baik dalam hal pengelolaan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kebijakan yang dilaksanakan telah menyediakan permukiman yang layak bagi masyarakat Dusun Benteng Karang yang membutuhkan sesuai dengan target kegiatan dan target waktu yang direncanakan.

Hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan ini pada tingkat “ lapangan “ berupa masalah non-teknis berupa pengadaan bahan akibat situasi keamanan yang belum kondusif pada waktu itu, tetapi dapat diatasi dengan cara “ transaksi “ yaitu terjadi penggantian sopir pada daerah yang mengalami segregasi

wilayah secara komunitas atau pengawalan oleh aparat keamanan . Uraian yang dikemukakan dapat dijelaskan seperti pada tabel.IV.1., berikut :

**TABEL.IV.1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI**



#### 4.1.1. Dampak Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) Terhadap Pemukim.

##### A. Kependudukan

Jumlah pemukim dilokasi ini berjumlah 336 Kepala Keluarga (KK) rata-rata pekerjaan pemukim dahulu sebagai petani ladang / berkebun dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil 5 %, Petani 85 % dan bekerja di sektor informal lain 10 %. Di lokasi ini

pekerjaan pemukim sebagai Pegawai Negeri Sipil , Petani dan Pekerja di sektor informal dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil 5 %, Petani 70 % dan pekerja di sektor informal lain 25 %. Kondisi ini diakibatkan oleh luas lahan pertanian/usaha yang disediakan 15 x 15 meter relatif dianggap kurang memadai sebagai lahan pertanian/usaha untuk itu sebagai usulan dalam penanganan lanjutan Dusun ini perlu disediakan lahan pertanian/usaha.

#### B. Sosial Ekonomi

Permukiman ini mulai ditempati pada Tahun 2002, jarak permukiman ini dari pusat pemerintahan Desa Passo 3,5 Kilo Meter. Kondisi pemukim di Dusun Ama Ory sewaktu baru menempati permukiman sangat memprihatinkan sebagai masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial kehidupan sosial ekonominya mulai dari “ nol “/awal. Untuk itu pemukim disini memanfaatkan potensi lahan semaksimal mungkin selain lahan usaha yang disediakan seluas 15 x 15 meter tiap rumah sebagai lahan pertanian/kebun seperti menanam kacang tanah, sayur-sayuran, pepaya dan ubi, pemanfaatan lahan pada beberapa tempat telah melewati batas lahan permukiman. Lahan juga dimanfaatkan untuk peternakan kambing serta memanfaatkan tebing karang sebagai sumber pendapatan. Hasil pertanian biasanya dijual di pasar Desa Passo yang merupakan pasar regional dan menjual di lokasi permukiman dan karang dijual kepada yang memerlukan di lokasi permukiman. Pekerjaan pemukim di lokasi ini selain sebagai petani juga sebagai buruh atau tukang pada pekerjaan konstruksi pada Desa Passo yang semakin pesat perkembangannya terutama pada daerah jalan utama/pertokoan.

Penghasilan pemukim di lokasi yang lama yang bekerja sebagai petani relatif sama sebesar lebih kecil dari Rp. 300.000. – Rp. 500.000. Salahsatu kendala yang membebani perekonomian pemukim di lokasi relokasi adalah transportasi yang relatif mahal, transportasi di Dusun ini dilayani oleh 1 (Satu) kendaraan mikrolet/kijang yang

merupakan swadaya masyarakat dalam pengadaan transportasi bagi pemukim dan beberapa motor ojek. Hasil penelitian sesuai tabel. IV.2. Sosial Ekonomi, seperti berikut :

**TABEL.IV.2. SOSIAL EKONOMI**

No.	Responden	Dampak Sosial Ekonomi			Jumlah	Keterangan
		Penghasilan Meningkat	Penghasilan Tetap	Penghasilan Menurun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengaruh Terhadap Penghasilan	16,67 %	55,13 %	23,08 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan responden yang mengalami penurunan penghasilan lebih besar jumlahnya yaitu sebesar 23,08 % dibandingkan yang mengalami peningkatan penghasilan yaitu sebesar 16,67 % sedangkan berpenghasilan tetap 55,13 %. untuk mengatasi hal ini diusulkan perlu penyediaan sarana transportasi yang terjangkau oleh pemukim.

### C. Sosial Budaya

Pemukim relatif memiliki kesamaan budaya dengan tempat bermukim yang baru di Desa Passo, sehingga telah terbentuk kekerabatan dengan adanya interaksi dengan desa sekitar dalam melaksanakan perayaan hari nasional, perayaan keagamaan, kegiatan gotong royong dan kegiatan olahraga seperti dengan Desa Passo, Desa Hutumuri, Desa Suli, Desa Negeri Lama dan Desa Nania. Forum-forum masyarakat telah terbentuk yang menangani bidang pertanian, peternakan dan kerohanian, forum-forum ini merupakan modal untuk membentuk kemandirian pemukim. Penataan permukiman juga telah memberikan dukungan terhadap keakraban dengan peningkatan pengenalan tetangga sebesar 24,36 % responden dan pengenalan tetangga tetap sebesar 75,64 % responden sesuai tabel.IV.3. Sosial Budaya, seperti tabel dibawah ini :

**TABEL.IV.3. SOSIAL BUDAYA**

No.	Responden	Dampak Sosial Budaya		Jumlah	Keterangan
		Pengenalan Tetangga Meningkat	Pengenalan Tetangga Tetap		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Terhadap Pengenalan Tetangga	24,36 %	75,64 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

#### D. Perumahan

Dalam implementasi kebijakan relokasi seperti yang telah dijelaskan pada Bab. II, meliputi pembangunan perumahan setara Rumah Sederhana Sehat (RSS) tipe 21 juga dilengkapi dengan sarana pendukung permukiman. Pembangunan perumahan dan prasarana dan sarana pendukung permukiman telah menyediakan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan sosial/Dusun Benteng Karang. Perumahan ini bersertifikat sehingga kepemilikan rumah tidak menjadi masalah di kemudian hari perumahan yang dibangun. Dari hasil penelitian sesuai tabel.IV.4. Fisik Rumah., berikut :

**TABEL.IV.4. FISIK RUMAH**

No.	Responden	Dampak Fisik			Jumlah	Keterangan
		Meningkat	Tetap	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengaruh Terhadap Fisik Rumah	51,28 %	46,15 %	2,56 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan fisik rumah telah memberikan peningkatan dari segi fisik sebesar 51,28 % bagi responden, 46,15 % responden fisik rumahnya tetap dan 3,85 % responden tidak diketahui kondisi rumahnya. Masyarakat yang mengalami kerusakan sosial membutuhkan perumahan yang dapat memberikan perlindungan untuk ditempati dalam waktu yang lama mengingat kondisi perekonomian pemukim dapat dikatakan

mulai dari “nol”/awal dimana diharapkan pengeluaran untuk perawatan rumah dapat seminimal mungkin.

Penilaian terhadap kualitas kondisi rumah sesuai tabel IV.5. Kondisi Rumah., seperti tabel berikut :

**TABEL.IV.5. KONDISI RUMAH**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Rumah				Jumlah	Ket
		Bagus (4)	Kurang Bagus (3)	Tidak Bagus (2)	Buruk Sekali (1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penilaian Responden	12,82 %	71,80 %	10,26 %	1,28 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Kondisinya dinilai bagus oleh 12,82 % responden , dinilai kondisinya kurang bagus oleh 71,80 % responden , dinilai kondisinya tidak bagus oleh 10,26 % responden , dinilai kondisinya buruk sekali oleh 1,28 % responden dan 3,85 % responden tidak diketahui tanggapannya. Kondisi ini diakibatkan oleh penyediaan rumah dalam jumlah yang banyak secara serempak di Kota Ambon mengakibatkan kebutuhan bahan yang besar sehingga mengakibatkan penurunan kualitas, disamping itu penyediaan rumah dalam jumlah yang banyak memberikan mobilisasi tukang yang terampil pada lokasi kerja yang mudah dijangkau sehingga keadaan ini juga berpengaruh pada kualitas kondisi rumah di permukiman ini.

#### E. Prasarana dan Sarana Permukiman

##### 1. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang dimiliki permukiman ini berupa 3 (Tiga) ruang kelas dirasakan kurang memadai penilaian terhadap kondisi sarana pendidikan sesuai tabel.IV.6. Kondisi Sarana Pendidikan., berikut :



**TABEL.IV.6. KONDISI SARANA PENDIDIKAN**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Pendidikan					Jumlah	Ket
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	21,80 %	21,80 %	37,18%	15,39 %	3,85 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan 21,80 % responden menilai kondisinya Lebih Bagus, 21,80 % responden menilai kondisinya Sama, 37,18 % responden menilai kondisinya Kurang Bagus dan 3,85 % responden tidak diketahui tanggapannya. Untuk pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan pemukim terhadap sarana pendidikan yang tidak dimiliki pemukim relokasi memenuhinya dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki oleh Dusun Toisapu yang berjarak 2 Kilo Meter untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan sebahagian memanfaatkan sarana yang dimiliki Desa Passo yang berjarak 3,5 Kilo Meter untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Menengah Umum untuk penanganan lanjutan di Dusun ini perlu dipikirkan sarana Taman Kanak-Kanak 2 (Dua) Ruang Kelas dan Sekolah Dasar 6 (Enam) Ruang Kelas sesuai dengan Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (1987 : 33)

dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk operasionalnya.

## 2. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan yang terdapat di permukiman ini merupakan bangunan dengan kondisi setengah permanen 1 (Satu) Unit yang dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan peribadatan selama ini. Penilaian terhadap kondisi sarana peribadatan sesuai tabel.IV.7. Kondisi Sarana Peribadatan., berikut :

**TABEL.IV.7. KONDISI SARANA PERIBADATAN**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Peribadatan					Jumlah	Keterangan
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	12,82 %	38,46 %	43,59 %	2,56 %	2,56 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan 12,82 % responden menilai kondisinya Lebih Bagus, 38,46 % responden menilai kondisinya Sama, 43,59 % responden menilai kondisinya Kurang Bagus, 2,56 % responden menilai kondisinya Buruk Sekali dan 2,56 % responden tidak diketahui tanggapannya.

### 3. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan belum terdapat di permukiman ini pelayanan kesehatan selama ini berupa pos pelayanan terpadu untuk keperluan sarana kesehatan selama ini memanfaatkan Puskesmas yang berjarak 3,5 Kilo Meter dan Rumah Sakit yang berjarak 4 Kilo Meter di Desa Passo dari permukiman. Penilaian terhadap sarana kesehatan sesuai tabel.IV.8. Kondisi Sarana Kesehatan., berikut :

**TABEL.IV.8. KONDISI SARANA KESEHATAN**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Kesehatan					Jumlah	Keterangan
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Kurang Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	8,97 %	24,36 %	32,05 %	26,92 %	7,69 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan 8,97 % responden menilai kondisinya Lebih Bagus, 24,36 % responden menilai kondisinya Sama, 32,05 % responden menilai kondisinya Kurang Bagus, 26,92 % responden menilai kondisinya Kurang Sekali dan 7,69 % responden tidak diketahui tanggapannya. Untuk pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan permukiman ini penanganan lanjutan sesuai Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota

1987 : 69 berupa Balai Pengobatan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk operasionalnya.

#### 4. Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari yang terdapat pada permukiman ini berupa warung yang diusahakan oleh pemukim berjumlah 2 (Dua) unit, 1 (Satu) tempat makan dan pemukim yang berjualan sayur-sayuran secara berkeliling yang dirasakan belum memadai. Penilaian kondisi sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari sesuai tabel.IV.9. Kondisi Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari., berikut :

**TABEL.IV.9. KONDISI SARANA PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari					Jumlah	Keterangan
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	8,97 %	51,28 %	30,76 %	6,41 %	2,56 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan 8,97 % responden menilai kondisinya Lebih Bagus, 51,28 % responden menilai kondisinya Sama dan 30,76 % responden menilai kondisinya Kurang Bagus. Untuk pemenuhan kebutuhan sarana kebutuhan sehari-hari pemukim sesuai Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota 1987 : 71 berupa 5 (Lima) Petak/Ruang yang berfungsi sebagai pertokoan.

Disamping sarana pendukung permukiman, relokasi ini juga dilengkapi dengan prasarana jalan lingkungan, jalan penghubung lingkungan dengan jalan utama, aliran listrik dan air bersih

#### F. Pelibatan Masyarakat

Pembangunan Perumahan berusaha melibatkan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat yang mengalami

kerusuhan sosial untuk membantu memulihkan kehidupan perekonomiannya. Upaya ini juga dapat melibatkan masyarakat Desa Passo untuk ikut terlibat dalam pembangunan perumahan dari segi penyediaan bahan yang memanfaatkan bahan lokal seperti sirtu, *conblock*, kayu untuk bahan kusen sampai dengan tenaga kerja di lapangan seperti tukang. Upaya pelibatan masyarakat pemukim sesuai tabel.IV.10. Pelibatan Masyarakat., berikut :

**TABEL.IV.10. PELIBATAN MASYARAKAT**

No.	Tanggapan Responden	Pelibatan Masyarakat			Jumlah	Keterangan
		Ya	Tidak	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jawaban Responden	67,95 %	30,77 %	1,28 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Pembangunan perumahan dapat menyerap 69,95 % responden untuk ikut terlibat dalam pembangunan perumahan, 30,77 % responden tidak ikut terlibat dalam pembangunan perumahan dan 1,28 % responden tidak diketahui tanggapannya

#### G. Kinerja Pelaksana

Kinerja Pelaksana yang dimaksud disini adalah produk atau tindakan yang diterima oleh masyarakat bukan pada tingkat koordinasi internal atau eksternal yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan relokasi. Penilaian terhadap kinerja pelaksana kebijakan relokasi sesuai tabel.IV.11. Kinerja Pelaksana., berikut :

**TABEL.IV.11. KINERJA PELAKSANA PROGRAM**

No.	Tanggapan Responden	Kinerja Pelaksana Program				Jumlah	Keterangan
		Puas Sekali (4)	Puas (3)	Cukup Puas (2)	Tidak Puas (1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penilaian Responden	15,39 %	14,10 %	41,03 %	29,49 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Pelaksanaan Kebijakan relokasi menunjukan sebesar 70,51 % responden dapat menerima kinerja pelaksana kebijakan dengan perincian 15,39 % responden menilai Puas Sekali dengan kinerja pelaksana kebijakan, 14,10 % responden menilai Puas dengan kinerja pelaksana kebijakan dan 41,03 % responden menilai Cukup Puas dengan Kinerja pelaksana kebijakan, selain itu terdapat 29,49 % responden yang menilai Tidak Puas dengan kinerja pelaksanaan kebijakan dengan alasan kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai seperti sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, proses penempatan pada tempat pengungsian, upah dan kualitas fisik bangunan. Untuk penanganan lanjutan perlu dipikirkan sarana transportasi yang terjangkau oleh pemukim, pemenuhan sarana kesehatan dan penyempurnaan pada proses penempatan pengungsian, upah pekerjaan perumahan dan peningkatan kualitas fisik yang semuanya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelaksana yang merupakan penyempurnaan produk yang diterima oleh masyarakat yang mengalami kerusakan sosial.

#### H. Keinginan Untuk Pindah ke Lokasi Lama

Kebijakan relokasi yang diimplementasikan memberikan penyediaan perumahan dengan status kepemilikan yang sah terhadap lahan dan rumah serta memiliki konstruksi rumah yang permanen, ruang dan lahan untuk pengembangan dan kondisi lingkungan yang mendukung, disamping itu pemilihan lokasi permukiman ini juga mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kebijakan pengembangan kota dimana Desa Passo akan dikembangkan menjadi salahsatu pusat regional, yang mendukung untuk kelangsungan kehidupan dan kesempatan berusaha pemukim kondisi ini mempengaruhi pilihan untuk tidak pindah ke Lokasi yang lama, sesuai tabel.IV.12. Keinginan Pindah Ke Lokasi Lama., berikut :

**TABEL.IV.12. KEINGINAN UNTUK PINDAH KE LOKASI LAMA**

No.	Tanggapan Responden	Keinginan untuk Pindah ke Lokasi Lama		Jumlah	Keterangan
		Tidak	Ya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penilaian Responden	94,87 %	5,13 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Sebesar 94,87 % responden tidak berkeinginan pindah, sedangkan yang berkeinginan pindah 5,13 % responden dengan alasan kepemilikan lahan dan rumah dan keinginan untuk menikmati hasil kebun yang telah diusahakan sebelum kerusuhan sosial di lokasi tempat tinggal yang lama.

#### 4.1.2. Dampak Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) Terhadap Masyarakat Desa Passo

Secara umum sebahagian besar masyarakat Desa Passo menerima keberadaan relokasi dengan pertimbangan kemanusiaan dan mendukung kebijakan pemerintah kota dan sebahagian kecil masyarakat Desa Passo tidak dapat menerima keberadaan permukiman kembali dengan pertimbangan akan terjadi pemisahan secara komunitas yang akan menimbulkan masalah sosial budaya dan kepemilikan sesuai tabel.IV.13. Tanggapan Masyarakat Desa Passo Terhadap Keberadaan Relokasi., berikut :

**TABEL.IV.13. TANGGAPAN MASYARAKAT DESA PASSO TERHADAP KEBERADAAN RELOKASI**

No.	Pendidikan	Tanggapan Terhadap Relokasi			Keterangan
		Menerima	T. D. Menerima	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SD	5,43 %	2,17 %	-	
2.	SLTP	14,13 %	1,09 %	-	
3.	SMU	48,91 %	7,61 %	1,09 %	
4.	Akademi	4,35 %	2,17 %	-	
5.	Perguruan Tinggi	9,78 %	2,17 %	-	
6.	Tidak Diketahui	1,09 %			
	Jumlah	83,69 %	15,21 %	1,09 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Menunjukkan 83,69 % responden Menerima keberadaan relokasi, 15,21 % responden Tidak Dapat Menerima keberadaan relokasi dan 1,09 % Tidak Diketahui

tanggapannya. Dampak sosial ekonomi relokasi terhadap masyarakat Desa Passo, relokasi memberikan peningkatan penghasilan terhadap 18,48 % responden, tidak berpengaruh terhadap 40,22 % responden, memberikan pengaruh penurunan penghasilan kepada 26,08 % responden dan tidak diketahui pengaruhnya terhadap 15,22 % responden seperti pada tabel .IV.14. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Passo., berikut :

**TABEL.IV.14. SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA PASSO**

No.	Responden	Dampak Sosial Ekonomi				Jumlah	Keterangan
		Penghasilan Meningkat	Penghasilan Tetap	Penghasilan Menurun	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengaruh Terhadap Penghasilan	18,48 %	40,22 %	26,08 %	15,22 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Kondisi ini diakibatkan oleh karena sebagian pekerjaan sampingan pemukim relokasi dan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial yang menetap di Desa Passo sama dengan pekerjaan masyarakat Desa Passo yang bekerja di sektor informal sebagai pedagang ” papalele ”, konsentrasi pemasaran masyarakat Desa Passo masih memasarkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di Desa Passo akibat kondisi kerusakan sosial yang masih menjadi traumatis oleh sebagian masyarakat Desa Passo dengan berangsur membaiknya kondisi keamanan di Kota Ambon diharapkan pemasaran hasil pertanian perkebunan dan perikanan pada Desa Passo dapat dimanfaatkan oleh wilayah lain, seperti dari arah Desa Wayame, Kota Ambon dan wilayah lain yang membutuhkan dan dapat membantu meningkatkan penghasilan bagi masyarakat Desa Passo dan pemukim relokasi. Pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusakan sosial perlu mendapat penanganan untuk dapat memulihkan penghidupan mereka. Kondisi keamanan yang berangsur membaik dapat lebih mendorong fungsi pelayanan Desa Passo sebagai sub pelayanan regional disamping Kota Ambon dimana

kondisi ini telah terlihat dengan perkembangan pertokoan disepanjang Jalan Woltermonginsidi dan disimpang Jalan Leo Wattimena dan Jalan Woltermonginsidi.

Kebijakan yang dilaksanakan telah menyediakan permukiman yang layak bagi masyarakat Dusun Benteng Karang, masyarakat Desa Passo mengusulkan untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan ini perlu membenahi penyediaan prasarana dan sarana, Lingkungan hidup dan Sanitasi dalam kegiatan tanggap darurat dan penanganan masalah pasca kerusuhan sosial terhadap masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial.

#### 4.1.3. Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Perkembangan Wilayah Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran)

Secara umum kebijakan relokasi yang telah diimplementasikan menyediakan permukiman yang layak huni bagi masyarakat Dusun Benteng Karang yang mengalami kerusuhan sosial pada Tahun 1999 dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, fisik perumahan dan prasarana/sarana pendukung permukiman, disamping itu juga memperhatikan kebijakan pengembangan kota bagi kemungkinan pengembangan yang dapat dilaksanakan pada Dusun Ama Ory sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah Dusun Ama Ory dimana lahan pertanian/usaha telah dimanfaatkan dengan menanam Kacang Tanah, Sayur-sayuran, Pepaya dan Ubi, memperhatikan rata-rata pekerjaan penduduk di lokasi lama sebagai petani ladang, pemanfaatan lahan disekitar lokasi relokasi sebagai lahan pertanian dengan menanam Jagung, Kacang Tanah dan sayur-sayuran memperhatikan kondisi dan potensi Dusun Toisapu dan Desa Hutumuri yang berada didekatnya sebagai dusun dan desa pertanian yang menghasilkan Cengkeh, Pala, Durian, Kelapa dan tanaman Palawija dan dukungan kebijakan pengembangan kota dimana Dusun Toisapu dan Desa Hutumuri dikembangkan sebagai pusat kegiatan lokal yang berorientasi pertanian hortikultura dan perikanan yang dapat menjadikan Desa Passo sebagai pasar potensial untuk pemasarannya mengingat Desa Passo yang



dikembangkan sebagai pusat perdagangan regional dan pusat perumahan baru dan perkembangan yang terjadi pada Desa Passo akhir-akhir ini seperti dengan makin banyaknya pertokoan dan pembangunan bangunan perdagangan dalam skala besar di simpang Desa Passo. Dusun Ama Ory dalam penanganan lanjutan dapat dikembangkan sebagai permukiman bercirikan pertanian.

#### **4.2. Relokasi di Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol), Desa Passo**

Relokasi di Dusun Lembah Agro, Desa Passo seperti dijelaskan pada Bab. III dilaksanakan oleh yayasan non-profit dan swadaya masyarakat/pemukim, berupa stimulan bantuan pembangunan rumah berupa pondasi rumah, rangka bangunan rumah, penutup atap bangunan berupa zink dan WC yang telah mnyediakan 300 rumah dan fasilitas pendukung permukiman.

Dampak Relokasi di Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol) Terhadap Pemukim.

##### **A. Kependudukan**

Jumlah pemukim dilokasi ini berjumlah 300 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 215 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Kabupaten Buru, Kecamatan Buru Utara, Kecamatan Buru Utara Timur dan 85 Kepala Keluarga (KK) dari Kota Ambon. Pemukim yang berasal dari Kabupaten Buru dahulunya merupakan petani sawah dan yang berasal dari Kota Ambon pekerjaannya bervariasi. Pemukim yang berasal dari Kabupaten Buru beralih pekerjaan mengikuti kondisi dan potensi ekonomi di Desa Passo seperti petani ladang dan bekerja disektor informal lain.

##### **B. Sosial Ekonomi**

Pemukiman di Dusun ini mulai ditempati pada tahun 2002, jarak permukiman ini 1,5 Kilo Meter dari pusat pemerintahan Desa Passo Kondisi pemukim juga sama dengan kondisi pemukim Dusun Ama Ory sangat memprihatinkan yang dapat dikatakan mulai dari “ nol “/ awal. Lahan usaha yang diusahakan oleh pemukim disini merupakan

lahan usaha atas ijin pemerintah Desa. Pekerjaan pemukim di lokasi ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja disektor informal seperti petani, berjualan kebutuhan sehari-hari, berjualan bakso keliling dan bekerja sebagai buruh dan tukang bangunan di sekitar Desa Passo. Kondisi prasarana yang menyulitkan pemukim dilokasi adalah jalan lingkungan yang masih merupakan jalan tanah sehingga transportasi pemukim dimusim penghujan terganggu untuk itu perlu dipikirkan lahan usaha/pertanian dan prasarana dan sarana transportasi yang memadai bagi pemukim di lokasi ini. Dari hasil penelitian menunjukkan penghasilan pemukim, 16,00 % responden mengalami peningkatan penghasilan, 12,00 % responden berpenghasilan tetap, 56,00 % responden mengalami penurunan penghasilan dan 16,00 % responden tidak diketahui seperti tabel.IV.15. Sosial Ekonomi, berikut :

**TABEL.IV.15. SOSIAL EKONOMI**

No.	Responden	Dampak Sosial Ekonomi				Jumlah	Keterangan
		Penghasilan Meningkat	Penghasilan Tetap	Penghasilan Menurun	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengaruh Terhadap Penghasilan	16,00 %	12,00 %	56,00 %	16,00 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

### C. Sosial Budaya

Pemukim di lokasi ini mempertimbangkan aspek sosial budaya pemukim dimana pemukim telah berinteraksi dengan wilayah sekitar dengan perayaan hari nasional, perayaan keagamaan dan kegiatan gotong-royong secara bersama . Forum-forum masyarakat telah terbentuk seperti forum masyarakat yang menangani bidang pertanian dan bidang kerohanian, forum-forum ini merupakan modal untuk kemandirian pemukim. Penelitian menunjukkan Penataan pemukiman terhadap pengenalan tetangga,

24,00 % responden mengalami peningkatan, 16 % responden tetap dan 60,00 % responden mengalami penurunan, seperti tabel.IV.16. Sosial Budaya, berikut :

**TABEL.IV.16. SOSIAL BUDAYA**

No.	Responden	Dampak Sosial Budaya			Jumlah	Keterangan
		Pengenalan Tetangga Meningkat	Pengenalan Tetangga Tetap	Pengenalan Tetangga Menurun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengaruh Terhadap Pengenalan Tetangga	24,00 %	16,00 %	60 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

#### D. Perumahan

Pembangunan perumahan di lokasi ini telah memberikan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan di lokasi ini, dengan kondisi lahan perumahan di Dusun ini merupakan hak pakai, konstruksi bangunan setengah permanen, jarak antar rumah terlalu dekat dan pengamanan tebing belum memadai untuk itu perlu dipikirkan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian menunjukkan Fisik perumahan, 8,00 % responden mengalami peningkatan, 44,00 % responden kondisi tetap 4,00 % responden mengalami penurunan dan 4 % responden tidak diketahui kondisinya seperti tabel.IV.17. Fisik Rumah, berikut :

**TABEL.IV.17. FISIK RUMAH**

No.	Responden	Dampak Fisik				Jumlah	Keterangan
		Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengaruh Terhadap Fisik Rumah	8,00 %	44,00 %	44,00 %	4,00 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Penilaian Terhadap Kondisi Fisik rumah, Prasarana dan Sarana Pendukung Permukiman. Prasarana dan sarana Dusun Lembah Agro selain sarana peribadatan dan

sarana kesehatan memanfaatkan prasarana dan sarana Desa Passo/Desa Induk. Penilaian terhadap rumah, prasarana dan sarana pendukung permukiman. Rumah, 52,00 % dinilai responden kondisi bagus, 36,00 % dinilai responden kondisi kurang bagus, 8,00 % dinilai tidak bagus, dan 4,00 % tidak diketahui tanggapannya, seperti tabel.IV.18. Kondisi Rumah, berikut :

**TABEL.IV.18. KONDISI RUMAH**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Rumah					Jumlah	Ket.
		Bagus (4)	Kurang Bagus (3)	Tidak Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	52,00 %	36,00 %	8,00 %	-	4,00 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

#### E. Prasarana dan Sarana Permukiman

##### 1. Sarana Pendidikan

Relokasi ini tidak memiliki sarana pendidikan, pemukim memanfaatkan sarana pendidikan di Desa Passo untuk itu perlu dipikirkan bantuan mengatasi masalah tersebut. Penilaian responden terhadap kondisi sarana pendidikan, 60,00 % responden menilai kondisi lebih bagus, 32,00 % responden menilai kondisi sama dan 8,00 % responden tidak diketahui tanggapannya, seperti tabel.IV.19. Kondisi Sarana Pendidikan, berikut :

**TABEL.IV.19. KONDISI SARANA PENDIDIKAN**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Pendidikan					Jumlah	Ket
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	60,00 %	32,00 %	-	-	8,00 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

## 2. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang dimiliki permukiman ini berupa bangunan permanen 1 (Satu) unit. Penilaian responden terhadap kondisi sarana peribadatan, 52,00 % responden menilai kondisi lebih bagus, 44,00 % responden menilai kondisi sama dan 4,00 % responden menilai kondisi kurang bagus, seperti tabel.IV.20. Kondisi Sarana Peribadatan, berikut :

**TABEL.IV.20. KONDISI SARANA PERIBADATAN**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Peribadatan					Jumlah	Keterangan
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	52,00 %	44,00 %	4,00 %	-	-	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

## 3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang dimiliki permukiman ini berupa bangunan setengah permanen 1 (Satu) unit dan pemukim juga memanfaatkan sarana kesehatan di Desa Passo. Penilaian responden terhadap sarana kesehatan, 88,00 % responden menilai kondisi lebih bagus, 12,00 % responden menilai kondisi sama, seperti tabel.IV.21. Kondisi Sarana Kesehatan, berikut :

**TABEL.IV.21. KONDISI SARANA KESEHATAN**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Kesehatan					Jumlah	Keterangan
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Kurang Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	88,00 %	12,00 %	-	-	-	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

#### 4. Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dimiliki permukiman ini berupa warung/kios 6 (Enam) unit yang diusahakan pemukim di rumah mereka dan pemukim memanfaatkan pasar yang terletak dekat dengan permukiman. Penilaian responden terhadap kondisi sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari, 64,00 % responden menilai kondisinya lebih bagus, 28,00 % responden menilai kondisinya sama, dan 8,00 % responden menilai kondisinya kurang bagus, seperti tabel.IV.22. Kondisi Sarana Pemenuhan Sehari-Hari, berikut :

**TABEL.IV.22. KONDISI SARANA PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI**

No.	Tanggapan Responden	Kondisi Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari					Jumlah	Ket.
		Lebih Bagus (4)	Sama (3)	Kurang Bagus (2)	Buruk Sekali (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	64,00 %	28,00 %	8,00%	-	-	100 %	

Sumber : Hasil Survei lapangan

Disamping itu relokasi di Lembah Agro juga dilengkapi dengan jalan lingkungan yang berupa jalan tanah, jalan penghubung lingkungan dengan jalan utama yang berupa jalan tanah, aliran listrik dan air bersih

#### F. Pelibatan Masyarakat

Pekerjaan pembangunan rumah di lokasi relokasi melibatkan 100 % responden dengan pemberian bantuan berupa stimulan untuk pembangunan rumah sehingga masyarakat pemukim seluruhnya terlibat dalam pembangunannya.

#### G. Penilaian Terhadap Kinerja Pelaksana

Penilaian terhadap kinerja pelaksana menunjukkan 52,00 % responden dapat menerima kinerja pelaksana yang terdiri dari 12,00 % responden menilai puas sekali, 12,00 % responden menilai puas, 28 % responden menilai cukup puas dan 48,00 %

tidak diketahui tanggapannya, seperti tabel.IV.23. Kinerja Pelaksana, berikut :

**TABEL.IV.23. KINERJA PELAKSANA**

No.	Tanggapan Responden	Kinerja Pelaksana Program					Jumlah	Keterangan
		Puas Sekali (4)	Puas (3)	Cukup Puas (2)	Tidak Puas (1)	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penilaian Responden	12,00 %	12,00 %	28,00 %	-	48,00 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

#### H. Keinginan Untuk Pindah Ke Lokasi Yang Lama

Relokasi ini menyediakan perumahan berupa bantuan stimulan perumahan dan hasil swadaya masyarakat dengan status kepemilikan hak pakai dengan konstruksi rumah setengah permanen, pilihan lokasi mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kebijakan pengembangan kota dimana Desa Passo kan dikembangkan sebagai pusat regional yang mendukung kelangsungan hidup dan kesempatan berusaha. Penilaian terhadap keinginan pindah ke lokasi lama, 48,00 % responden tidak berkeinginan pindah, 12 % responden berkeinginan pindah dan 40 % responden tidak diketahui tanggapannya, seperti tabel.IV.24. Keinginan Untuk Pindah Ke Lokasi Yang Lama, berikut :

**TABEL.IV.24. KEINGINAN UNTUK PINDAH KE LOKASI LAMA**

No.	Tanggapan Responden	Keinginan untuk Pindah ke Lokasi Lama			Jumlah	Keterangan
		Tidak	Ya	Tidak Diketahui		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Penilaian Responden	48,00 %	12,00 %	40 %	100 %	

Sumber : Hasil Survei Lapangan

#### 4.3. Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) dan Relokasi di Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol).

Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory merupakan kebijakan negara yang bersifat *non-self executing* dan dikategorikan sebagai kebijakan *Redistributive*

dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani masalah perumahan dan permukiman dan relokasi di Lembah Agro merupakan upaya dari yayasan non-profit dan swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman. Keduanya merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memulihkan sebahagian kehidupan masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dari sejumlah besar masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial yang belum tertangani dalam kebijakan penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial dan kondisi prasarana dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

Kondisi Pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial yang telah lama berada di pengungsian dapat memberikan dampak yang negatif kepada fisik dan psikis pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial, terutama bagi proses pembentukan pola pikir anak-anak di tempat pengungsian. Kebutuhan Perumahan untuk pengungsi di Propinsi Maluku yang belum tertangani sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2003 sesuai data Pos Komando Penanganan Pengungsi 2003 : 4, berjumlah 36.878 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp. 507.072.500.000,- (Lima Ratus Tujuh Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan untuk pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial Kota Ambon sampai dengan Bulan Oktober 2003 yang belum tertangani 16.311 Kepala Keluarga (KK) dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 224.276.250.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), seperti pada tabel.IV.25., Berikut :



**TABEL.IV.25. PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA PERUMAHAN AKIBAT KERUSUHAN SOSIAL SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER TAHUN 2003**

No.	Pengungsi/Masyarakat Yang Mengalami Kerusuhan Sosial Yang Belum Tertangani	Perkiraan Bantuan (Rp.)		Jumlah (Rp.)	Keterangan
		Rumah	Jaminan Sosial		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Propinsi Maluku 36.878 KK	10.000.000	3.750.000	507.072.500.000	
2.	Kota Ambon 16.311 KK	10.000.000	3.750.000	224.276.250.000	

Sumber : Pos Komando Penanganan Pengungsi, Pemerintah Propinsi Maluku 2003.

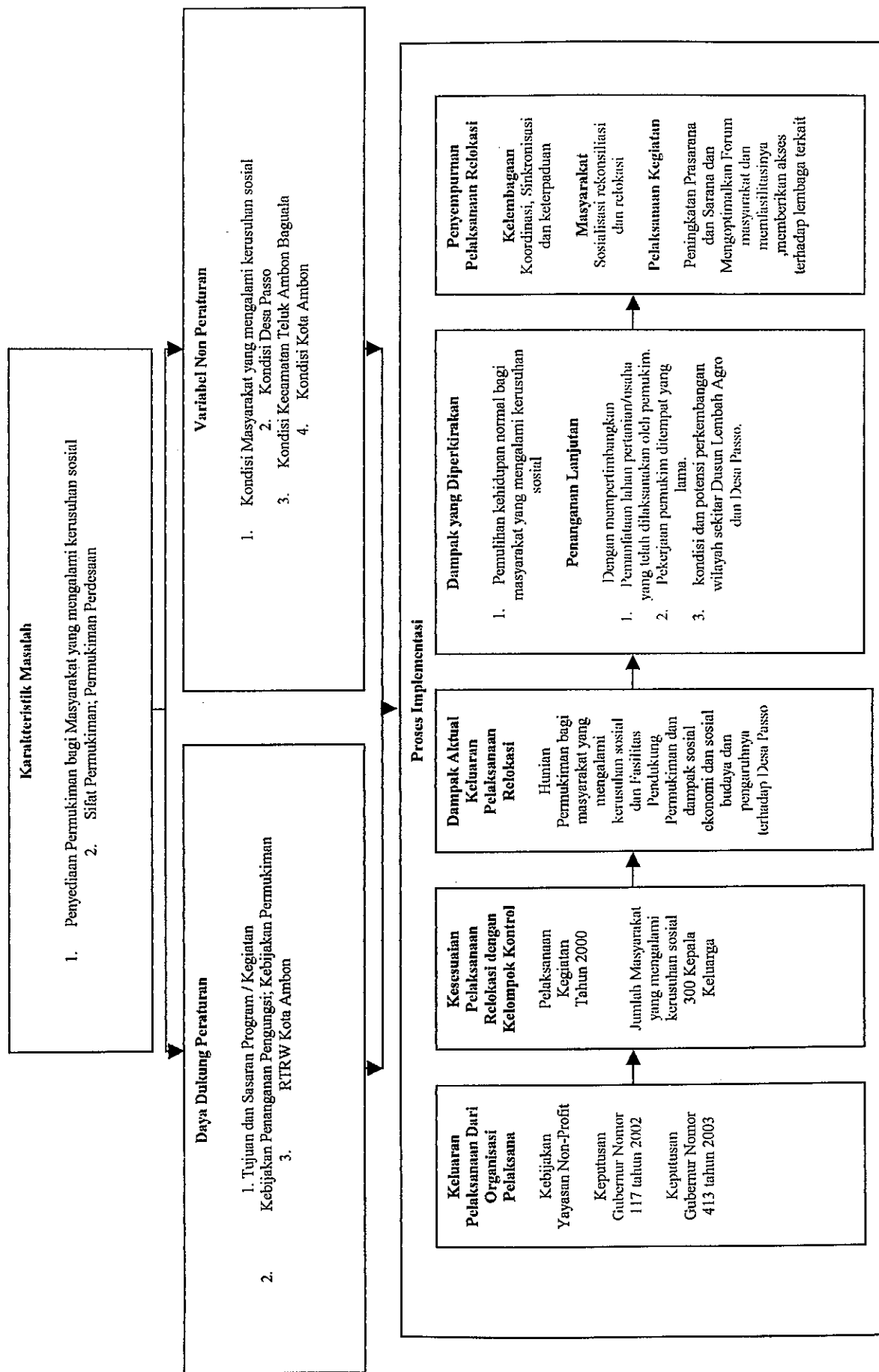
Untuk perkiraan kebutuhan Biaya sesuai data dari Pos Komando Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku Bulan Oktober Tahun 2003 : 4, biaya untuk Prasarana dan Fasilitas Umum yang rusak diperkirakan sebesar Rp. 158.130.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dari tabulasi hasil kegiatan relokasi di Dusun Ama Ory dan Dusun Lembah Agro sesuai tabel.III.32. Hasil kegiatan di Dusun Ama Ory dan Dusun Lembah Agro, Terlihat kebijakan relokasi memberikan pemenuhan kebutuhan rumah, prasarana dan sarana yang mendukung bagi kelangsungan kehidupan pemukim.

Dari pembahasan yang sudah diberikan dapat disimpulkan dalam model evaluasi implementasi kebijakan relokasi seperti pada gambar.IV.1.dan implementasi pelaksanaan relokasi seperti pada gambar.IV.2., berikut :



**GAMBAR.IV.2. MODEL EVALUASI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RELOKASI**



## **BAB. V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari uraian yang telah dikemukakan pada Bab. III dan Bab. IV untuk mengatasi permasalahan di Propinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Desa Passo dan Dusun Ama Ory dalam usaha pemulihan kehidupan masyarakat dari segi hukum/hak kepemilikan, segi sosial ekonomi/pendapatan, sosial budaya/sistem nilai dan psikologis/rasa aman yang terganggu akibat kerusuhan sosial, dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada tingkat propinsi dan kota, telah mengalami penurunan sosial ekonomi, sosial budaya, rasa aman yang cukup besar dan mengalami kerusakan prasarana dan sarana yang mengurangi fungsi pelayanan propinsi dan kota yang terindikasikan dengan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kerusakan prasarana dan sarana, traumatis psikologis yang dialami masyarakat dan sejumlah besar pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial, sehingga memerlukan penanganan perekonomian, kerusakan prasarana dan sarana, traumatis psikologis masyarakat dan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di propinsi dan kota.
- Pada tingkat kecamatan juga mengalami imbas dari penurunan di tingkat propinsi dan kota yang terindikasikan dengan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan sebaran pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial sehingga memerlukan penanganan perekonomian dan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di kecamatan.

- Pada tingkat desa memerlukan penanganan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial untuk mendukung dalam pemulihan kehidupan masyarakat di desa dan kewilayahan desa sesuai kebijakan pengembangan kota.

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) dan Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol) dapat disimpulkan dan diberikan rekomendasi sebagai berikut :

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian kriteria kebijakan relokasi maka penelitian di Dusun Ama Ory (Kelompok Sasaran) dan Dusun Lembah Agro (Kelompok Kontrol), Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon menyimpulkan sebagai berikut :

#### **A. Kebijakan Relokasi di Dusun Ama Ory**

- Kondisi keamanan yang menyebabkan segregasi wilayah merupakan faktor dominan dalam implementasi kebijakan relokasi di Desa Passo.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory menyediakan perumahan yang permanen dan bersertifikat.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory perumahan dan permukiman dengan prasarana dan sarana pendukung permukiman yang layak huni.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory melibatkan sebahagian besar (sebesar 69,95 % responden) pemukim dalam pembangunannya.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory menunjukan sebahagian besar (sebesar 70,51 % responden) pemukim menerima kinerja pelaksana program.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory menunjukan sebahagian besar (sebesar 94,87 % responden) pemukim tidak berkeinginan pindah ke lokasi lama.
- Implementasi kebijakan relokasi mendapat dukungan pemahaman masyarakat Desa Passo (sebesar 83,69 % responden) terhadap masalah kerusuhan sosial dan relokasi.

- Implementasi kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan pengembangan kota.
- Implementasi kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory memperhatikan arahan pembangunan di Desa Passo.

#### B. Pelaksanaan Relokasi

- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro memerlukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung permukiman.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro menyediakan perumahan semi permanen dan status kepemilikan hak pakai.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro melibatkan seluruh pemukim dalam pembangunannya.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro menunjukan sebahagian (sebesar 52 % responden) pemukim menerima kinerja pelaksana.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro menunjukan sebahagian (sebesar 48 % responden) tidak berkeinginan pindah ke lokasi lama.

#### C. Simpulan

- Kebijakan relokasi menyediakan perumahan dan permukiman yang layak huni bagi kelompok sasaran dari segi sosial ekonomi, segi sosial budaya, fisik perumahan, prasarana dan sarana serta memperhatikan kebijakan pengembangan kota yang mendukung bagi perkembangan wilayah Dusun Ama Ory dan perkembangan wilayah Desa Passo.
- Kebijakan relokasi di Dusun Ama Ory yang menyediakan 336 unit perumahan dan permukiman dan relokasi di Dusun Lembah Agro yang menyediakan 300 unit

perumahan dan permukiman merupakan upaya pemenuhan sebagian kebutuhan pengungsi/masyarakat yang mengalami kerusuhan sosial akan kebutuhan perumahan dan permukiman yang berjumlah 16.311 unit di Kota Ambon.

- Lokasi relokasi memerlukan aksesibilitas terhadap segi sosial, segi ekonomi, segi budaya, segi kebijakan dan segi keamanan.

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan rekomendasi hal-hal berikut.

## **5.2. Rekomendasi**

Dari hasil penelitian ini, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

- Penanganan lanjutan kebijakan ini terhadap Dusun Ama Ory diarahkan sebagai permukiman yang bercirikan pertanian dengan peningkatan prasarana dan sarana dan memanfaatkan forum-forum masyarakat yang telah terbentuk, sesuai potensi dan perkembangan wilayahnya.
- Pelaksanaan relokasi di Dusun Lembah Agro memerlukan bantuan prasarana dan sarana transportasi dan pendidikan.
- Konsistensi koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan dalam implementasi kebijakan pada tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat “lapangan” menentukan keberhasilan kinerja kebijakan.
- Untuk penelitian lanjutan diharapkan dilaksanakan dalam periode tertentu di waktu yang akan datang untuk dapat melihat hasil perkembangan kehidupan pemukim dan wilayah sekitar sehingga dapat ditentukan karakteristik permukiman dan wilayah secara lebih terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anderson, Larz .T. 1995. *Guidelines for Preparing Urban Plans* : Amerika, American Planning Association.
- Bryson, John. M. 1999. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* : Jakarta, Grasindo.
- Budiyanto, Eko. 2002. *Sistem Informasi Geografis Menggunakan Arc View GIS* : Jogjakarta Penerbit Andi.
- Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan di Indonesia* : Jogjakarta, Penerbit Transmedia Global Wacana.
- Chambers, Robert. 1996. *Memahami Desa Secara Partisipatif* : Jogjakarta, Penerbit Kanisius.
- Chapman, K. 1979. *People, Pattern and Process, Introduction to Human Geography* : London, Edward Arnold Limited.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa* : Bandung, Penerbit Alumni
- Darmawan, Edy et al. 2002. *Perumahan dan Permukiman yang Sinergis* : Semarang, Universitas Diponegoro.
- De Chiara, Joseph dan Lee Koppelman. 1985. *Standart Perencanaan Tapak* : Bandung, Penerbit Erlangga.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi* : Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Doxiadis, Constantin A. 1978. *An Introduction to the Science of Human Settlement* : London, Hutchinson and Co Limited.
- Dunn, William. 1984. *Analisa Kebijaksanaan Publik* : Jogjakarta, PT. Hanindita Graha Widya.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* : Jogjakarta, Gadjah Mada University Press.
- Evers. 1992. *Sosiologi Perkotaan* : Jakarta, LP3ES.
- Gallion, Arthur. B. dan Simon Eisner. 1992a. *Pengantar Perancangan Kota - Desain dan Perencanaan Kota*, Jilid 1 : Bandung, Penerbit Erlangga.



- , 1994b. *Pengantar Perancangan Kota - Desain dan Perencanaan Kota*, Jilid 2 : Bandung, Penerbit Erlangga.
- Gerungan, W. A. 1991. *Psikologi Sosial* : Bandung, PT. Eresco.
- Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional* : Jakarta, Universitas Indonesia.
- Gugler, J. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* : Jogjakarta, PT. Tiara Wacana.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia* : Surabaya, Penerbit Usaha Nasional.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* : Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Jayadinata, Johara.T. 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah* : Bandung, Penerbit ITB.
- Koentjaraningrat. 1985. *Antropologi Sosial* : Jakarta, PT. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi* : Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Messakh, Thobias. A. 2003. *Evaluasi Kebijakan Permukiman Kembali Pengungsi di Perbatasan Indonesia-Timor Leste (studi kasus, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur)* : Semarang, Universitas Diponegoro.
- Minar, D. and Greer, S. *The Concept of Community* : Illinois, Aldine Publishing Company.
- Rapoport, Amos. 1982. *The Meaning of The Built Environment* : New Delhi, Sage Publication.
- Rapoport, Amos. 1990. *Human Aspect of Urban Form* : New York, Pergamon Press.
- Salusu, J. 1984. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* : Jakarta, PT. Gramedia.
- Sarosa, Wicaksono. 2002. *A Framework for the Analysis of Urban Sustainability* : Jakarta, The Urban and Regional Development Institute.
- Sarwono, S. W. 1992. *Psikologi Lingkungan* : Jakarta, PT. Gramedia.
- Silas, J. 1996. *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan* : Jakarta, PT. Gramedia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey* : Jakarta, LP3ES 1989.

- Snyder, C. J. dan Catanese, J. A. 1991. *Pengantar Arsitektur* : Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati. S. dan B. S. Kusbiantoro. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia* : Jakarta, Penerbit PT. Gramedia.
- Sugiarto et al. 2001. *Teknik Sampling* : Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sujarto, Djoko. 1977. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Perencanaan Lokal* : Jogjakarta, BPA, Universitas Gajah Mada
- Sukirno, Sadono. 1976 *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah* : Jakarta, Universitas Indonesia.
- Supranto, J. 1998. *Teknik Sampling Untuk Survei dan Eksperimen* : Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Syaukani, H.R. et al. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* : Jogjakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Tambunan, Tulus. 1996. *Garis Kemiskinan Perdesaan* : Surabaya, Penerbit Racika Cipta.
- Umbara, Andy Rizal. 2003. *Kajian Relokasi Permukiman Kumuh Nelayan ke Rumah Susun Kedaung, Bandar Lampung* : Semarang, Universitas Diponegoro.
- Usman, Sanyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* : Jogjakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* : Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra et al. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik* : Jakarta, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Zeisel, J. 1987. *Inquiry by Design : Tool for Environment-Behavior Research* : New York, Cambrige University Press.
- , 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999* : Penerbit Karya Anda.

#### **BUKU DATA/LAPORAN**

*Bidang Ke-PU-an di Propinsi Maluku Dalam Rangka Menunjang Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan Daerah Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku, 1992.*

*Kamus Tata Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1997.*

*Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Perumahan dan Permukiman, 2002.

*Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2000 – 2003*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2000.

*Kecamatan Teluk Ambon Baguala Dalam Angka 2001*, Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2001.

*Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengungsi*, Pemerintah Provinsi Maluku, 2003.

*Kewenangan Daerah di Bidang Perumahan dan Permukiman*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, 2003.

*Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon 2003-2013*. Pemerintah Kota Ambon.

*Konsep Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kekumuhan*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal perumahan dan Permukiman, 2002.

*Kota Ambon dalam Angka 2000*. Pemerintah Kota Ambon, 2000.

*Laporan Final Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku 2001*. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Proyek Pengembangan Manajemen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, 2001.

*Majalah Kiprah*, Departemen Pekerjaan Umum, Edisi Agustus, 2001.

*Majalah Kiprah*, Departemen Pekerjaan Umum, Edisi November, 2001.

*Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota*, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya, 1983.

*Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Swadaya*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001.

*Penanganan Pengungsi Maluku*, Komisi Penanganan Pengungsi-Pos Komando Penanganan Pengungsi, Pemerintah Provinsi Maluku, 2003.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang*, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996

*Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*, Departemen Pekerjaan Umum, 1987.

*Peraturan Bangunan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 1984.*

*Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Maluku 2001-2005, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Lembaga Penelitian Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung, 1992.*

*Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Ambon 1993/1994, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon, 1993/1994.*

*Sekilas Perumahan dan Permukiman di Indonesia, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2001.*

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman, 1992.*